



**ANALISIS DERAJAT KONSENTRASI INDUSTRI  
PERBANKAN DI INDONESIA  
TAHUN 2001-2013**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Ika Nurjannah**  
**NIM 110810101184**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**ANALISIS DERAJAT KONSENTRASI INDUSTRI  
PERBANKAN DI INDONESIA  
TAHUN 2001-2013**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)  
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:  
**Ika Nurjannah**  
**NIM 110810101184**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

### **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Saudah dan Susilowati serta Ayahanda Mahki dan Nasir tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Kakak-kakakku Jamal dan Agus Santoso, serta adikku tercinta Siti Komariah, yang telah memberikan motivasi, dukungan moral, dan semua pengorbanan selama ini;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran; dan
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**MOTTO**

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri

(Terjemahan Surah Al-Ra'd: 11)

*Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other*

(Abraham Lincoln)

Harga diri seseorang tidak dinilai melalui seberapa banyak harta kekayaan yang dimilikinya, melainkan dari bobot isi otaknya

(Adhitya Wardhono)

*Do what you can do, so that Allah will do what you cannot do*

(Mario Teguh)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Nurjannah

NIM : 110810101184

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 April 2015

Yang menyatakan,

Ika Nurjannah  
NIM 110810101184

**SKRIPSI**

**ANALISIS DERAJAT KONSENTRASI INDUSTRI  
PERBANKAN DI INDONESIA  
TAHUN 2001-2013**

Oleh  
Ika Nurjannah  
NIM 110810101184

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Sarwedi, MM

Dosen Pembimbing II : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia  
Tahun 2001-2013  
Nama Mahasiswa : Ika Nurjannah  
NIM : 110810101184  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Moneter  
Tanggal Persetujuan : 15 April 2015

Pembimbing I

Prof. Dr. Sarwedi, MM  
NIP. 195310151983031001

Pembimbing II

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.kes  
NIP. 196411081989022001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.kes  
NIP. 196411081989022001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**ANALISIS DERAJAT KONSENTRASI INDUSTRI PERBANKAN  
DI INDONESIA TAHUN 2001-2013**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ika Nurjannah

NIM : 110810101184

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

8 Mei 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Regina Niken W., SE, M.Si (.....)  
NIP. 197409132001122001
2. Sekretaris : Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes (.....)  
NIP. 195812061986031003
3. Anggota : Dra. Andjar Widjajanti, MP (.....)  
NIP. 195206161977022001
4. Pembimbing I : Prof. Dr. Sarwedi, MM (.....)  
NIP. 195310151983031001
5. Pembimbing II : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes (.....)  
NIP. 196411081989022001

Foto 4 X 6  
warna

Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si  
NIP. 19630614 199002 1001

*Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013*

**Ika Nurjannah**

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Industri perbankan mengalami perkembangan cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai hasil deregulasi, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Krisis keuangan tahun 1997/1998 hingga implementasi API tahun 2004 telah berperan besar dalam mengurangi jumlah bank di Indonesia yang disertai munculnya isu penting terkait dampak berkurangnya jumlah bank terhadap derajat konsentrasi industri perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur derajat konsentrasi industri perbankan menggunakan pendekatan struktural yang terdiri dari CRk, HHI dan Koefisien Gini yang mengacu pada paradigma SCP dengan menggunakan variabel total aset, DPK dan kredit seluruh bank konvensional di Indonesia selama periode 2001-2013, serta mengidentifikasi keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja industri perbankan menggunakan metode deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa berkurangnya jumlah bank diikuti oleh turunnya derajat konsentrasi di pasar aset dan DPK, sebaliknya meningkatkan konsentrasi di pasar kredit. Secara umum, derajat konsentrasi industri perbankan Indonesia berada pada tingkat *secondary concentration* yang identik dengan pasar oligopoli dan spektrum I sesuai ketentuan KPPU, dengan tingkat konsentrasi tertinggi di pasar DPK, dan konsentrasi terendah di pasar kredit. Ketimpangan pangsa pasar antara bank besar dan bank kecil masih sangat tinggi selama periode pengamatan. Selain itu, eksistensi pengaturan dan pengawasan yang terlalu ketat dapat meningkatkan *risk-taking behavior* bank dan inefisiensi pada industri perbankan.

**Kata kunci:** industri perbankan, konsentrasi, pendekatan struktural, pengaturan dan pengawasan bank

*Analysis of Banking Industry Concentration Degree in Indonesia during 2001-2013*

**Ika Nurjannah**

*Department of Economics and Development Study, Faculty of Economics,  
University of Jember*

## **ABSTRACT**

The banking industry has developed rapidly in recent decades as a result of deregulation, globalization and advances in technology. The financial crisis 1997/1998 until implementation of API in 2004 played a main role on reducing the number of banks in Indonesia, which is accompanied by important issues related to the impact of the reduced banks on the banking industry concentration degree. This study aims to measure the banking industry concentration degree use a structural approach that consists of CRk, HHI and Gini Coefficient referring to the SCP paradigm to total assets, deposits and loans all over the conventional banks in Indonesia during 2001-2013, and identify linkages between banking regulation and supervision with the banking industry behavior and performance using descriptive methods. The result shows that reduction in the number of banks was followed by a decline in the degree of market concentration in assets and deposits, but increase in the credit markets. In general, the level of concentration of Indonesian banking industry is secondary concentration which is identical to oligopoly market and the spectrum 1 in accordance with the KPPU, with the highest concentration in the deposits market and the lowest in the credit markets. Inequality between market share of large and small banks still very high during the observation. Moreover, the existence of regulation and supervision that is too tight can increase risk-taking behavior of banks and inefficiency of the banking industry.

**Keywords:** *banking industry, concentration, structural approach, banking regulation and supervision*

## RINGKASAN

**Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013;** Ika Nurjannah, 110810101184; 2015; 96 halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Reformasi sektor keuangan yang ditandai dengan deregulasi perbankan tahun 1980an, kemajuan di bidang teknologi informasi dan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara memberikan sumbangsih cukup besar dalam mendorong perkembangan industri perbankan beberapa dekade terakhir. Krisis 1997/1998 serta serangkaian merger dan konsolidasi selama implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) telah berkontribusi besar mengurangi jumlah bank di Indonesia. Berkurangnya jumlah bank tersebut memunculkan pertanyaan penting apakah jumlah bank yang lebih sedikit telah menurunkan atau sebaliknya meningkatkan konsentrasi industri perbankan di Indonesia. Selain itu, terdapat dua teori konsentrasi yang saling bertentangan dimana *pro-concentration theory* meyakini bahwa semakin terkonsentrasi suatu pasar dapat meningkatkan stabilitas industri perbankan, namun sebaliknya *cons-concentration theory* menyebutkan bahwa industri perbankan yang semakin terkonsentrasi justru semakin rentan terhadap krisis.

Berbeda dengan industri lainnya, industri perbankan merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan berlandaskan kepercayaan, serta mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal perbankan sehingga memerlukan perhatian khusus karena dianggap rentan terhadap krisis, Peran vital yang dimiliki dalam tatanan perekonomian makro, beberapa kasus *moral hazard* yang terjadi serta besarnya kerugian yang akan ditanggung perekonomian akibat terganggunya fungsi industri perbankan semakin memperkuat alasan diperlukannya pengaturan dan pengawasan bank.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia dan mengidentifikasi keterkaitan antara pengaturan dan

pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja industri perbankan. Pengukuran derajat konsentrasi dilakukan menggunakan analisis eklektik melalui pendekatan struktural yang meliputi perhitungan *k bank concentration ratio* (CR<sub>k</sub>), *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) dan Koefisien Gini yang mengacu pada paradigma SCP terhadap total aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit Bank Umum Konvensional selama periode 2001-2013. Sedangkan keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja industri perbankan disajikan secara deskriptif.

Hasil perhitungan indeks konsentrasi menunjukkan bahwa berkurangnya jumlah bank disertai dengan turunnya derajat konsentrasi di pasar aset dan DPK, sebaliknya konsentrasi di pasar kredit justru meningkat, dimana tingkat konsentrasi tertinggi masih dimiliki oleh pasar DPK, sedangkan tingkat konsentrasi terendah berada di pasar kredit. Nilai CR yang secara keseluruhan berada di bawah 80 persen menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia tergolong pada *secondary concentration* yang identik dengan struktur pasar oligopoli. HHI yang bernilai kurang dari 1.800 menunjukkan bahwa konsentrasi industri perbankan Indonesia masih berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) sehingga upaya merger dan konsolidasi masih bisa digalakkan. Dari segi ketimpangan, nilai koefisien gini yang berada pada kisaran 76,9 persen hingga 85,2 persen menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pada industri perbankan Indonesia masih tergolong ketimpangan berat.

Keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank terhadap perilaku dan kinerja industri perbankan tercermin melalui kemampuan pengaturan dan pengawasan bank dalam mempengaruhi tingkat inovasi dan kemampuan bank dalam manajemen risiko. Eksistensi lembaga pengawas yang terlalu kuat, serta pengaturan dan pengawasan yang terlalu ketat dapat memicu terjadinya peningkatan *risk taking behavior* dan inefisiensi pada industri perbankan. Namun, mengingat bahwa industri perbankan di Indonesia masih menghadapi risiko kredit, likuiditas dan risiko operasional yang sangat tinggi, maka pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan bank terutama yang mengandung risiko tinggi perlu ditingkatkan.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, serta sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Sarwedi, MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dalam menyusun skripsi ini;
2. Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember yang telah berkenan memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. M. Fathorrazi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Bapak Adhitya Wardhono, SE., M.Sc., Ph.D terima kasih tiada tara penulis sampaikan atas semua ilmu pengetahuan, inspirasi, motivasi, arahan dan pembelajaran hidup yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan sebagai mahasiswa, serta kesempatan luar biasa untuk melihat sisi lain dunia dan berprestasi di tingkat internasional.
5. Ibu Ciplis Gema Qori'ah, SE., M.Sc terimakasih atas segala ilmu pengetahuan, inspirasi, dan dukungan tiada henti yang telah dengan ikhlas diberikan kepada

penulis selama menjadi mahasiswa, serta semua nasihat yang selalu memotivasi penulis untuk tetap teguh dan ikhlas berjuang mewujudkan cita-cita;

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi;
7. Orang tuaku tercinta, Ibunda Saudah dan Susilowati, serta Ayahanda Mahki dan Nasir yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa dan dukungan baik secara moral maupun material dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran, serta setiap pengorbanan tak terhingga yang telah diberikan sepanjang hidup penulis;
8. Kakak-kakakku Jamal dan Agus, serta adikku Komariah, terima kasih atas motivasi, pengorbanan dan dukungan, serta kesediaannya untuk menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan keluh kesah penulis selama ini;
9. Sahabat-sahabatku di konsentrasi ekonomi moneter angkatan 2011, terima kasih atas segala kenangan indah, canda tawa, perjuangan dan rintangan yang telah kita lalui bersama selama menjadi mahasiswa;
10. Kakak-kakak angkatan di konsentrasi ekonomi moneter, terima kasih atas bantuan dan dukungannya dalam segala hal;
11. Teman-teman jurusan IESP angkatan 2011, terima kasih karena telah menjadi *partner* belajar yang baik selama penulis menjalani kehidupan sebagai mahasiswa;
12. Temang-teman PSM FE UNEJ dan KSPE, terimakasih atas segala pengalaman keorganisasian, kepercayaan dan rasa kekeluargaan yang terjalin selama ini;
13. Teman-teman kosan Jawa 4D No.1, terima kasih atas segala dukungan, canda tawa, kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang terjalin selama ini; dan
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Laksana tiada gading yang tak retak, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 15 April 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>PRAKATA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>1.4 Manfaat penelitian</b> .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	10
2.1.1 Teori Konsentrasi Perbankan .....	10
2.1.2 Paradigma Structure-Conduct-Performance.....	12
2.1.2.1 Paradigma SCP Tradisional.....	12
2.1.2.2 Paradigma <i>Chicago School</i> .....	14

2.1.2.3 Paradigma <i>The New Industrial Economics</i> .....	15
2.1.2.4 Paradigma SCP Modern .....	15
2.1.3 Teori Struktur Pasar Industri Perbankan .....	18
2.1.4 Pengukuran Derajat Konsentrasi Perbankan .....	20
2.1.5 Pengaturan dan Pengawasan Bank yang Efektif .....	24
<b>2.2 Penelitian Sebelumnya</b> .....	25
<b>2.3 Kerangka Konseptual</b> .....	31
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	34
<b>3.1 Jenis dan Sumber Data</b> .....	34
<b>3.2 Metode Analisis Data</b> .....	35
3.2.1 Analisis Eklektik.....	35
3.2.2 Analisis Deskriptif Naratif .....	38
<b>3.3 Definisi Variabel Operasional</b> .....	38
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
<b>4.1 Konfigurasi Perkembangan Industri Perbankan di Indonesia</b> .....	40
4.1.1 Dinamika Perubahan Struktural Industri Perbankan.....	41
4.1.2 Kebijakan Konsolidasi Perbankan dan API.....	43
4.1.3 Perkembangan Karakteristik dan Indikator Kinerja Industri Perbankan .....	45
<b>4.2 Analisis Eklektik Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia</b> .....	49
4.2.1 Hasil Perhitungan <i>k-bank Concentration Ratio</i> .....	50
4.2.2 Hasil Perhitungan Herfindahl-Hirschman Index.....	56
4.2.3 Bentuk Kurva Lorenz dan Hasil Perhitungan Koefisien Gini .....	59
<b>4.3 Preskripsi Keterkaitan antara Pengaturan dan Pengawasan Bank dengan Perilaku dan Kinerja Industri Perbankan di Indonesia</b> .....	62

4.3.1	Sistem Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia.....	63
4.3.2	Sistem Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	69
4.3.3	Dampak Pengaturan dan Pengawasan terhadap Perilaku dan Kinerja Perbankan.....	74
<b>4.4</b>	<b>Pembahasan.....</b>	<b>81</b>
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>88</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>88</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR BACAAN</b>	<b>.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>97</b>

**DAFTAR TABEL**

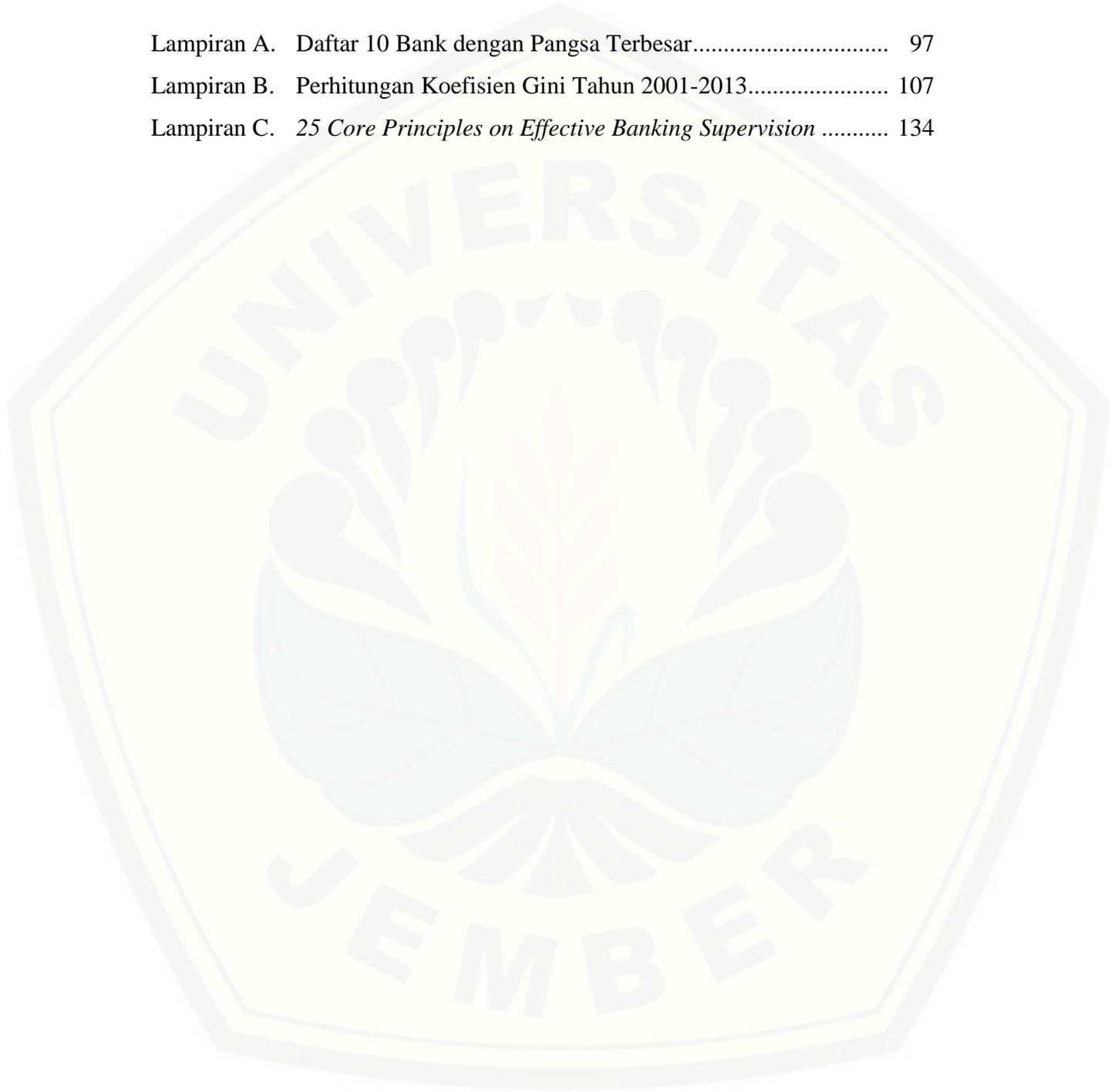
Tabel 2.1	Ringkasan penelitian sebelumnya .....	29
Tabel 4.1	Sasaran Arsitektur Perbankan Indonesia (API).....	43
Tabel 4.2	Daftar merger dan akuisisi selama periode 2004-2013 .....	44
Tabel 4.3	Proporsi rata-rata pangsa pasar bank di Indonesia .....	55
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan HHI tahun 2001-2013.....	56
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Indeks Gini tahun 2001-2013 .....	59
Tabel 4.6	Perbandingan sistem pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia dan OJK .....	72
Tabel 4.7	Perkembangan jumlah bank berdasarkan modal inti.....	77
Tabel 4.8	Daftar bank yang ditutup dan konversi ke syariah.....	85

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Perkembangan jumlah Bank Umum di Indonesia .....	3
Gambar 2.1	Kerangka linier <i>structure conduct performance</i> .....	13
Gambar 2.2	Kerangka SCP Chicago .....	15
Gambar 2.3	Kerangka SCP industri perbankan.....	17
Gambar 2.4	Kurva Lorenz.....	23
Gambar 2.5	Kerangka Konseptual .....	33
Gambar 4.1	Penguasaan aset perbankan terhadap total aset LK .....	45
Gambar 4.2	Perkembangan total aset perbankan dalam triliun rupiah .....	46
Gambar 4.3	Perkembangan performa perbankan menghimpun DPK .....	47
Gambar 4.4	Rasio kredit bank dan sektor keuangan terhadap GDP .....	48
Gambar 4.5	Perkembangan rasio NPL dan LDR Bank Umum .....	49
Gambar 4.6	Perkembangan CR4, CR8 dan CR10 pangsa aset .....	50
Gambar 4.7	Perkembangan CR4, CR8 dan CR10 pangsa DPK .....	52
Gambar 4.8	Perkembangan CR4, CR8 dan CR10 pangsa kredit .....	53
Gambar 4.9	Perkembangan CR4, CR8 dan CR10 aset, DPK dan kredit ...	54
Gambar 4.10	Perkembangan HHI pasar aset, DPK dan kredit .....	57
Gambar 4.11	Perkembangan HHI berdasarkan kategori ukuran bank .....	58
Gambar 4.12	Kurva Lorenz Aset Periode 2001-2013.....	60
Gambar 4.13	Perkembangan Koefisien Gini aset, DPK dan kredit .....	62
Gambar 4.14	Siklus Pengawasan Risiko oleh Bank Indonesia .....	65
Gambar 4.15	Sistem Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia.....	68
Gambar 4.16	Pengalihan fungsi pengawasan sektor keuangan.....	70
Gambar 4.17	Sistem Pengawasan Perbankan oleh OJK .....	73
Gambar 4.18	Keterkaitan pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja perbankan .....	75
Gambar 4.19	Perkembangan indikator kinerja industri perbankan.....	78
Gambar 4.20	Kredit bank umum berdasarkan jenis penggunaan.....	84

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A. Daftar 10 Bank dengan Pangsa Terbesar.....	97
Lampiran B. Perhitungan Koefisien Gini Tahun 2001-2013.....	107
Lampiran C. <i>25 Core Principles on Effective Banking Supervision</i> .....	134



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

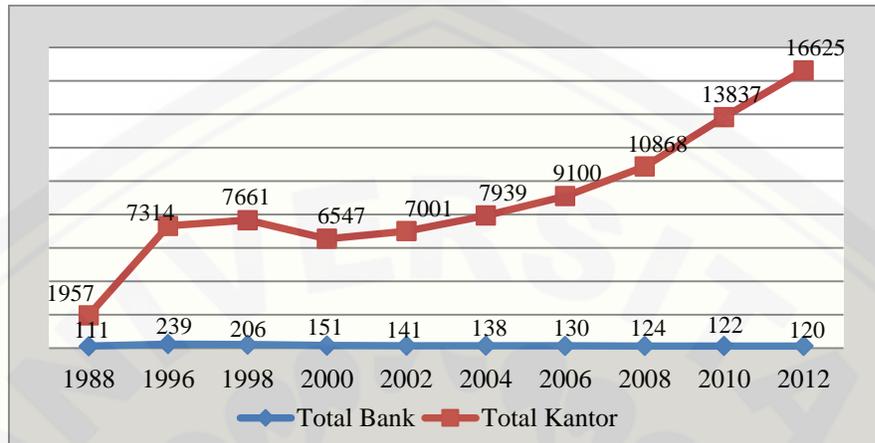
Peran yang cukup vital dalam mendorong perekonomian suatu negara, dan karakteristik yang berbeda dibandingkan industri lainnya menyebabkan industri perbankan mendapat perhatian dan perlakuan khusus di berbagai negara. Pentingnya sistem perbankan dalam pertumbuhan ekonomi telah dipaparkan oleh Bagehot (1873) dalam buku klasiknya *Lombard Street* yang menekankan bahwa industri perbankan mampu berperan secara aktif memicu inovasi dan pertumbuhan di masa depan dengan cara mengidentifikasi dan mengadakan pendanaan investasi produktif. Senada dengan hal tersebut, Keynes (1930) dalam bukunya *A Treatise on Money* juga meyakini pentingnya sektor perbankan dalam pertumbuhan ekonomi dengan mengibaratkan kredit bank sebagai “trotoar” sepanjang perjalanan produksi, dan para bankir bertugas memberikan “fasilitas transportasi” sejauh yang diperlukan agar kekuatan produktif masyarakat dapat digunakan pada kapasitas penuh (Arestis dan Sawyer, 2006:346)

Industri perbankan merupakan salah satu industri yang berkembang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai hasil dari deregulasi sektor keuangan yang dilakukan di berbagai negara, globalisasi perekonomian dan kemajuan di bidang teknologi informasi (Gelos dan Roldos, 2004; Yildirim dan Philippatos, 2006; Sharma dan Bal, 2010). Beragam tantangan baru yang semakin kompleks dan persaingan yang semakin ketat pada industri perbankan muncul seiring dengan semakin terintegrasinya perekonomian suatu negara dengan negara lainnya. Keterbukaan terhadap pihak asing dan munculnya bank-bank baru dalam industri perbankan turut serta memicu persaingan yang semakin ketat pada industri perbankan nasional.

Pada akhir tahun 1950an, Indonesia sempat menganut sistem perbankan tunggal yang menggabungkan semua bank umum dan bank sentral menjadi satu sebagai Bank Negara Indonesia. Namun sejarah bank tunggal di Indonesia tidak bertahan lama setelah diberlakukannya UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Seiring perkembangannya, industri perbankan Indonesia mengalami kemajuan pesat pasca deregulasi perbankan tahun 1983 yang bertujuan untuk memodernisasi perbankan, khususnya setelah deregulasi tahun 1988 (Warjiyo, 2004:158). Paket kebijakan yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 88) merupakan awal mula liberalisasi sektor perbankan Indonesia yang memberikan kemudahan dalam perizinan pendirian bank baru dan pembukaan kantor cabang oleh bank nasional maupun bank asing sehingga menyebabkan persaingan industri perbankan semakin meningkat (Mulyaningsih dan Daly, 2011; Widyastuti dan Armanto, 2013). Keterlibatan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) turut serta menginisiasi pembukaan industri jasa perbankan nasional seluas-luasnya kepada pihak asing. Liberalisasi industri perbankan ini semakin diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang mengizinkan kepemilikan asing hingga 99 persen.

Kemudahan pendirian bank dan pembukaan kantor cabang bagi investor domestik dan asing berdampak pada peningkatan jumlah bank secara signifikan dari 111 bank dengan 1.957 kantor cabang tahun 1988 menjadi 239 bank dengan 7.314 kantor pada akhir tahun 1996 yang didominasi oleh Bank Umum Swasta Nasional Devisa dan Non-Devisa (Bank Indonesia, 2005). Namun krisis perbankan tahun 1997/1998 telah mendorong pemerintah melakukan berbagai program restrukturisasi dan rekapitalisasi untuk menyelamatkan perbankan nasional. Program restrukturisasi perbankan tersebut diawali dengan keputusan bank sentral merger beberapa bank BUMN dan menutup sejumlah bank bermasalah dalam rangka meningkatkan kinerja bank menyusul *distress* yang dialami industri perbankan pasca krisis. Kebijakan likuidasi tersebut terus berlanjut dengan dikeluarkannya Arsitektur Perbankan

Indonesia (API) pada Januari 2004 yang di satu sisi berkontribusi mengurangi jumlah bank, tetapi di sisi lain meningkatkan jumlah kantor cabang bank setiap tahunnya.



Gambar 1.1 Perkembangan jumlah Bank Umum di Indonesia (Sumber: Laporan Pengawasan Perbankan, berbagai tahun)

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan *road map* pembangunan industri perbankan yang bertujuan untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran-sasaran yang ingin dicapai API tergambar melalui enam pilar yang saling terkait yaitu: (i) struktur perbankan yang sehat; (ii) sistem pengaturan yang efektif; (iii) sistem pengawasan yang independen dan efektif; (iv) industri perbankan yang kuat; (v) infrastruktur pendukung yang mencukupi; dan (vi) perlindungan nasabah (Bank Indonesia, 2004). Kusumastuti (2009) memaparkan bahwa untuk memperkuat struktur industri perbankan sebagaimana yang tertuang pada pilar ke-4 API, Bank Indonesia menawarkan tiga macam program konsolidasi yang terdiri dari konsolidasi atas dasar suka sama suka (*market driven*), kondolidasi yang ditentukan (*directives*) dan konsolidasi yang bersifat kewajiban dengan pilihan diakusisi oleh bank *anchor*, dimerger oleh kelompok bank lainnya dan kombinasi antara akuisisi dan merger.

Program konsolidasi perbankan yang dilakukan tidak dapat dipungkiri telah memberikan sumbangsih besar terhadap menurunnya jumlah bank di Indonesia (lihat Gambar 1.1). Namun muncul perdebatan baru mengenai dampak penurunan jumlah

bank akibat merger terhadap derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia. Kusumastuti (2009) berpendapat bahwa seiring dengan implementasi API, industri perbankan akan lebih terkonsentrasi sebagai hasil dari merger antar bank yang menyebabkan semakin sedikitnya jumlah bank. Semakin terkonsentrasi suatu industri berpotensi memperbesar kemungkinan terjadinya kolusi antar pelaku industri, sehingga jumlah bank yang semakin berkurang tidak selalu disertai dengan peningkatan persaingan. Di pihak lain, Gelos dan Roldos (2004) berpendapat bahwa restrukturisasi perbankan pasca krisis di kawasan Asia menyebabkan berkurangnya jumlah bank di masing-masing negara dan diikuti pula oleh turunnya derajat konsentrasi, kecuali di Malaysia. Perubahan struktural yang sebagian besar didorong oleh pemerintah menyebabkan konsolidasi tidak meningkatkan konsentrasi pasar di negara-negara Asia. Sebaliknya, konsolidasi di negara-negara maju dan pasar yang lebih matang seperti di kawasan Amerika Latin terjadi karena dorongan pasar sehingga berkurangnya jumlah bank diikuti oleh peningkatan derajat konsentrasi pasar.

Secara teoritis, terdapat dua pandangan yang saling bertentangan terkait dengan konsentrasi industri perbankan. Di satu sisi, merger dianggap dapat meningkatkan efisiensi sekaligus penguatan konsolidasi perbankan sehingga dapat menciptakan industri perbankan yang stabil. Pandangan ini dikenal sebagai teori *pro-concentration* dimana industri perbankan yang lebih terkonsentrasi dengan beberapa bank besar akan lebih stabil dan tidak rentan terhadap krisis dibandingkan dengan industri perbankan yang kurang terkonsentrasi dengan jumlah bank berukuran kecil yang banyak (Allen dan Gale, 2004). Sebaliknya, terdapat pandangan lain yang dikenal sebagai teori *concentration* yang meyakini bahwa merger akan menyebabkan industri perbankan hanya terkonsentrasi pada bank-bank tertentu sehingga memperbesar risiko dominasi pasar yang menyebabkan ketidakstabilan atau kerentanan terhadap krisis (Le, 2014).

Jumlah bank umum di Indonesia hingga saat ini masih cukup banyak, namun didominasi oleh bank-bank berukuran kecil dan sedang dengan struktur permodalan yang belum cukup kuat sehingga menyebabkan penguasaan pasar hanya terkonsentrasi dan didominasi oleh beberapa bank tertentu. Apabila dilihat dari sudut pandang

persaingan usaha, akan muncul polemik baru antara merger dan akuisisi dengan hukum persaingan usaha yang sangat mewaspadai terjadinya pemusatan konsentrasi yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Ariyanto, 2004) karena struktur pasar yang terkonsentrasi berpotensi menimbulkan berbagai perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan tujuan memaksimalkan profit (Sugiyanto dan Jumono, 2012).

Sebangun dengan pernyataan tersebut, paradigma *structure-conduct-performance* (SCP) meyakini bahwa struktur pasar (tingkat konsentrasi) berpengaruh terhadap perilaku (*conduct*) dan kinerja (*performance*) setiap bank dalam industri. Semakin terkonsentrasi suatu industri akan menghasilkan struktur pasar yang semakin mendekati monopoli (Martin, 1994:3). Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memonopoli akan berusaha menghasilkan laba yang semakin besar melalui kebijakan peningkatan harga atau penurunan jumlah output. Untuk kasus industri perbankan, laba yang diterima bank dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan, sehingga dengan demikian penyaluran kredit dapat dianggap sebagai *conduct*, dan laba perbankan sebagai *performance*. Dengan demikian konsentrasi industri perbankan akan berdampak pada kinerja bank baik sebagai lembaga intermediasi keuangan, maupun media transmisi kebijakan moneter bank sentral.

Industri perbankan dan keuangan merupakan sektor yang paling diatur dalam suatu perekonomian karena berhubungan dengan risiko sistemik dan perlindungan konsumen. Berbeda dengan industri lainnya, pengaturan dan pengawasan pada industri perbankan diperlukan karena bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan yang rentan terhadap penarikan dana besar-besaran (*bank runs*) oleh nasabah. Kerentanan tersebut dikarenakan terbatasnya aktiva likuid yang dimiliki bank sebagai akibat dari kegiatan usaha bank yang mentransfomasikan kewajiban jangka pendek berupa giro, tabungan dan deposito menjadi aktiva berjangka waktu lebih panjang seperti kredit (Simorangkir, 2011). Di samping itu dalam tatanan perekonomian makro, industri perbankan merupakan bagian penting dari sistem pembayaran dan efektifitas transmisi kebijakan moneter, berkontribusi besar dalam

pembangunan ekonomi dan rentan terhadap berbagai macam risiko (Pradiptyo, *et al*, 2010). Setiap guncangan yang terjadi pada industri perbankan akan berdampak pada penyediaan dan alokasi dana untuk kegiatan investasi dan pembiayaan sektor-sektor produktif dalam perekonomian, menghambat kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter.

Mengacu pada dampak serius yang ditimbulkan oleh ketidakstabilan industri perbankan, maka dalam beberapa dekade terakhir terutama pasca terjadinya krisis perbankan tahun 1997, kebijakan pengaturan dan pengawasan bank mendapat perhatian yang semakin besar di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kegagalan suatu bank dapat menular ke bank lainnya (*contagion effect*) dan berpotensi menyebabkan krisis perekonomian secara menyeluruh. UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diamandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1998, serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004 telah menetapkan Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas perbankan di Indonesia serta memuat berbagai hal yang menjadi pokok-pokok kebijakan pengaturan dan pengawasan bank dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang secara garis besar meliputi perizinan, pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi (Warjiyo, 2004:165).

Krisis tahun 1997/1998 tercatat sebagai krisis dengan biaya termahal di sepanjang sejarah perekonomian Indonesia. Selain memerlukan waktu yang cukup lama untuk masa pemulihan, krisis tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi minus sebesar 13 persen dan menghabiskan *bailout* sebesar 50 persen dari Pendapatan Nasional (GDP) pada saat krisis dan 15 persen pasca krisis (Pradiptyo, *et al*, 2010, 2011). Krisis tersebut juga telah menyebabkan memburuknya kinerja industri perbankan secara keseluruhan yang terlihat dari penurunan aspek-aspek keuangan bank mencakup permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas. Nilai CAR semua bank turun drastis dari 9,19 persen pada akhir tahun 1997 menjadi -15,68 persen pada akhir tahun 1998. Nilai ROA turun dari 1,37 persen pada 1997 menjadi -18,76 persen tahun 1998, dan -6,14 pada tahun 1999. Nilai LDR bank pun menurun tajam

dari 86,42 persen pada akhir tahun 1997 menjadi sebesar 72,37 persen pada akhir tahun 1998 dan 26,16 persen pada akhir tahun 1999. Kerugian yang dialami hampir seluruh bank tersebut disebabkan oleh tingginya biaya dana (*cost of fund*) yang ditanggung bank dengan suku bunga deposito satu bulan mencapai 70 persen pada September 1998 (Simorangkir, 2011).

Krisis keuangan tersebut diindikasikan terjadi akibat kelemahan dalam sistem pengawasan perbankan oleh bank sentral sehingga memunculkan gagasan pelepasan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Gagasan tersebut secara garis besar menyebutkan bahwa dibutuhkan suatu pemisahan kewenangan kebijakan perbankan makro dan mikro dimana bank sentral hanya akan berfokus menangani perbankan makro, sedangkan perbankan mikro akan diserahkan kepada suatu lembaga pengawas jasa keuangan (LPJK) (Pradiptyo, *et al*, 2011). Beberapa kasus *moral hazard* yang menimpa industri perbankan seperti kasus Lippo Bank yang mengeluarkan dua laporan triwulanan yang berbeda di akhir tahun 2002, kasus penipuan yang dialami Bank Negara Indonesia pada Oktober 2003 dengan total kerugian sebesar Rp 1,7 triliun, kasus penutupan Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic pada awal 2004 (Siregar dan Williams, 2004), hingga kasus Bank Century semakin memperkuat rencana pembentukan LPJK di Indonesia. Di samping itu, terdapat fenomena baru perpindahan kewenangan pengawasan dari bank sentral ke Financial Services Authority (FSA) di beberapa negara sebagai hasil dari krisis keuangan tahun 2008 yang kembali disinyalir terjadi akibat lemahnya pengawasan sektor keuangan dan makroprudensial oleh bank sentral (Pradiptyo, *et al*, 2011; Čihák *et al*, 2012)

Dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah menandai masuknya babak baru pengaturan dan pengawasan industri perbankan dan sektor jasa keuangan di Indonesia. Undang-undang tersebut melahirkan suatu lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan sektor jasa keuangan secara keseluruhan termasuk industri perbankan (Lestari, 2012). Dengan beroperasinya

OJK secara penuh pada 1 Januari 2014 maka secara resmi fungsi pengaturan dan pengawasan industri perbankan telah berpindah dari Bank Indonesia ke OJK.

## 1.2 Rumusan Masalah

Serangkaian merger dan konsolidasi dalam implementasi API berkontribusi mengurangi jumlah bank di Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat mengenai dampak yang ditimbulkan oleh merger dan konsolidasi terhadap derajat konsentrasi industri perbankan. Di satu sisi, merger dan konsolidasi dianggap dapat meningkatkan konsentrasi pasar dan kestabilan industri perbankan sebagaimana yang diyakini oleh teori *pro-concentration*, namun disisi lain teori *cons-concentration* meyakini bahwa pasar yang terkonsentrasi pada bank-bank besar justru akan lebih rentan terhadap krisis. Hal ini memunculkan isu penting antara lain apakah jumlah bank yang lebih sedikit telah menurunkan atau sebaliknya meningkatkan konsentrasi industri perbankan di Indonesia. Selain itu, melihat bahwa bank merupakan lembaga usaha berbasis kepercayaan dan rentan terhadap bermacam risiko dan krisis, maka pengaturan dan pengawasan bank menjadi suatu keharusan untuk dilakukan. Beberapa kasus moral hazard dan fenomena baru di bidang pengaturan dan pengawasan bank juga menarik untuk dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diusung dalam penelitian ini adalah:

1. seberapa besar derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia?
2. bagaimana keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja industri perbankan di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berkaca pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. untuk mengukur derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia.

2. untuk mengidentifikasi keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank terhadap perilaku dan kinerja industri perbankan di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

1. bagi Otoritas Pengawas dan Institusi Pemerintahan  
memberikan informasi mengenai derajat konsentrasi dan kondisi persaingan yang tercermin melalui perilaku dan kinerja industri perbankan sebagai bahan masukan dalam menetapkan peraturan serta pengawasan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini;
2. bagi Industri Perbankan  
memberikan gambaran kondisi persaingan yang tercermin melalui konsentrasi, perilaku dan kinerja industri perbankan secara menyeluruh sebagai bahan masukan dalam pengambilan setiap keputusan terkait kegiatan operasional bank.
3. bagi Lembaga Akademis  
menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan perbankan terutama berkaitan dengan derajat konsentrasi, pengaturan dan pengawasan bank, serta persaingan perbankan bagi penelitian selanjutnya maupun masyarakat pada umumnya.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Konsentrasi Perbankan

Konsentrasi mengacu pada tingkat penguasaan firm-firm besar terhadap aktivitas perekonomian. Peningkatan derajat konsentrasi dapat terjadi karena pembesaran ukuran firm-firm dominan dan/atau penyusutan ukuran firm-firm bukan dominan. Sebaliknya penurunan derajat konsentrasi disebabkan oleh pembesaran ukuran firm-firm bukan dominan dan/atau penyusutan ukuran firm-firm dominan dalam perekonomian (Tushaj, 2010; Sharma and Bal, 2010). Keterkaitan antara derajat konsentrasi dan tingkat persaingan industri perbankan telah menjadi perdebatan yang menarik selama beberapa dekade terakhir. Berbagai penelitian mengenai konsentrasi perbankan telah dilakukan hingga melahirkan teori konsentrasi yang dikenal sebagai Teori Pro-Konsentrasi (*Pro-Concentration Theory*) dan Teori Kontra-Konsentrasi (*Cons-Concentration Theory*).

Para pendukung teori *pro-concentration* berpendapat bahwa peningkatan konsentrasi melalui merger dan akuisisi bank dapat menciptakan skala ekonomis (*economic of scale*) bagi industri perbankan, yang berarti bahwa dengan meningkatkan konsentrasi sama halnya dengan meningkatkan efisiensi (Demirgüç-Kunt dan Levine, 2000). Beberapa argumen teoritis dan studi empiris di beberapa negara menunjukkan bahwa industri perbankan yang kurang terkonsentrasi dengan bank-bank kecil yang berjumlah dominan akan lebih rentan terhadap krisis dibandingkan dengan industri perbankan yang lebih terkonsentrasi dengan beberapa bank besar. Hal ini dikarenakan penurunan derajat konsentrasi akan meningkatkan persaingan pada industri perbankan dimana peningkatan persaingan tersebut dapat menciptakan risiko yang semakin besar bagi industri perbankan (Sharma dan Bal, 2010).

*Franchise value hypothesis* merupakan salah satu paradigma yang menganalisis hubungan antara persaingan bank dengan perilaku pengambilan risiko yang berlebihan

(*excessive risk taking*) oleh bank. *Franchise value* merupakan salah satu penentu keputusan pengambilan risiko yang dilakukan bank dimana untuk mempertahankan nilai *franchise value* tersebut bank akan berusaha menghindari pengambilan risiko yang berlebihan. Namun, ketika persaingan yang terjadi semakin ketat yang berdampak pada penurunan *profit margin* dan *franchise value* bank, maka bank akan cenderung mengurangi perilaku kehati-hatian yang dimiliki dan lebih memilih melakukan langkah-langkah berisiko tinggi untuk mempertahankan keuntungannya. Bank akan cenderung mengalokasikan dana yang dimiliki kepada aset-aset dan kredit berisiko tinggi namun memberikan *profit margin* yang tinggi pula sehingga berpotensi meningkatkan rasio NPL yang lebih tinggi dan mengarah kepada ketidakstabilan industri perbankan (Le, 2014).

Para pendukung pandangan “*concentration-stability*” ini berpendapat bahwa bank yang besar dapat menciptakan diversifikasi usaha dengan lebih baik sehingga sistem perbankan dengan sedikit bank besar akan lebih tahan guncangan daripada sistem dengan bank-bank kecil. Selain itu sistem perbankan yang terkonsentrasi dapat menciptakan laba yang lebih besar sehingga tidak mudah terguncang. Laba yang tinggi dapat menjadi “*buffer*” untuk menahan guncangan variabel ekonomi makro dan mengurangi insentif bagi pemilik bank untuk mengambil resiko yang berlebihan. Lebih jauh lagi, dengan sedikit bank besar akan semakin mempermudah pengaturan dan pengawasan oleh bank sentral atau otoritas terkait dan karenanya akan lebih mampu menciptakan stabilitas perbankan (Allen dan Gale, 2004).

Sebaliknya teori *cons-concentration* berpendapat struktur perbankan yang lebih terkonsentrasi justru akan membuat industri perbankan menjadi lebih lemah dan lebih rentan terhadap krisis. Pandangan ini pada prinsipnya dibangun dari paradigma pengalihan risiko (*risk shifting paradigm*) yang menganalisis dampak dari persaingan terhadap dorongan *moral hazard* dan *adverse selection* dari para nasabah bank (Le, 2014). Para pendukung pandangan “*concentration-fragility*” ini beralasan bahwa peningkatan konsentrasi akan menghasilkan masalah *too-big-to-fail* pada industri perbankan. Kekhawatiran para pemangku kebijakan terhadap dampak sistemik yang

ditimbulkan atas kegagalan atau penutupan bank besar dapat mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap bank-bank besar yang pada gilirannya akan memperburuk masalah *moral hazard*. Hal tersebut dikarenakan semakin besar subsidi untuk bank besar dapat meningkatkan pengambilan resiko bagi bank sehingga menciptakan ketidakstabilan perbankan (Mishkin, 1999). Selain itu bank besar yang memiliki cakupan kegiatan lebih kompleks akan mempersulit pengaturan dan pengawasan dengan konsekuensi ketidakstabilan sistem perbankan. Jika bank besar mempunyai *market power* yang lebih besar dari bank yang lebih kecil, bank besar akan dapat mengenakan bunga yang lebih tinggi kepada konsumen, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kredit macet (Berger *et al*, 2008).

### **2.1.2 Paradigma Structure-Conduct-Performance (SCP)**

*Structure-Conduct-Performance (SCP) Paradigm* merupakan paradigma yang mempelajari hubungan antara struktur pasar dan kinerja pasar. Paradigma SCP pertama kali diperkenalkan oleh Edward Mason dan Joe S. Bain pada tahun 1940-an yang meyakini bahwa kinerja pasar merupakan hasil dari struktur pasar tertentu, yang tergantung pada kondisi sisi permintaan dan penawaran (Bikker dan Haaf, 2002b). Pemikiran mengenai hubungan antara struktur, perilaku dan kinerja terus mengalami perkembangan seiring dengan munculnya berbagai kritik mengenai teori dasar SCP sehingga melahirkan beberapa paradigma baru yaitu: (1) SCP Tradisional; (2) Chicago School; (3) The New Industrial Economics; dan (4) SCP Modern.

#### **2.1.2.1 Paradigma SCP Tradisional**

Paradigma SCP Tradisional menjelaskan bahwa suatu pasar dengan derajat konsentrasi yang tinggi disebabkan oleh perilaku kolusif yang dilakukan oleh bank-bank berukuran besar sehingga menghasilkan kinerja pasar yang superior (Tushaj, 2010; Arrawatia dan Misra, 2012). Hubungan antara struktur perilaku dan kinerja dalam paradigma tradisional secara sederhana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka linier *structure-conduct-performance* (Martin, 1994:3)

Paradigma ini berdasarkan pada asumsi terdapat hubungan satu arah antara struktur, perilaku dan kinerja (Mulyaningsih dan Daly, 2011; Lubis, 2012) dimana struktur mempengaruhi perilaku (konsentrasi yang lebih rendah akan menghasilkan perilaku firm-firm yang lebih kompetitif); perilaku mempengaruhi kinerja (perilaku firm yang lebih kompetitif menghasilkan kekuatan pasar yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih besar) dan dengan demikian struktur akan mempengaruhi kinerja (konsentrasi yang lebih rendah menghasilkan kekuatan pasar yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih besar) (Le, 2014). Struktur pasar dalam pandangan tradisional terbentuk dari beberapa elemen. Martin (1994:3-7) menyebutkan bahwa unsur-unsur utama yang mempengaruhi struktur pasar terdiri atas: (i) jumlah dan distribusi ukuran penjual; (ii) jumlah dan distribusi ukuran pembeli; (iii) diferensiasi produk; dan (iv) hambatan untuk masuk (*entry condition*).

Jumlah dan distribusi ukuran penjual dan pembeli akan mempengaruhi kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) atau kemampuan penjual dan pembeli untuk mempengaruhi harga pasar. Dari sisi produk, semakin tinggi diferensiasi, maka produk-produk dari penjual yang berbeda tidak akan mampu untuk saling menggantikan satu sama lain atau bukan pengganti yang sempurna (*poorer substitute*) dan setiap produsen akan semakin mendekati monopoli. Dalam mempengaruhi struktur pasar, *entry condition* berfokus pada berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan suatu firm untuk memasuki pasar seperti tingkat produksi dan efisiensi, besarnya investasi yang dibutuhkan ketika perusahaan mulai beroperasi, strategi meraih keuntungan, dan sebagainya. *Entry condition* akan menentukan sifat persaingan potensial antara firm dalam pasar dengan firm yang berpotensi memasuki pasar.

Perilaku mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam industri dan merupakan konsekuensi dari bentuk dan struktur pasar (Arrawatia dan

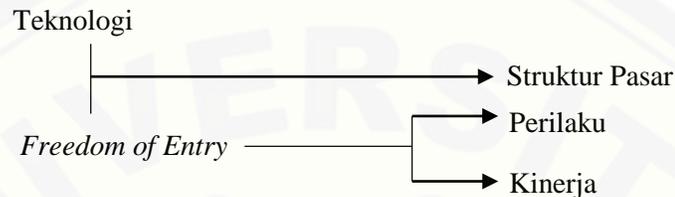
Misra, 2012). Dalam hal ini yang termasuk perilaku perusahaan diantaranya diferensiasi produk dan desain produk, kebijakan penentuan harga, aktivitas iklan dan promosi penjualan, serta kemungkinan melakukan strategi kolusi antar perusahaan dalam industri baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Hasil dari hubungan antara struktur dan perilaku adalah kinerja. Struktur dan perilaku tertentu dari suatu perusahaan akan menghasilkan kinerja tertentu yang tercermin pada tingkat keuntungan (*profitability*), efisiensi dan kemajuan (*progressive*) yang dapat dicapai perusahaan dalam industri perbankan.

Paradigma SCP tradisional menempatkan struktur pasar (konsentrasi pasar) sebagai variabel eksogen yang menentukan kinerja (profitabilitas) pasar (Arrawatia dan Misra, 2012). Aliran ini berpendapat bahwa kekuatan pasar yang besar (monopoli) akan muncul sebagai akibat dari kepemilikan aset yang tidak seimbang sehingga intervensi atau campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Konsentrasi yang tinggi dalam suatu industri akan mendorong terciptanya kolusi yang tinggi sehingga struktur pasar akan mendekati monopoli dan harga akan mendekati harga monopoli yang tinggi atau relatif lebih tinggi dari pasar yang berada pada kondisi persaingan.

#### 2.1.2.2 Paradigma *Chicago School*

Paradigma *Chicago School* lebih menekankan kepada kinerja sebuah industri dimana kinerja industri akan mempengaruhi struktur pasar dan perilaku suatu pasar. Perbedaan lain dari aliran ini dengan SCP tradisional terletak pada pentingnya peran pemerintah dalam industri. SCP tradisional menganggap bahwa peran pemerintah sangat penting untuk mencegah terjadinya monopoli dalam pasar, sebaliknya menurut pandangan *Chicago School*, monopoli dalam pasar dapat terjadi karena adanya campur tangan pemerintah dalam pasar. Oleh karena itu hal yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan membiarkan pasar bekerja sesuai dengan mekanismenya tanpa campur tangan pemerintah. Paradigma *Chicago School* juga berpendapat bahwa monopoli mungkin terjadi, namun karena pasar memiliki sifat yang tidak permanen maka

monopoli yang terjadi tanpa campur tangan pemerintah tidak akan bertahan lama atau hanya bersifat sementara (Martin, 1994:8-10). Selain itu, paradigma Chicago School juga menekankan peran teknologi dalam menentukan struktur pasar, sehingga hubungan antara struktur pasar, perilaku dan kinerja tergambar sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka SCP Chicago (Martin, 1994: 10)

#### 2.1.2.3 Paradigma *The New Industrial Economics*

Paradigma ini menggunakan kerangka pemikiran yang sama dengan paradigma SCP Tradisional yaitu menggunakan analisis model pasar persaingan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara pandangan *The New Industrial Economics* (NIE) dan SCP Tradisional yaitu NIE menganggap bahwa perilaku perusahaan merupakan elemen utama yang mempengaruhi struktur dan kinerja suatu pasar. Perilaku pasar diasumsikan *given* dan berguna untuk menentukan ketidaksempurnaan dalam suatu struktur pasar. Kekuatan pasar yang diperoleh bukan hanya disebabkan oleh struktur pasar, melainkan karena adanya faktor-faktor lain seperti interaksi strategis antar perusahaan dan campur tangan pemerintah (Martin, 1994:11-12).

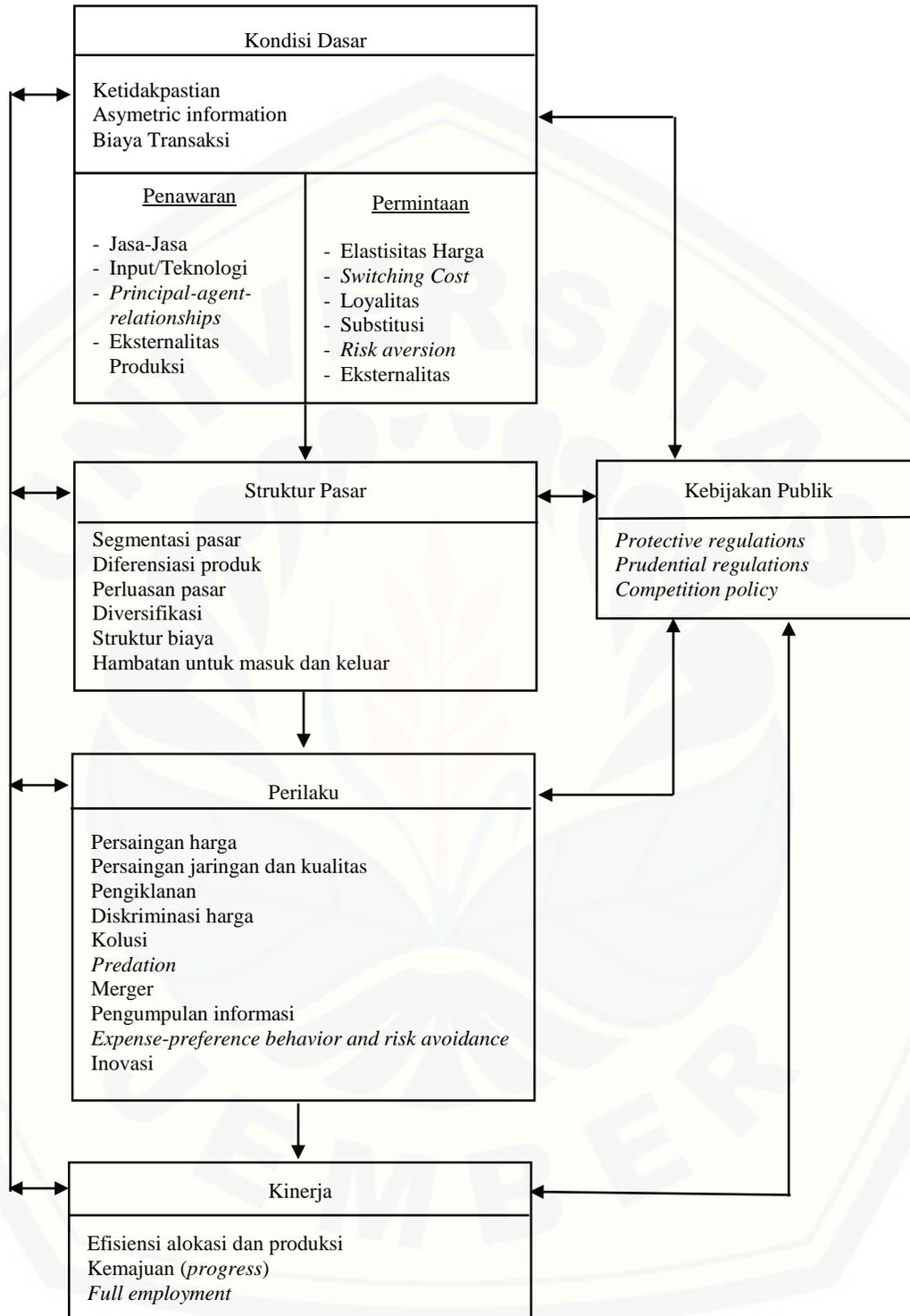
#### 2.1.2.4 Paradigma SCP Modern

Paradigma SCP modern merupakan bentuk perkembangan dari aliran SCP yang sudah ada. Paradigma SCP Boumol (1982) tetap mempertahankan hubungan asli antara struktur pasar, perilaku dan kinerja, namun dalam hal ini lebih menekankan pentingnya *contestable* dalam pasar. Kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar merupakan karakteristik utama yang dimiliki oleh *contestable market* (Mulyaningsih dan Daly, 2011). Pasar *contestable* merupakan bentuk pasar dimana biaya untuk pendatang baru sama dengan biaya untuk perusahaan yang sudah ada serta tidak terdapat *sunk cost*

dalam pasar tersebut (Martin, 1994:75). Hal ini akan menjadi hambatan alami bagi perusahaan untuk masuk dan keluar pasar sehingga tidak akan terjadi monopoli dan kinerja pasar akan lebih baik dan harga yang tercipta akan lebih kompetitif sebab perusahaan yang tidak efisien akan keluar dan digantikan dengan yang lebih efisien.

Demsetz (1973) dan Peltzman (1977) mengembangkan pandangan yang dikenal sebagai hipotesis efisiensi (*efficiency hypothesis*). Ide pokok dari pandangan ini adalah sumber dari konsentrasi adalah efisiensi dan bukan kekuatan pasar (Mulyaningsih dan Daly, 2011). Suatu industri dapat lebih terkonsentrasi dibawah kondisi persaingan apabila beberapa firm melakukan ekspansi output. Beberapa ekspansi yang dilakukan akan meningkatkan derajat konsentrasi dan keuntungan yang diperoleh firm (Nguyen dan Stewart, 2010). Pandangan ini juga meyakini bahwa tidak ada hubungan langsung antara konsentrasi pasar dengan kompetisi (Le, 2014). Jika suatu bank memperoleh derajat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank lainnya dalam pasar misalnya dikarenakan struktur biaya yang lebih efektif, maka perilaku maksimisasi keuntungan dapat dilakukan dengan menurunkan harga. Struktur pasar yang ada dipengaruhi oleh kinerja bank, dengan demikian konsentrasi merupakan hasil dari efisiensi superior dari bank-bank pemimpin (Bikker dan Haaf, 2002b).

Terlepas dari perkembangan paradigma SCP yang telah ada, untuk kasus industri perbankan yang memiliki karakteristiknya berbeda dibandingkan dengan industri lainnya, maka Doris (1997) melakukan pembaharuan terhadap kerangka SCP khusus bagi industri perbankan. Penggunaan paradigma SCP dalam menganalisis struktur pasar industri perbankan dilakukan dengan memasukkan ketidaksempurnaan pasar kedalam kondisi dasar (*basic condisition*). Informasi asimetris antara *borrowers* dan *lenders* serta biaya informasi dapat mempengaruhi kegiatan, struktur dan kinerja bank. Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan industri perbankan yaitu peraturan perlindungan (*protective*) dan kehati-hatian (*prudential*) dianggap sebagai bentuk reaksi atas kegagalan pasar pada industri perbankan. Kerangka SCP perbankan yang ditawarkan oleh Doris (1997) tergambar sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka SCP industri perbankan (Doris, 1997)

### 2.1.3 Teori Struktur Pasar Industri Perbankan

Pengukuran konsentrasi industri dilakukan untuk menganalisis struktur pasar dimana industri tersebut berada (Tushaj, 2010). Teori umum struktur pasar mengklasifikasikan struktur pasar menjadi beberapa jenis, mengacu pada dua bentuk ekstrim struktur pasar yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) adalah sebuah pasar dimana perekonomian bekerja tanpa gangguan atau sesuai dengan mekanisme pasar. Kondisi yang harus terpenuhi agar suatu pasar dapat dikatakan bersaing sempurna adalah: (i) terdapat firm dalam jumlah yang banyak; (ii) setiap pembeli dan penjual tidak dapat mempengaruhi harga (*price taker*); (iii) tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar; (iv) setiap firm memproduksi output yang identik (*homogenius product*); (v) terdapat informasi yang sempurna tentang pasar bagi firm dan konsumen; dan (vi) firm penjual adalah firm yang berorientasi pada maksimisasi profit (Colander, 2004:242).

Monopoli adalah suatu industri yang hanya terdiri dari satu perusahaan yang memproduksi produk yang tidak memiliki substitusi dekat dan memiliki hambatan yang signifikan untuk mencegah perusahaan baru memasuki industri, sehingga mencegah terjadinya persaingan (Case dan Fair, 2007:308). Hambatan tersebut dapat berupa hambatan legal seperti pemberian hak paten pada suatu firm yang dapat mencegah firm lainnya untuk masuk, hambatan sosiologi dimana keputusan untuk masuk dipengaruhi oleh faktor kebiasaan dan tradisi, hambatan alami dimana firm memiliki kemampuan unik untuk memproduksi sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh firm lainnya, atau hambatan teknologi dimana ukuran pasar hanya dapat mendukung satu firm (Colander, 2004:264).

Industri perbankan merupakan industri yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan industri lainnya. Oleh karenanya struktur pasar industri perbankan tidak ada yang benar-benar bersaing sempurna maupun monopoli murni. Hal tersebut dikarenakan dalam situasi persaingan murni bank baru terancam bangkrut dan keruntuhan sebuah bank dapat menular ke bank-bank lainnya (*contagion effect*) dan pada akhirnya hal ini akan membahayakan perekonomian secara makro (Widyastuti

dan Armanto, 2013). Sejumlah penelitian baru yang dilakukan untuk menganalisis struktur industri perbankan menyatakan bahwa sebagian besar industri perbankan suatu negara berada pada struktur pasar persaingan monopolistik (Malik, 2008; Macit, 2012; Sugiyanto dan Jumono, 2012).

Suatu pasar dapat dikatakan berada dalam kondisi persaingan monopolistik apabila memiliki karakteristik: (i) terdapat banyak penjual; (ii) adanya diferensiasi produk; (iii) dimensi kompetisi yang bervariasi; dan (iv) adanya kemudahan untuk memasuki pasar bagi firm baru dalam jangka panjang (Colander, 2004:288). Senada dengan hal tersebut, Case dan Fair (2007:354) berpendapat bahwa persaingan monopolistik dicirikan dengan sejumlah besar perusahaan dalam industri, namun ukuran perusahaan tidak menentukan kemampuan perusahaan tersebut dalam menentukan harga. Tingkat kekuatan pasar dicapai oleh perusahaan dengan memproduksi produk yang berbeda, serta perusahaan baru bisa masuk dan perusahaan mapan bisa keluar dari industri ini dengan mudah.

Jumlah penjual yang banyak menunjukkan sisi persaingan pada pasar monopolistik, namun adanya produk yang terdeferensiasi (produk tidak bersifat homogen) merupakan pembeda antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopolistik. Persaingan di pasar monopolistik bisa dalam berbagai bentuk atau dimensi. Jika pada pasar persaingan sempurna, harga merupakan dimensi persaingan satu-satunya, namun pada pasar monopolistik persaingan dapat berbentuk produk yang terdeferensiasi, iklan, pelayanan dan bahkan tempat penjualan (*distribution outlet*). Selain itu, selama masih terdapat keuntungan ekonomi yang ditawarkan oleh pasar, maka sepanjang itu pula akan ada firm yang memasuki pasar (Colander, 2004:289-290)

Karakteristik yang dimiliki oleh struktur pasar monopolistik cukup mewakili karakteristik sebagian besar industri perbankan di setiap negara, dimana persaingan antar bank dalam memperoleh pendapatan yang tinggi meliputi persaingan harga dan non-harga. Widyastuti dan Armanto (2013) menyatakan bahwa persaingan harga dalam industri perbankan dapat berupa penetapan suku bunga terhadap sumber daya produktif seperti deposito, tabungan, dan penyaluran kredit yang merupakan sumber

pendapatan bank, sedangkan persaingan non-harga antar bank bisa berbentuk pemberian hadiah dan berbagai promosi menarik untuk memperoleh nasabah sebanyak-banyaknya, penyediaan dan pengembangan variasi produk yang berbeda, dan pemberian layanan baru yang didukung oleh perkembangan teknologi yang mampu menekan biaya produksi dan distribusi.

Untuk beberapa kasus tertentu terutama pada industri perbankan yang telah maju dan mapan, munculnya dominasi pangsa pasar oleh beberapa bank besar menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Adanya sejumlah bank besar yang menguasai pasar industri perbankan erat kaitannya dengan karakteristik struktur pasar oligopoli. Oligopoli diartikan sebagai suatu industri yang terkonsentrasi dengan beberapa perusahaan dominan (Case dan Fair, 2007: 364). Terdapat sifat ketergantungan (*interdependent*) diantara perusahaan yang bergerak di pasar oligopoli. Perusahaan yang berada pada pasar oligopoli harus mempertimbangkan dampak dari setiap kebijakan yang diambil terhadap perusahaan saingannya. Perubahan atas setiap penetapan harga atau output oleh suatu perusahaan tidak hanya akan berdampak pada penjualan dan keuntungan perusahaannya saja, melainkan dapat berdampak pula terhadap penjualan dan keuntungan pesaingnya, begitupula sebaliknya. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada pasar oligopoli akan cepat diantisipasi dan ditanggapi oleh perusahaan lainnya tergantung pada kelengkapan dan kecepatan informasi yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut (Lubis, 2012).

#### **2.1.4 Pengukuran Derajat Konsentrasi Perbankan**

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi dan persaingan dalam industri perbankan yaitu pendekatan struktural dengan paradigma *Structure-Conduct-Performance* (SCP) yang terkenal dengan metode Herfindahl-Hirschman Index (HHI), dan pendekatan non-struktural yang terdiri dari tiga model pendekatan yaitu model Iwata, model Bresnahan dan model Panzar Rosse (Bikker dan Haaf, 2002b; Le, 2014). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan

dalam mengukur derajat konsentrasi adalah metode *k Bank Concentration Ratio* ( $CR_k$ ) Herfindahl-Hirschman Indeks (HHI) serta Kurva Lorenz dan Koefisien Gini.

a. *k Bank Concentration Ratio* ( $CR_k$ )

*Concentration ratio* adalah metode pengukuran konsentrasi yang memperlihatkan secara bersamaan, jumlah perusahaan dan tingkat ketimpangan pangsa pasar yang dimiliki. *k Bank Concentration Ratio* ( $CR_k$ ) merupakan penjumlahan pangsa pasar dari  $k$  perusahaan terbesar (*leading firm*) yang ada di pasar.  $CR_k$  merupakan metode yang paling sering digunakan karena selain perhitungannya yang mudah,  $CR_k$  juga menunjukkan jumlah dan ukuran relatif perusahaan. Dasar pengukuran konsentrasi sangat bervariasi sesuai dengan maksud penelitian. Pengukuran rasio konsentrasi pada umumnya didasarkan pada variabel-variabel kontribusi output, nilai tambah, penjualan, asset pendapatan, jumlah tenaga kerja atau nilai barang yang dihasilkan. Dengan demikian variabel-variabel yang digunakan adalah variabel yang dapat menggambarkan ukuran suatu perusahaan (*firm size*).

Nilai rasio  $CR_k$  berada diantara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati nol berarti industri semakin mengarah pada pasar persaingan sempurna, sebaliknya semakin mendekati satu menunjukkan bahwa industri semakin mendekati pasar monopoli. Apabila mengacu pada ketentuan persaingan usaha KPPU di Indonesia yaitu UU No. 5 Tahun 1999, maka batasan rasio yang dianggap moderat (*rule of thumb*) dalam suatu konteks persaingan usaha dan menunjukkan perilaku kolusi dari pelaku usaha adalah jika 75 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu hanya dikuasai dua atau tiga atau sekelompok pelaku usaha (Ariyanto, 2004).

Perhitungan konsentrasi pasar dengan menggunakan  $CR_k$  memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan menggunakan  $CR_k$  adalah pengukuran menjadi lebih mudah karena didukung oleh data-data, sedangkan kelemahannya: (1) pengukuran yang dilakukan hanya menggambarkan perusahaan-perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar saja sehingga tidak menunjukkan distribusi antar perusahaan dalam industri tersebut; (2) tidak memberikan informasi mengenai masuknya pesaing-pesaing

baru dalam industri; (3) tidak memberikan informasi mengenai perubahan posisi dan ranking perusahaan, dan (4) tidak menjelaskan perilaku perusahaan dalam pasar.

b. Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) adalah penjumlahan dari kuadrat pangsa pasar yang dimiliki setiap bank dalam industri perbankan (Gelos dan Roldos, 2004). Seperti halnya CRk, HHI mencerminkan jumlah perusahaan dan tingkat ketimpangan pangsa pasar yang dimiliki. Perbedaannya adalah HHI memasukkan seluruh perusahaan yang ada dalam pasar ke dalam perhitungannya, tidak hanya menggunakan beberapa perusahaan terbesar saja. Keunggulan menggunakan HHI adalah kemampuan HHI dalam melihat ketidakseimbangan yang terjadi dalam industri karena menghitung semua perusahaan yang terdapat dalam industri. Sedangkan kelemahannya adalah terlalu memperhitungkan perusahaan-perusahaan kecil dan kurangnya informasi yang tersedia dalam menghitung seluruh pangsa pasar.

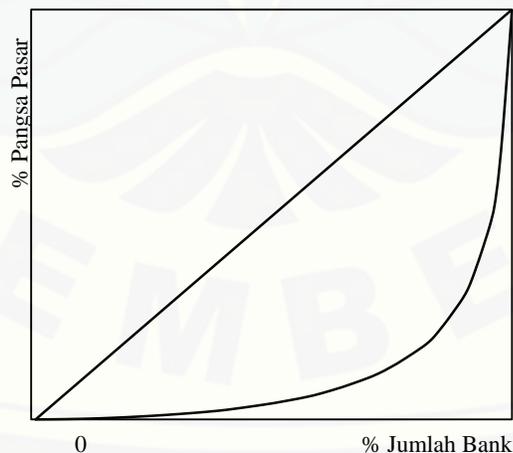
Nilai HHI yang berada di bawah 1000 ( $<0,1$ ) menunjukkan bahwa industri tidak terkonsentrasi (*unconcentrated*), apabila HHI berada pada kisaran 1000-1800 (0,1-0,18) maka termasuk dalam konsentrasi moderat (*moderately concentrated*), sedangkan jika nilai HHI melebihi 1800 ( $>0,18$ ) maka industri dikategorikan terkonsentrasi tinggi (*highly concentrated*). *Merger Guidline* Amerika Serikat menyebutkan bahwa apabila terdapat transaksi yang mengakibatkan peningkatan HHI lebih dari 100 poin maka akan diwaspadai karena berpotensi besar meningkatkan konsentrasi pasar.

Untuk kasus Indonesia, berlandaskan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-notifikasi, Pengabungan, Peleburan dan Pengambilalihan menyebutkan bahwa indikator awal untuk menentukan perlu tidaknya suatu merger dilakukan adalah konsentrasi pasar yang dinilai menggunakan HHI dan mengelompokkan konsentrasi pasar pasca merger menjadi empat spektrum, yaitu spektrum I dengan nilai HHI dibawah 1800, spektrum II dengan HHI antara 1800-3000, spektrum III dengan nilai HHI 3000-4000, dan spektrum IV

dengan HHI diatas 4000. Apabila industri berada pada spektrum I, maka rencana merger dinilai tidak akan menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, karena merger yang menghasilkan HHI kurang dari 1800 ( $<0,18$ ) tidak mengubah struktur pasar yang ada sebelumnya, sebaliknya jika industri berada pada spektrum IV, maka komisi akan mengeluarkan surat keberatan atas merger yang dilakukan karena akan meningkatkan konsentrasi pasar.

### c. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini

Kurva Lorenz dibentuk oleh dua komponen penting, yaitu (1) pangsa pasar, yang dikumulatifkan dari perusahaan dengan pangsa yang terkecil; dan (2) persentase jumlah perusahaan, dikumulatifkan dari kecil ke besar, sedangkan Koefisien Gini adalah ukuran yang menggambarkan informasi dalam kurva Lorenz. Ketika semua bank memiliki pangsa pasar yang sama maka koefisien Gini dalam industri tersebut adalah 0, sedangkan bila satu bank menguasai pangsa pasar maka koefisien gini sama dengan 1. Semakin dekat kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka semakin kecil koefisien Gini. Oleh karena itu semakin dekat nilai koefisien Gini dengan nol menunjukkan pasar yang semakin mendekati pasar kompetitif, sebaliknya semakin mendekati satu, menunjukkan pasar yang semakin mendekati monopoli.



Gambar 2.4 Kurva Lorenz

### 2.1.5 Pengaturan dan Pengawasan Bank yang Efektif

Pengaturan terhadap bank dilakukan dengan membuat berbagai aturan yang sering disebut sebagai pengaturan tentang prinsip kehati-hatian pada bank (*prudential banking regulation*) yang berisikan berbagai ketentuan untuk menjamin kelangsungan usaha dan pengelolaan bank secara sehat (Warjiyo, 2004:144). Pengaturan bank dalam pelaksanaannya mencakup izin pendirian bank baru, kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan bank, kecukupan permodalan dan persyaratan bagi para pengurus bank, sedangkan pengawasan bank hakikatnya merupakan bagian dari *good corporate governance* yang menjadi tanggung jawab pemilik dan pengelola bank. Masyarakat dan pasar sebagai pihak pengguna jasa bank berkewajiban pula melakukan pengawasan terhadap bank dengan menambahkan disiplin pasar (*market discipline*) terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola bank. Namun efektivitas pasar baik dalam mengawasi dan memberikan informasi terkait kondisi bank sangat terbatas terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu melalui suatu lembaga atau otoritas khusus, pemerintah berhak melakukan pengaturan dan pengawasan sebagai pelengkap atas pengawasan yang dilakukan pengurus bank dan masyarakat untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi perbankan (Barth *et al*, 2003).

Peraturan perbankan secara umum didefinisikan sebagai kerangka pengaturan segala kegiatan operasional dan likuiditas perbankan dalam perekonomian (Alam, 2012). Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, pelaksana kebijakan moneter dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan. Untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan bermanfaat bagi perekonomian secara menyeluruh maka kebijakan di bidang perbankan diarahkan pada kebijakan yang memberikan keleluasaan berusaha (*deregulasi*), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dan pengawasan bank yang mendorong bank secara konsisten mematuhi ketentuan internal yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya (Riva'i, *et al*, 2012:7).

Pada dasarnya prinsip-prinsip pengaturan dan pengawasan bank yang efektif mengacu pada suatu standar yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), *Bank for International Settlement* (BIS) yaitu praktek-praktek pengaturan dan pengawasan bank terbaik yang dilakukan di berbagai negara (*international best practices*) yang terdiri dari 7 aspek yaitu: kelembagaan, perizinan, ketentuan kehati-hatian, metode pengawasan, informasi, masalah kewenangan dan pengawasan lintas negara (*cross-border*). Ketujuh aspek tersebut tertuang dalam 25 *Core Principles on Effective Banking Supervision* (lihat Lampiran C: hal 134)

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Berbagai studi empiris yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terkait dengan konsentrasi dan persaingan perbankan telah banyak berkontribusi memberikan gambaran dalam penelitian ini. Penelitian Sharma dan Bal (2010) mengenai derajat konsentrasi industri perbankan India khususnya bank umum yang terdiri dari lima kategori bank yaitu: Bank Negara India dan asosiasinya; Bank Nasionalisasi; BPR; Bank Asing; dan Bank Umum lainnya dengan total 75 bank pada awal tahun penelitian (1998) dan 61 bank pada akhir tahun penelitian (2009). Dalam penelitian tersebut, variabel yang dipilih dalam menentukan konsentrasi pasar adalah total aset, dengan menggunakan perhitungan yang terdiri dari CR1, CR3, CR5, CR10, HHI, Entrophy Index, CCI dan Indeks Gini. Hasil perhitungan menggunakan CR1 menurun dari 23,62 persen pada tahun 1998-1999 menjadi 17,81 persen pada 2005-2006, kemudian kembali meningkat menjadi 18,56 persen pada 2008-2009 dikarenakan adanya merger antara State Bank of Saurashtra dengan State Bank of India. Perhitungan CR5 juga menunjukkan penurunan secara bertahap dari 44,92 persen tahun 1998-1999 menjadi 40,88 persen tahun 2004-2005 dan kembali turun hingga menjadi 39,38 persen pada 2008-2009. Bukti adanya penurunan tingkat konsentrasi atau meningkatnya kompetisi dalam industri perbankan india didukung oleh HHI yang mengalami tren menurun dari 0,076 pada 1998-1999 menjadi 0,059 pada 2008-2009, begitu pula dengan CCI yang menurun dari 28 persen menjadi 23 persen pada 2008-2009. Sebaliknya, Entropy Index

menunjukkan pembobotan yang lebih besar terhadap bank yang berukuran lebih kecil. Indeks Gini menunjukkan penurunan dari 65,81 persen pada 1998-1999 menjadi 60,88 persen tahun 2008-2009 yang berarti terjadi penurunan ketimpangan diantara bank umum di India selama periode pengamatan.

Perhitungan derajat konsentrasi yang dilakukan oleh Nguyen dan Stewart (2010) terhadap industri perbankan Vietnam mencakup 48 bank umum selama periode 1999-2009. Sedikit berbeda dengan penelitian Sharna dan Bal (2010), penelitian ini menggunakan enam perhitungan rasio konsentrasi dan HHI berdasarkan tiga variabel yaitu deposito, total aset dan total pinjaman (kredit). Hasil perhitungan CR dan HHI secara menyeluruh memiliki trend menurun yang berarti industri perbankan Vietnam menjadi kurang terkonsentrasi atau lebih kompetitif selama periode 1999-2009.

Tushaj (2010) melakukan penelitian terhadap industri perbankan Albania selama periode 2000-2008. Dalam penelitian ini indeks konsentrasi dihitung berdasarkan empat komponen yaitu aset, deposito, kredit, dan treasure bills. Hasil perhitungan CR3, CR5 dan HHI terhadap total aset, deposito, kredit dan treasury bills menunjukkan trend menurun selama periode pengamatan, dimana konsentrasi terbesar berada pada pasar deposito perbankan.

Hasil yang tidak jauh berbeda ditunjukkan oleh penelitian Macit (2012) terhadap industri perbankan Turki. Dengan menggunakan perhitungan rasio konsentrasi dan HHI terhadap variabel deposito, total aset dan kredit selama periode 2005-2010, penelitian ini menyimpulkan bahwa derajat konsentrasi industri perbankan Turki meningkat, sebaliknya tingkat kompetisi menurun selama periode 2005-2010 dimana konsentrasi terbesar berada pada total deposit, sedangkan konsentrasi terkecil pada total pinjaman. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa industri perbankan Turki berada pada persaingan monopolistik selama periode pengamatan. Hasil penelitian Iveta (2012) sebangun dengan dua penelitian sebelumnya dimana perhitungan HHI dan CR3 terhadap industri perbankan Ceko menunjukkan trend menurun sehingga dikategorikan sebagai pasar yang terkonsentrasi secara moderat selama periode 2000-2010 dengan konsentrasi tertinggi pada pasar deposit dan terendah pada pasar kredit.

Berbeda dengan ketiga penelitian yang menunjukkan bahwa derajat konsentrasi tertinggi pada industri perbankan berada pada pasar deposito, penelitian Titilayo dan Victor (2014) terhadap industri perbankan Nigeria menyimpulkan bahwa derajat konsentrasi tertinggi pada industri perbankan Nigeria terletak pada total aset, sedangkan konsentrasi terkecil pada pasar deposito. Penelitian ini dilakukan pada bank umum di Nigeria selama periode 2003-2012. Variabel yang digunakan adalah deposito, total aset dan kredit dengan menggunakan perhitungan konsentrasi rasio dan HHI. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebelum terjadi konsolidasi industri perbankan Nigeria tidak terkonsentrasi, kemudian berubah menjadi terkonsentrasi secara moderat pasca terjadinya konsolidasi perbankan.

Untuk kasus Indonesia, penelitian dilakukan oleh Malik (2008) menggunakan sampel 20 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2002-2006. Derajat konsentrasi dihitung menggunakan indeks rasio konsentrasi dan HHI berdasarkan tiga variabel yaitu DPK, total aset dan kredit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada 4 bank besar, namun terjadi penurunan tingkat konsentrasi dari kelompok bank besar ke arah bank skala menengah besar kecil secara signifikan sehingga struktur pasar bank-bank besar bergerak dari oligopoli moderat rendah menuju kompetisi monopolistik.

Senada dengan Malik (2008), penelitian Sugiyanto dan Jumono (2012) menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia berada pada kondisi persaingan monopolistik dimana hasil perhitungan indeks rasio konsentrasi menunjukkan tren menurun kecuali pada CR4 pasar kredit yang memiliki tren fluktuatif. Selain itu, perhitungan HHI-10 dan HHI-4 menunjukkan bahwa konsentrasi industri perbankan Indonesia semakin mengecil ditinjau dari pasar kredit dan DPK.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada wilayah atau negara pengamatan serta periode waktu pengamatan yang digunakan. Penelitian ini hanya dilakukan pada industri perbankan di Indonesia selama periode 2001-2013. Dari sisi indikator konsentrasi yang digunakan, penelitian ini menggunakan tiga indikator konsentrasi yang terdiri dari CRk, HHI dan Koefisien

Gini, berbeda dengan Sharma dan Bal (2010) yang memasukkan perhitungan Entropy indeks dan CCI dalam penelitiannya; Nguyen dan Stewart (2010) yang menggunakan *Fix Effect Model* (FEM); Macit (2012) dan Malik (2008) yang menggunakan PRH Statistik; Iveta (2012) yang juga menggunakan Indeks Lerner, serta Sugiyanto dan Jumono (2012) yang turut pula memasukkan analisis elastisitas dan CAMEL untuk melengkapi perhitungan CR<sub>k</sub> dan HHI dalam penelitiannya. Dalam hal penentuan jumlah  $k$  bank yang dihitung, beberapa penelitian sebelumnya cenderung menggunakan 3 dan 5 bank terbesar (CR3 dan CR5) dalam penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan 4,8 dan 10 bank terbesar (CR4, CR8 dan CR10).

Dari sisi pemilihan variabel, berbeda dengan penelitian Sharma dan Bal (2010) yang hanya menggunakan total aset saja, atau penelitian Tushaj (2010) yang menggunakan *treasury bill* sebagai salah satu variabelnya, penelitian ini menggunakan variabel yang sama seperti Malik (2008), Nguyen dan Stewart (2010), Macit (2012), Iveta (2012), Sugiyanto dan Jumono (2012), serta Titilayo dan Victor (2014) yang terdiri dari tiga variabel yaitu total aset, deposito yang diproxy dengan DPK, dan kredit. Lebih jauh lagi, jika dibandingkan dengan penelitian Malik (2008), meskipun wilayah/negara penelitiannya sama, terdapat perbedaan dalam penentuan jumlah bank yang diamati. Jika Malik (2008) hanya menggunakan sampel 20 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2002-2006, penelitian ini menggunakan seluruh bank konvensional yang ada di Indonesia dengan jumlah yang berfluktuasi setiap tahunnya selama periode 2001-2013. Selain menghitung derajat konsentrasi industri perbankan, penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan industri perbankan terhadap perilaku dan kinerja industri perbankan di Indonesia sebagaimana tertuang pada rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian sebelumnya

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1.	Sharma dan Bal, 2010	<i>Bank Market Concentration: A Case Study of India</i>	<i>Concentration Ratio (CR<sub>k</sub>), HHI, Entropi index, CCI, dan Koefisien Gini</i>	Total Aset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HHI dan CR<sub>k</sub> mengalami penurunan dari awal tahun penelitian (1998-1999) mencerminkan tingkat kompetisi yang lebih besar pada perbankan di India.</li> <li>2. Indeks Gini sebagai ukuran relatif konsentrasi juga menurun selama masa studi yang menunjukkan penurunan kesenjangan antara bank komersial yang beroperasi di pasar perbankan India.</li> <li>3. Penurunan konsentrasi perbankan India terjadi ketika jumlah bank yang beroperasi juga menurun.</li> </ol>
2.	Nguyen dan Stewart (2010)	<i>Concentration and Efficiency in the Vietnamese Banking System Between 1999 and 2009: a Structural Model Approach</i>	<i>Concentration Ratio (CR<sub>k</sub>), HHI, Fixed Effect Model</i>	Total Deposito, Total Kredit, dan Total Aset	Trend menurun yang terjadi pada perhitungan CRs dan HHIs secara menyeluruh menunjukkan bahwa industri perbankan Vietnam menjadi sedikit terkonsentrasi atau lebih kompetitif selama periode 1999-2009, meskipun bank-bank umum besar masih mendominasi sistem perbankan secara keseluruhan.
3.	Tushaj (2010)	<i>Market Concentration in the Banking Sector: Evidence from Albania</i>	<i>Concentration Ratio (CR<sub>k</sub>), HHI</i>	Total Aset, Deposito, Kredit, dan Treasury Bills	Perhitungan CR3, CR5 dan HHI terhadap total aset, deposito, kredit dan treasury bills menunjukkan trend menurun selama periode pengamatan, dimana konsentrasi terbesar berada pada pasar deposito perbankan.
4.	Macit (2012)	<i>Recent Evidence on Concentration and Competition in Turkish Banking Sector</i>	<i>Concentration Ratio (CR<sub>k</sub>), HHI, PRH Statistic</i>	Total Deposito, Total Kredit, dan Total Aset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan CR3, CR5, dan HHI menunjukkan konsentrasi terbesar berada pada total deposit, sedangkan konsentrasi terkecil pada total pinjaman.</li> <li>2. Derajat konsentrasi industri perbankan Turki meningkat, sebaliknya tingkat kompetisi menurun periode 2005-2010.</li> <li>3. Industri perbankan Turki dikategorikan berada pada persaingan monopolistic</li> </ol>

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Variabel	Hasil
5.	Iveta (2012)	<i>Market Power in Czech Banking Sector</i>	<i>Lerner Index, HHI dan Concentration Ratio (CR<sub>k</sub>)</i>	Total Deposito, Total Kredit, dan Total Aset	Perhitungan dengan HHI dan CR3 menunjukkan trend menurun selama periode pengamatan sehingga industri perbankan Ceko dikategorikan sebagai pasar yang terkonsentrasi secara moderat selama periode 2000-2010 dengan tingkat konsentrasi tertinggi pada pasar deposit dan terendah pada pasar kredit
6.	Titilayo dan Victor (2014)	<i>Bank Consolidation and Market Structure in Nigeria: Application of The Herfindahl-Hirschman Index</i>	<i>Concentration Ratio (CR<sub>k</sub>), HHI</i>	Total Deposito, Total Kredit, dan Total Aset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan CR3, CR5, CR8 dan HHI terhadap deposito, total aset dan kredit menunjukkan tren meningkat, dimana konsentrasi terbesar pada total aset, dan terkecil pada pasar deposito.</li> <li>2. Industri perbankan di Nigeria tidak terkonsentrasi sebelum konsolidasi, dan berubah menjadi terkonsentrasi secara moderat pasca konsolidasi perbankan.</li> </ol>
7.	Malik (2008)	Struktur Pasar dan Perilaku Kompetitif Industri Perbankan Indonesia Pasca Implementasi API	<i>Concentration Ratio (CR<sub>k</sub>), HHI, PRH Statistic</i>	Total Deposito, Total Kredit, dan Total Aset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan CR dan HHI menunjukkan bank-bank cenderung terkonsentrasi pada 4 bank besar, namun terjadi penurunan tingkat konsentrasi dari kelompok bank besar kearah bank skala menengah besar kecil secara signifikan sehingga stuktur pasar bank-bank kecil mengarah pada kompetisi monopolistik</li> <li>2. Kelompok bank-bank besar bergerak dari oligopoly moderat rendah menuju kompetisi monopolistic.</li> </ol>
8.	Sugiyanto dan Jumono (2012)	Struktur, Perilaku dan Kinerja Perbankan Indonesia	<i>Concentration Ratio (CR<sub>k</sub>), HHI, Elastisitas dan CAMEL</i>	Total Deposito, Total Kredit, dan Total Aset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan CR4 dan CR10 menunjukkan industri perbankan indonesia berbentuk oligopoly moderat rendah (monopolistic) dimana CR menunjukkan tren menurun kecuali pada CR4 pasar kredit dengan tren fluktuatif.</li> <li>2. Perhitungan HHI-10 dan HHI-4 menunjukkan konsentrasi pasar perbankan indonesia semakin mengecil ditinjau dari pasar kredit dan DPK</li> </ol>

Sumber: Berbagai sumber penelitian, diolah

### 2.3 Kerangka Konseptual

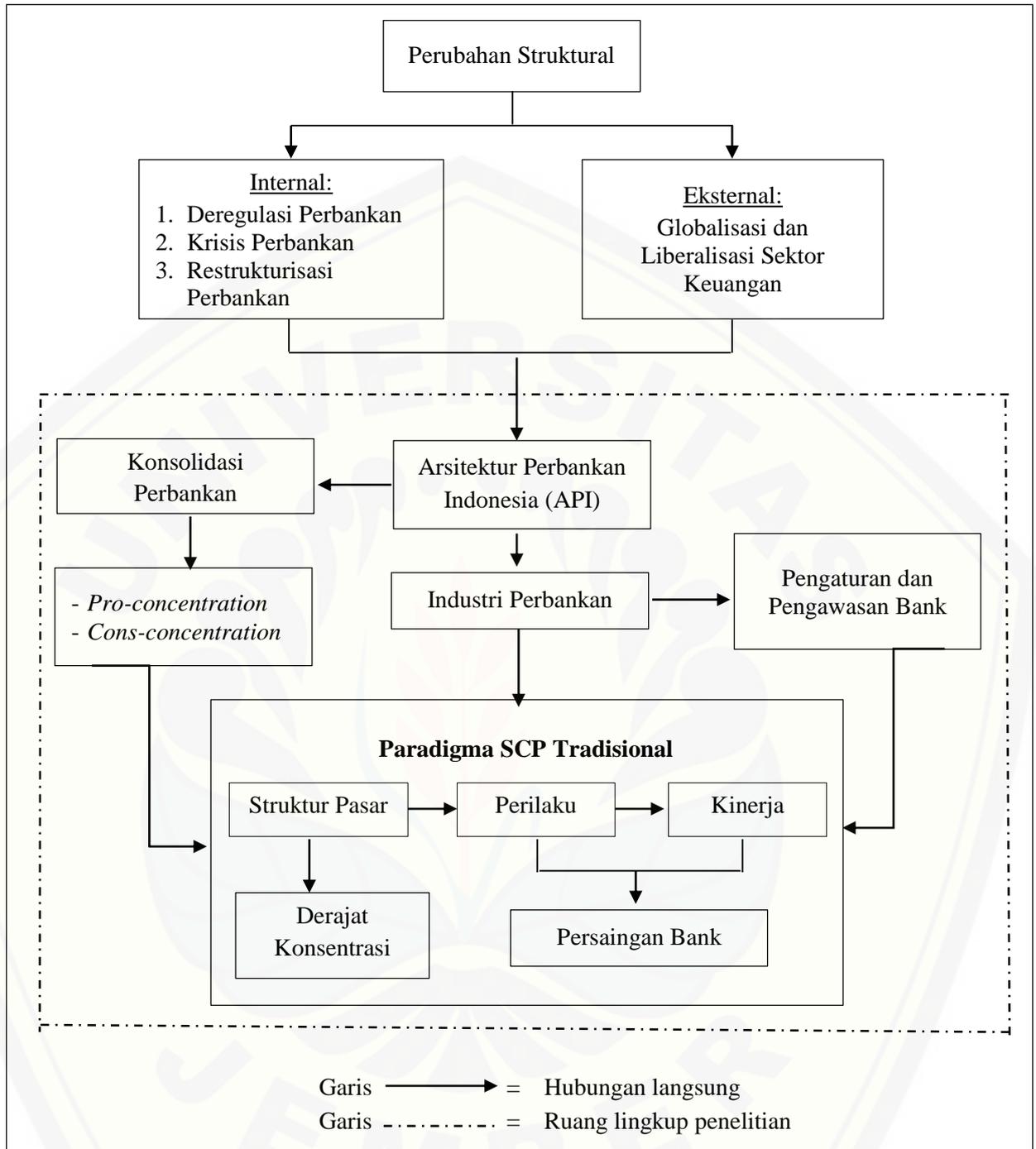
Industri perbankan Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Deregulasi perbankan yang terjadi tahun 1983 dan 1988 yang ditandai oleh dikeluarkannya berbagai paket kebijakan, kemudian disusul oleh restrukturisasi perbankan pasca krisis 1997, bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO yang menginisiasi liberalisasi sektor keuangan hingga dikeluarkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada Januari 2004 telah memberikan sumbangsih besar bagi perubahan struktural yang terjadi pada industri perbankan nasional. Tujuan utama API adalah untuk membangun industri perbankan nasional yang sehat dan kuat, mampu menghadapi setiap guncangan dan lebih maksimal dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Dengan dikeluarkannya API, konsolidasi perbankan melalui merger dan akuisisi antar bank dalam rangka memperkuat struktur perbankan mulai sering dilakukan. Hal ini berkontribusi cukup besar dalam mengurangi jumlah dan penguatan struktur permodalan perbankan Indonesia. Berkurangnya jumlah bank dan struktur permodalan yang semakin kuat akan mendorong terjadinya perubahan struktur pasar yang tercermin melalui perubahan derajat konsentrasi pada industri perbankan. Semakin tinggi derajat konsentrasi, menunjukkan bahwa semakin besar dominasi bank-bank tertentu dalam menguasai pangsa pasar. Munculnya dominasi dalam industri perbankan akan mempengaruhi persaingan pada industri perbankan melalui perubahan perilaku bank, misalnya dalam hal penentuan tingkat suku bunga kredit, maupun penentuan jumlah kredit yang akan disalurkan oleh bank dalam usahanya memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Analisis mengenai konsentrasi industri perbankan tertuang dalam dua teori yang saling bertentangan yaitu teori *pro-concentration* dan *cons-concentration*. Di satu sisi teori *pro-concentration* meyakini bahwa peningkatan konsentrasi melalui merger dan akuisisi bank dapat menciptakan *economic of scale*, sehingga dengan meningkatkan konsentrasi sama halnya dengan meningkatkan efisiensi (Demirgüç-Kunt dan Levine, 2000). Industri perbankan yang lebih terkonsentrasi dengan beberapa bank besar dapat menciptakan diversifikasi usaha dengan lebih baik dan

laba yang lebih besar sehingga akan lebih tahan terhadap guncangan daripada sistem dengan bank-bank kecil (Allen dan Gale, 2004). Selain itu, dengan sedikit bank besar akan memudahkan pengawasan oleh bank sentral atau otoritas terkait dan karenanya akan lebih mampu menciptakan stabilitas perbankan. Sebaliknya, teori *cons-concentration* berpendapat struktur perbankan yang lebih terkonsentrasi semakin membuat industri perbankan menjadi lebih lemah dan rentan terhadap krisis (Le, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengidentifikasi derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia melalui perhitungan beberapa rasio konsentrasi industri berdasarkan indikator-indikator konsentrasi seperti DPK, total aset dan kredit. Selain itu berkaca pada karakteristik khusus industri perbankan yang rentan terhadap krisis dan peran pentingnya bagi perekonomian menyebabkan industri perbankan perlu diatur dan diawasi. Terjadinya krisis yang menimpa Indonesia serta berbagai kasus *moral hazard* pada industri perbankan nasional mengindikasikan lemahnya pengaturan dan pengawasan yang dilakukan bank sentral sehingga mendorong pengalihan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK. Peralihan tanggung jawab tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap kondisi persaingan dalam industri perbankan, terutama melalui semakin ketat atau tidaknya regulasi-regulasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja industri perbankan di Indonesia.



Gambar 2.5 Kerangka Konseptual

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Sistem perbankan di Indonesia terdiri enam kelompok bank yaitu Bank Persero; Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Non Devisa; BPD; Bank Campuran dan Bank Asing. Penelitian ini akan menggunakan seluruh bank umum konvensional di Indonesia sebagai objek penelitian dengan jumlah yang berfluktuasi setiap tahunnya yaitu sebanyak 141 bank pada tahun 2001 dan 109 bank pada tahun 2013.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data runtut waktu (*time series*) dengan periode tahunan mulai tahun 2001 hingga 2013. Selain karena alasan metodologi, penentuan periode waktu 2001-2013 dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa penting yang mempengaruhi kondisi industri perbankan di Indonesia selama periode tersebut. Pertama, pemilihan tahun 2001 sebagai awal tahun penelitian dikarenakan pada tahun tersebut dilakukan program restrukturisasi perbankan yang telah dimulai sejak tahun 1999, diikuti oleh keluarnya API tahun 2004 yang memberikan sumbangsih besar dalam mengurangi jumlah bank di Indonesia melalui konsolidasi perbankan (lihat Gambar 1.1). Kemudian pada tahun 2011 dikeluarkan UU No.21 tahun 2011 tentang OJK yang menandai babak baru pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Kedua, dengan rentan waktu tigabelas tahun diharapkan mampu untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada industri perbankan Indonesia untuk menjawab permasalahan yang diusung dalam penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan bank yang dilaporkan dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan (LPP) serta dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI selama periode 2001-2013. Variabel yang digunakan untuk mengukur derajat konsentrasi perbankan adalah DPK, total aset dan kredit.

## 3.2 Metode Analisis Data

### 3.2.1 Analisis Eklektik

Analisis Eklektik dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan empiris pertama mengenai tingkat konsentrasi industri perbankan Indonesia. Penggunaan analisis eklektik ini diharapkan dapat menggambarkan fenomena persaingan dalam industri perbankan nasional dengan menggunakan penjabaran berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan terhadap data-data mentah perbankan sehingga dapat lebih mudah untuk dimengerti. Penjabaran dari hasil perhitungan tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun uraian kalimat (naratif). Tingkat konsentrasi industri perbankan dalam penelitian ini akan dihitung menggunakan *k Bank Concentration Ratio* ( $CR_k$ ), *Herfindahl-Hirschman Index*, serta Kurva Lorenz dan Koefisien Gini.

#### a. *k Bank Concentration Ratio* ( $CR_k$ )

*k Bank Concentration Ratio* ( $CR_k$ ) sering digunakan dalam pengukuran derajat konsentrasi dengan model struktural dalam menjelaskan kinerja kompetitif industri perbankan sebagai hasil dari struktur pasar (Bikker dan Haaf, 2002).  $CR$  didefinisikan sebagai prosentase dari keseluruhan output industri yang dihasilkan oleh firm-firm terbesar. Tidak ada aturan baku mengenai penentuan jumlah bank dalam menghitung rasio ini, namun biasanya jumlah firm  $k$  yang dihitung proporsi pasarnya adalah 4, sehingga dikenal sebagai  $CR_4$ . Jika  $P_i$  mewakili DPK, total aset atau kredit yang diwakili oleh bank  $i = 1, 2, \dots, k$ , dengan  $P_1 \geq P_2 \geq P_3 \geq \dots \geq P_k$ , maka *Concentration Ratio* ( $CR_k$ ) untuk  $k$  perusahaan dihitung sebagai:

$$CR_k = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_k$$

Rasio konsentrasi dirumuskan sebagai berikut:

$$CR_k = \sum_{i=1}^k \frac{X_i}{T}$$

Keterangan:

$k$  : jumlah bank yang dipilih berdasarkan total aset, DPK atau kredit terbesar

$X_i$ : besarnya total aset, DPK, atau kredit dari perusahaan yang dipilih

$T$  : Total aset, total DPK, atau total kredit dalam industri

Rasio konsentrasi berkisar antara nol hingga satu dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Nilai konsentrasi mendekati angka nol mengindikasikan bahwa sejumlah k bank memiliki pangsa pasar yang relatif kecil, sebaliknya angka rasio yang semakin mendekati satu mengindikasikan tingkat konsentrasi yang semakin tinggi, atau dapat dinyatakan sebagai berikut:

1.  $CR_k = 0\%$  - *no concentration* (pasar pada kondisi persaingan sempurna)
2.  $CR_k = 0-50\%$  *low concentration* (pasar persaingan sempurna menuju oligopoli)
3.  $CR_k = 50-80\%$  - *secondary concentration*, (identik dengan oligopoli)
4.  $CR_k = 80-100\%$  - *high concentration* (oligopoli menuju monopoli)
5.  $CR_k = 100\%$  - *full concentration* (pasar monopoli)

$CR_k$  sangat tergantung pada jumlah bank dalam industri, sehingga  $CR_k$  akan menurun jika jumlah bank dalam industri meningkat. Dalam penelitian ini akan digunakan perhitungan tiga rasio konsentrasi yang mewakili empat bank terbesar ( $CR_4$ ), delapan bank terbesar ( $CR_8$ ) dan sepuluh bank terbesar ( $CR_{10}$ ).

b. Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

Indeks Herfindahl-Hirschman didefinisikan sebagai jumlah kuadrat pangsa pasar dari seluruh bank dalam industri, dan diformulasikan sebagai:

$$H = P_1^2 + P_2^2 + P_3^2 + \dots + P_n^2$$

Herfindahl-Hirschman Index dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum_{i=1}^n \left(\frac{q_i}{Q}\right)^2 = \sum_{i=1}^n S_i^2$$

Keterangan:

n : jumlah bank pada industri perbankan

$q_i$ : volume output bank k,  $k = 1, 2, \dots, n$

Q : volume output industri perbankan

$S_i$  : rasio antara output bank k terhadap output industri perbankan

Nilai H akan berkisar antara nol hingga satu. Nilai H akan sama dengan  $1/n$  jika terdapat n bank yang mempunyai ukuran yang sama. Jika H mendekati nol,

berarti terdapat sejumlah besar bank dengan ukuran usaha yang hampir sama dalam industri yang menunjukkan derajat konsentrasi pasar yang rendah. Sebaliknya, industri bersifat monopoli jika H sama dengan satu. Semakin tinggi H, maka semakin tinggi distribusi ukuran bank, atau dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.  $HHI \leq 0,10$  (dibawah 1000), berarti pasar tidak terkonsentrasi (*unconcentrated*)
2.  $0,10 \leq HHI \leq 0,18$  (1000-1800), berarti pasar terkonsentrasi moderat
3.  $HHI \geq 0,18$  (1800 keatas), berarti pasar terkonsentrasi tinggi

c. Kurva Lorenz dan Koefisien Gini

Koefisien Gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan (*inequality*) dan dapat pula digunakan untuk mengukur transformasi konsentrasi industri. Koefisien Gini bernilai 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area antara Kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna (diagonal). Semakin dekat kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka semakin kecil koefisien Gini. Koefisien Gini diformulasikan sebagai berikut:

$$Gini = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

Keterangan:

$X_k$  : proporsi kumulatif jumlah bank,  $k = 0, 1, 2, \dots, n$ , dengan  $X_0 = 0$ ,  $X_n = 1$

$Y_k$  : proporsi kumulatif jumlah pangsa pasar,  $k = 0, 1, 2, \dots, n$ , dengan  $Y_0 = 0$ ,  $Y_n = 1$

Jika Kurva Lorenz dinyatakan dengan fungsi  $Y = L(X)$ , maka Koefisien Gini dirumuskan sebagai berikut:

$$Gini = 1 - 2 \int_0^1 L(X)d(X)$$

Ketika semua bank memiliki pangsa pasar yang sama maka koefisien Gini industri tersebut adalah 0, sedangkan bila satu bank menguasai pangsa pasar maka koefisien gini sama dengan 1. Kriteria ketimpangan berdasarkan Koefisien Gini dinyatakan sebagai berikut:

- Kurang dari 0,35 ( $<0,35$ ): ketimpangan ringan
- Antara 0,35 dan 0,5 ( $0,35-0,5$ ): ketimpangan sedang
- Lebih dari 0,5 ( $>0,5$ ): ketimpangan berat

### 3.2.2 Analisis Deskriptif Naratif

Analisis deskriptif naratif merupakan salah satu metode pemecahan atas permasalahan yang diteliti dengan menggambarkan kondisi dari objek penelitian yang dikaji secara teoritis maupun fakta empiris. Metode ini didasarkan pada analisis pada variabel-variabel yang mendukung penelitian ini, dimana tidak dapat diukur secara nyata melainkan dengan analisis yang menjelaskan uraian dalam bentuk kalimat (naratif).

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa bermaksud memuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:147). Metode deskriptif bertugas untuk melakukan representasi objek mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian. Representasi dilakukan melalui pendeskripsian gejala-gejala sebagai data atau fakta sebagaimana yang terdapat di dalam masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Dengan kata lain metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya (Nawawi dan Martini, 1996:74-75).

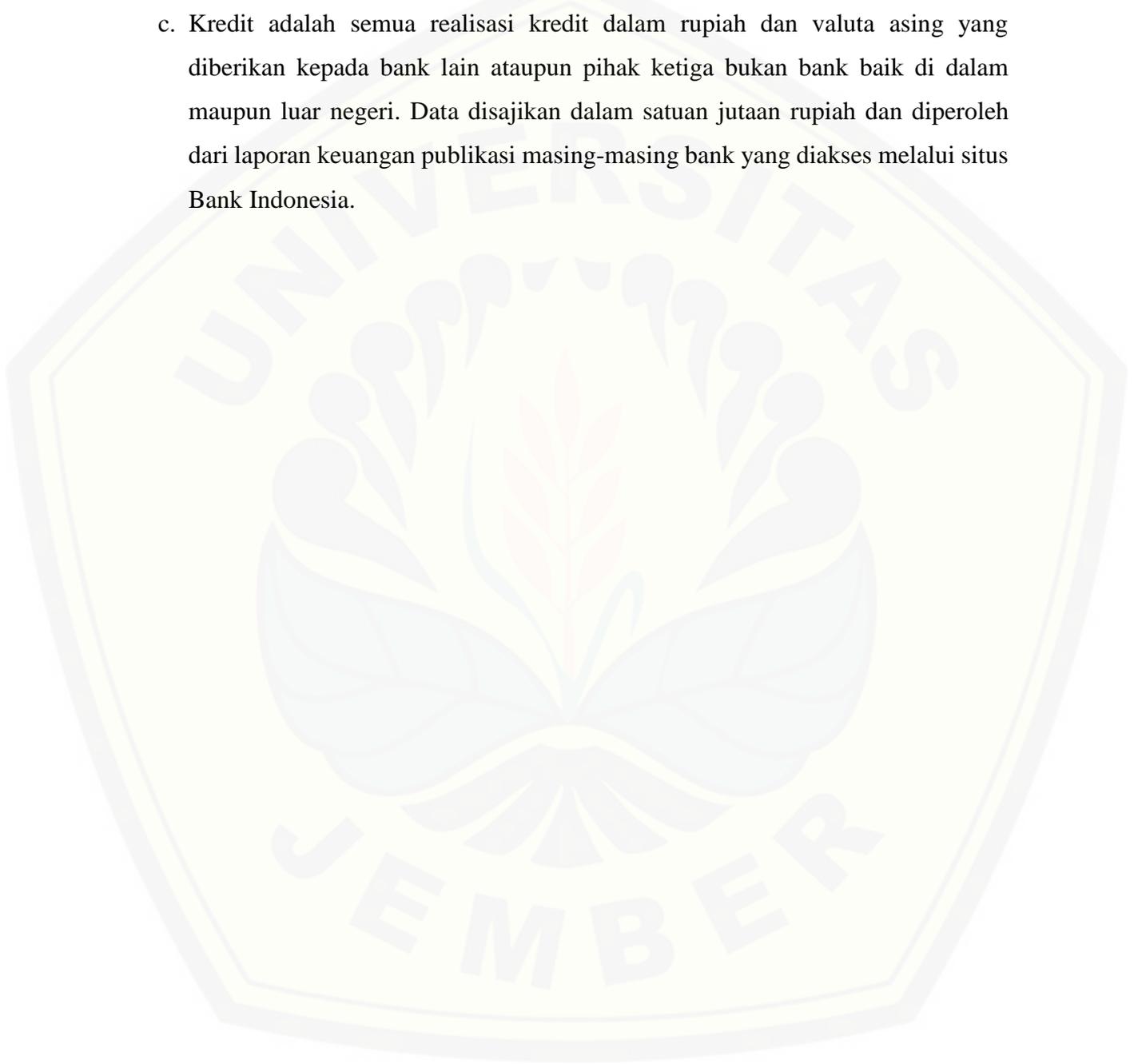
Penyajian hasil analisis deskriptif biasanya berupa statistik sederhana seperti frekuensi dan persentase, berbagai bentuk diagram dan grafik pada data yang bersifat kategorikal, serta berupa statistik-statistik kelompok antara lain median, modus, distribusi frekuensi, mean, simpangan baku dan angka baku pada data yang bukan kategorikal (Usman dan Akbar, 2009:131).

### 3.3 Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang dimaksudkan untuk menghindari meluasnya permasalahan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Total aset adalah total aktiva yang mencerminkan posisi kekayaan yang merupakan hasil penggunaan dana bank dalam berbagai bentuk. Data disajikan dalam satuan jutaan rupiah dan diperoleh dari laporan keuangan publikasi masing-masing bank yang diakses melalui situs Bank Indonesia.

- b. DPK adalah total dana yang dihimpun oleh bank dari pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka baik dalam rupiah maupun valas. Data disajikan dalam satuan jutaan rupiah dan diperoleh dari laporan keuangan publikasi masing-masing bank yang diakses melalui situs Bank Indonesia.
- c. Kredit adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan kepada bank lain ataupun pihak ketiga bukan bank baik di dalam maupun luar negeri. Data disajikan dalam satuan jutaan rupiah dan diperoleh dari laporan keuangan publikasi masing-masing bank yang diakses melalui situs Bank Indonesia.



## **BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab 4 akan diuraikan secara lebih rinci mengenai konfigurasi perkembangan industri perbankan di Indonesia yang terdiri dari dinamika perubahan struktural, kebijakan konsolidasi dan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) serta perkembangan indikator kinerja perbankan yang diharapkan mampu memperkuat hasil perhitungan indeks-indeks derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia. Selain itu akan dipaparkan pula hasil analisis diskriptif mengenai keterkaitan antara sistem pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja perbankan di Indonesia serta pembahasan atas jawaban dari kedua pertanyaan penelitian.

### **4.1 Konfigurasi Perkembangan Industri Perbankan di Indonesia**

Terjadinya berbagai peristiwa penting dalam sektor keuangan seperti deregulasi, globalisasi dan kemajuan di bidang teknologi informasi telah berkontribusi besar dalam mendorong perkembangan yang pesat pada industri perbankan dalam beberapa dekade terakhir (Gelos dan Roldos, 2004; Yildirim dan Philippatos, 2006; Sharma dan Bal, 2010). Berbeda dengan industri lainnya, beberapa ahli menyebutkan bahwa industri perbankan memerlukan perhatian khusus karena dianggap rentan krisis, mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal perbankan dan merupakan bagian integral dari sistem pembayaran. Karakteristik khusus industri perbankan tersebut memunculkan gagasan bahwa apabila terjadi guncangan pada industri perbankan maka dapat menyebabkan efek negatif terhadap perekonomian yang dampaknya jauh lebih besar dibandingkan dampak negatif runtuhnya industri lainnya (Demirgüç-Kunt dan Huizinga, 2000; Abdullah, 2010). Subbab 4.1 ini akan memaparkan dinamika perubahan struktural yang terjadi pada industri perbankan di Indonesia dan fluktuasi indikator-indikator kinerja industri perbankan di Indonesia.

#### 4.1.1 Dinamika Perubahan Struktural Industri Perbankan di Indonesia

Reformasi sektor keuangan menempati posisi sentral dalam liberalisasi ekonomi karena sistem keuangan yang efisien merupakan prasyarat utama efisiensi perekonomian suatu negara. Distorsi di sektor keuangan cenderung menyebabkan distorsi kinerja perekonomian secara keseluruhan dan sebagian besar target program reformasi ekonomi akan sulit dicapai tanpa reformasi sektor keuangan yang sesuai (Akingunola *et al*, 2013). Dikeluarkannya paket deregulasi pada 1 Juni 1983 (Pakjun 1983) menjadi tanda berakhirnya masa depresi keuangan dan langkah awal reformasi kebijakan di sektor keuangan Indonesia. Pakjun 1983 bertujuan untuk memodernisasi perbankan dan kemudian diikuti dengan keluarnya Paket Oktober 1988 (Pakto 88) yang menandai era liberalisasi pada industri perbankan Indonesia (Widyastuti dan Armanto, 2013). Pakto 88 berisikan berbagai kemudahan diantaranya dalam izin pendirian bank baru dan pembukaan kantor cabang dimana seorang investor telah diperbolehkan mendirikan bank umum dengan dana Rp 10 miliar dan Rp 50 juta untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR), perizinan pembukaan kantor cabang bank asing di enam kota besar di Indonesia, penurunan rasio giro wajib minimum (GWM) dari 15 persen menjadi 2 persen dari total utang pihak ketiga, dan berbagai kemudahan lainnya untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi diantara bank-bank milik pemerintah, swasta dan asing yang beroperasi di Indonesia

Pasca deregulasi perbankan tahun 1988, industri perbankan mengalami pertumbuhan jumlah bank dan kantor cabang secara signifikan dari 111 bank pada tahun 1988 menjadi 239 bank pada akhir tahun 1996 yang diiringi dengan meningkatnya jumlah kantor cabang dari 1.957 kantor tahun 1988 menjadi 7.314 kantor tahun 1996 (Bank Indonesia, 2005). Keterlibatan Indonesia pada berbagai kerjasama internasional sejak tahun 1990an semakin mendorong liberalisasi sektor perbankan Indonesia. Hal itu dikarenakan industri perbankan suatu negara akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan lintas negara. Meningkatnya lalu lintas perdagangan internasional menuntut peran perbankan yang lebih komprehensif sebagai penerima pembayaran atau pihak yang menjamin

pembayaran. Namun, terjadinya krisis moneter yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1997 menyebabkan banyak negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami krisis keuangan yang cukup parah (Afriany dan Jamaan, 2012).

Krisis moneter tahun 1997 diawali dengan jatuhnya mata uang sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara terhadap dollar AS yang pada akhirnya mendatangkan efek berkelanjutan yang menjalar ke berbagai sektor perekonomian terutama industri perbankan (Demirgüç-Kunt dan Huizinga, 2000). Krisis tersebut telah memaksa pemerintah untuk melakukan berbagai langkah restrukturisasi dan rekapitalisasi untuk mengurangi dampak krisis pada industri perbankan nasional yang diawali dengan keputusan menutup 16 bank swasta nasional pada 1 November 1997. Keputusan penutupan bank tersebut justru menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga mendorong terjadinya penarikan dana besar-besaran (*bank runs*) pada bank-bank bukan pemerintah dan mengakibatkan jumlah DPK pada bank umum swasta nasional (BUSN) menurun sebesar 11,94 persen atau Rp 22 triliun. Sebagai langkah penyelamatan, pemerintah mendirikan Badan Pernyehatan Perbankan Nasional (*Indonesian Banking Restructuring Agency/IBRA*) dan memberikan jaminan (*blanket guarantee*) pada Januari 1998 (Gopalan dan Rajan, 2009; Goeltom dan Harun, 2010; Simorangkir, 2012).

Upaya penyelamatan lain yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 yang mengatur tentang kepemilikan asing pada industri perbankan Indonesia hingga mencapai 99 persen. Keterbukaan terhadap pihak asing ke dalam industri perbankan nasional tidak lepas dari kebutuhan dana dalam rangka rekapitalisasi sistem perbankan pasca krisis. Selain itu, internasionalisasi sistem perbankan dapat mendorong otoritas perbankan untuk meningkatkan dan menyelaraskan standar dan prosedur pengaturan dan pengawasan serta infrastruktur keuangan secara menyeluruh terhadap standar praktik terbaik internasional (*international best practice level*). Melalui program divestasi tersebut, partisipasi asing meningkat signifikan pada industri perbankan nasional (Gopalan dan Rajan, 2009; Afriany dan Jamaan, 2012).

#### 4.1.2 Kebijakan Konsolidasi Perbankan dan Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Implementasi program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan sejak tahun 1998 telah memunculkan suatu gagasan bahwa diperlukannya suatu *blueprint* perbankan nasional yang menggambarkan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia secara menyeluruh dan arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia kedepan. Berpijak pada gagasan tersebut, maka pada 9 Januari 2004, Bank Indonesia merilis Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang digunakan sebagai *guideline* berbagai upaya pengembangan industri perbankan nasional dalam rentan waktu lima hingga sepuluh tahun kedepan sejak API diterbitkan (Bank Indonesia, 2014).

Tabel 4.1 Sasaran Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

No	Sasaran yang ingin dicapai
1.	Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2.	Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3.	Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4.	Menciptakan <i>good corporate governance</i> dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5.	Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6.	Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Sumber: Bank Indonesia, 2004

Berlandaskan pada keinginan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan melalui suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien dalam rangka mendorong perekonomian nasional, maka Tabel 4.1 diatas merangkum sasaran-sasaran yang ingin dicapai selama pelaksanaan API. Terjadinya krisis tahun 1997 hingga implementasi API tahun 2004 telah memberikan sumbangsih cukup besar dalam merubah struktur industri perbankan Indonesia baik dari segi jumlah bank maupun struktur permodalan bank. Mulyaningsih dan Daly (2011) memaparkan bahwa penguatan struktur modal bank dapat bersumber dari tambahan modal dari pemilik (*shareholder*) lama maupun investor baru, melakukan merger atau diakuisisi oleh bank yang lebih besar, atau

dengan menjual saham pada pasar modal. Hal itu dikarenakan modal yang lebih besar merupakan syarat utama agar suatu bank dapat mempertahankan usaha dan risiko serta melakukan pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas penyaluran kredit.

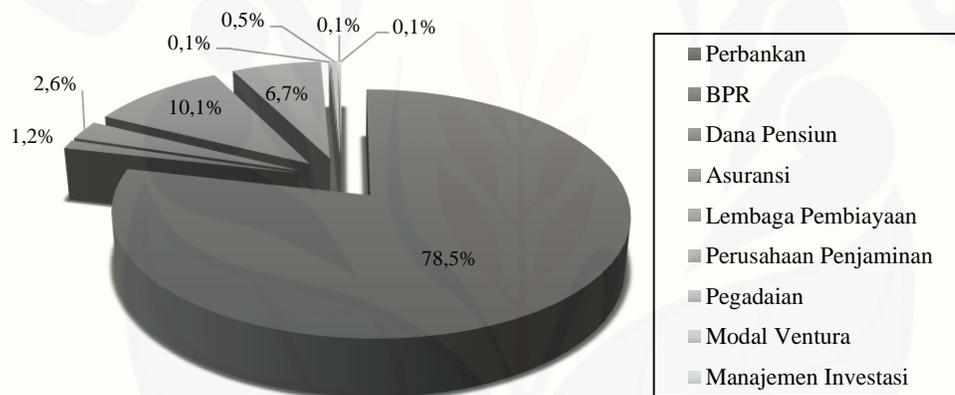
Gelombang merger pada industri perbankan nasional akan semakin gencar dilakukan dengan tujuan agar pada tahun 2015-2020 tercipta struktur perbankan yang optimal yang terdiri dari 2-3 bank internasional, 3-5 bank nasional dan 30-50 bank spesialis dengan total bank sebanyak 60 bank (Kusumastuti, 2009; Mulyaningsih dan Daly, 2011). Namun melihat realita yang ada, proses merger di Indonesia berjalan cukup lambat terbukti dengan jumlah bank yang masih banyak. Selama periode 2001-2013, terjadi 10 merger yang hanya menghasilkan penurunan bank sebanyak 25 bank (17,24 persen) dari 145 bank menjadi 120 bank pada tahun 2013.

Tabel 4.2 Daftar merger dan akuisisi selama periode 2004-2013

Tahun	Bank yang Merger	Bank Hasil Merger
2004	Bank Pikko Bank CIC Bank Danpac	PT Bank Century
2005	Bank Artha Graha Bank Interpacific	PT Bank Artha Graha International, Tbk
2006	PT Bank UFJ Indonesia Bank Tokyo Mitsubishi	PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd
2007	PT Bank Arta Niaga Kencana Commonwealth Indonesia	PT Bank Commonwealth
	PT Bank Windu Kentjana PT Bank Multicor, Tbk	PT Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk
2008	PT Bank Harmoni Internasional PT Bank Index Selindo	PT Bank Index Selindo
	PT Bank Haga PT Bank Hagakita Bank Rabibank Duta	PT Bank Rabobank International Indonesia
	PT Bank Lippo PT Bank Niaga	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
2010	PT Bank Buana PT Bank UOB Indonesia	PT Bank UOB Buana
2011	PT Bank NISP PT Bank OCBC Indonesia	PT Bank OCBC NISP, Tbk

#### 4.1.3 Perkembangan Karakteristik dan Indikator Kinerja Industri Perbankan

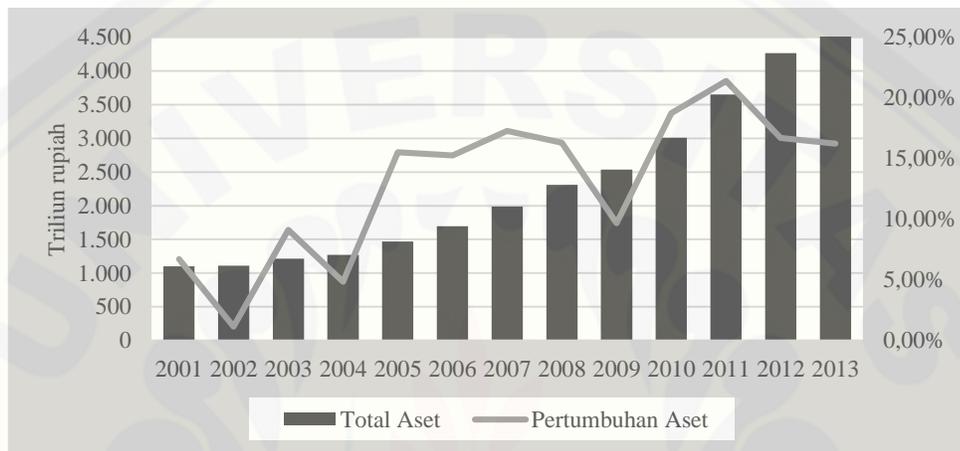
Industri perbankan secara keseluruhan masih mendominasi sistem keuangan di Indonesia. Dominasi tersebut terlihat dari penguasaan aset industri perbankan yang jauh melebihi lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam tatanan sistem keuangan yaitu mencapai 78,5 persen, yang mengindikasikan bahwa industri perbankan memiliki peran yang cukup vital dalam perekonomian nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi dan pergerakan roda perekonomian suatu negara secara keseluruhan ditopang oleh fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan khususnya dalam memfasilitasi penyaluran kredit. Pada tatanan perekonomian makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter, dan merupakan sumber pembiayaan utama pada level perekonomian mikro (Siringoringo, 2012).



Gambar 4.1 Penguasaan aset perbankan terhadap total aset lembaga keuangan tahun 2013 (Sumber: Kajian Stabilitas Sistem Keuangan, 2014)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Apostolik *et al* (dalam Siringoringo, 2012) mendiskripsikan kegiatan inti bank menjadi tiga yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito berjangka (*deposit collection*); memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran (*payment services*); dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit (*loan underwriting*). Kemampuan perbankan dalam mengorganisasi dana yang terbentuk dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan aliran dana dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja bank di suatu negara. Ditinjau dari sisi kepemilikan

aset, total aset perbankan Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana terjadi peningkatan sebesar 16,23 persen dari 4.262,6 triliun rupiah tahun 2012 menjadi 4.954,5 triliun rupiah tahun 2013, atau jika dibandingkan dengan total aset pada tahun 2001 yang hanya sebesar 1.099,7 triliun rupiah maka telah terjadi peningkatan lebih dari 350 persen selama periode 2001-2013.

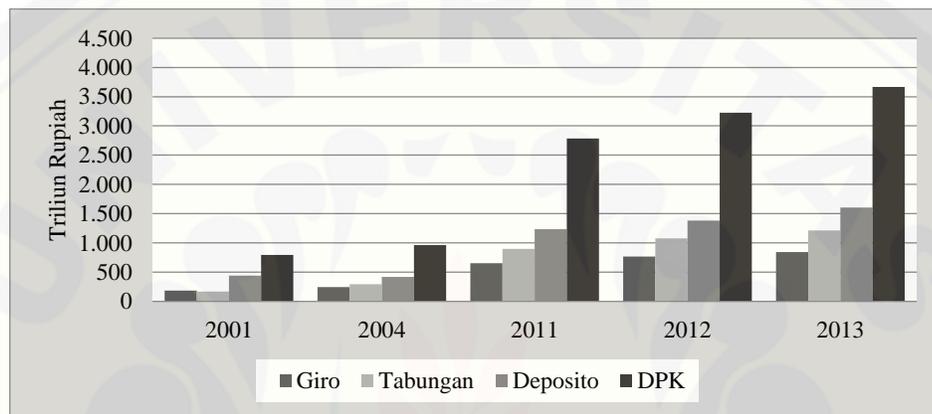


Gambar 4.2 Perkembangan total aset perbankan (Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah)

Dari sisi penghimpun dana, jumlah dan komposisi simpanan masyarakat dalam sistem perbankan akan berdampak pada kestabilan industri perbankan. Penarikan dana masyarakat secara besar-besaran dalam waktu singkat akan berdampak negatif pada likuiditas bank. Hal ini dapat menimbulkan masalah solvabilitas apabila tidak mendapat penanganan secara cepat dan tepat karena bank terpaksa harus memberikan insentif yang sangat tinggi dan terkadang nilainya diatas kemampuan bank untuk mencegah penarikan yang semakin besar oleh masyarakat. Struktur bunga yang tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan bank akan mengurangi rentabilitas bank dan pada akhirnya mendatangkan kerugian yang besar sebagaimana yang terjadi pada krisis keuangan tahun 1997 (Gopalan dan Rajan, 2009).

Dilihat dari komposisinya, dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank masih didominasi oleh deposito dengan pangsa sebesar 43,78 persen pada tahun 2013, sementara giro dan tabungan masing-masing memiliki pangsa sebesar 23,11 persen dan 33,10 persen (lihat Gambar 4.3). Terjadi pertumbuhan DPK sebesar Rp 2.869,1 triliun

(361,2 persen) selama periode 2001 hingga 2013 dimana peningkatan deposito menunjukkan peningkatan dengan nominal tertinggi namun dengan persentase terendah dibandingkan dengan kedua komponen DPK lainnya. Peningkatan deposito tersebut mengindikasikan bahwa terjadi perubahan minat masyarakat dari penanaman jangka pendek ke penanaman jangka panjang yang dipicu oleh tingginya suku bunga deposito yang ditawarkan oleh beberapa bank.

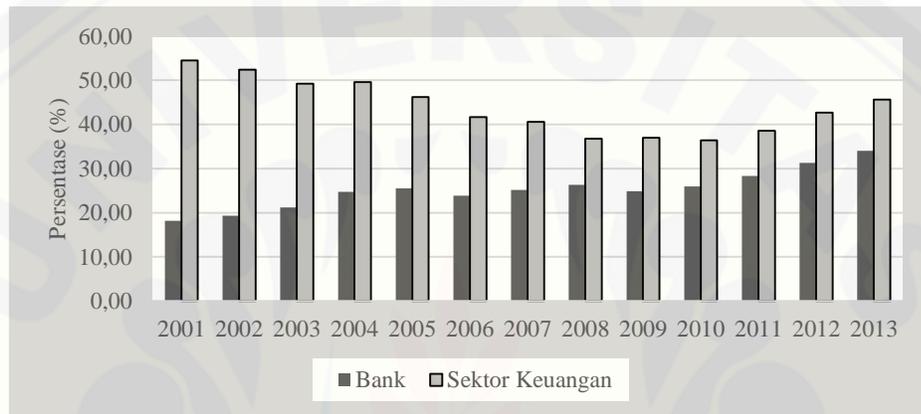


Gambar 4.3 Perkembangan performa perbankan dalam menghimpun DPK (Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia, diolah)

Meskipun dana pihak ketiga yang dihimpun sangat besar, namun jika tidak diimbangi dengan tambahan modal maka akan menyebabkan terbatasnya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank (Siringoringo, 2012). Disisi lain, pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank sebagai sumber pendanaan utama melalui kredit. Rasio penyaluran kredit oleh perbankan dan sektor keuangan secara umum terhadap PDB menunjukkan tren perkembangan yang berbeda. Jika rasio kredit sektor keuangan cenderung menurun, sebaliknya rasio kredit bank menunjukkan peningkatan selama periode pengamatan (lihat Gambar 4.4).

Besarnya rasio kredit sektor keuangan tahun 2001 adalah 54,47 persen dari total PDB, terus menurun hingga tahun 2010 mencapai 36,39 persen, dan kembali meningkat perlahan menjadi 45,64 persen tahun 2013. Di sisi lain, rasio kredit bank terhadap PDB adalah 18,16 persen tahun 2001 meningkat menjadi 34,02 persen pada

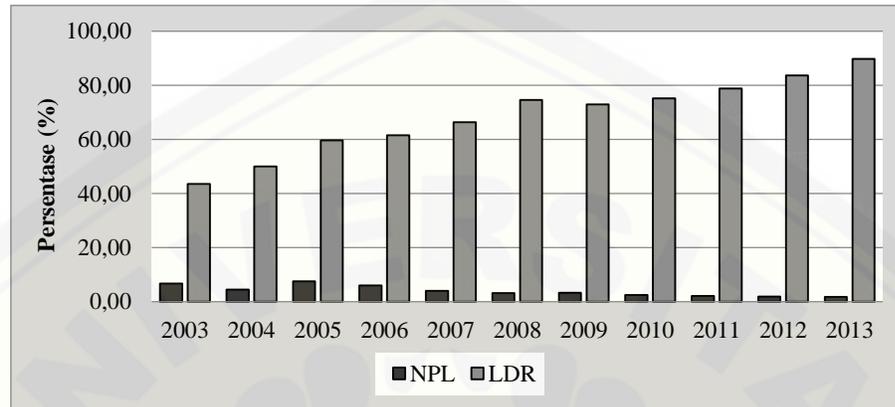
tahun 2013. Peningkatan rasio kredit bank terhadap PDB menunjukkan bahwa peran perbankan dalam pembangunan nasional semakin meningkat. Namun, rasio tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang telah berada diatas 100 persen. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat suku bunga kredit dan biaya dana (*cost of fund*) perbankan di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain.



Gambar 4.4 Rasio penyaluran kredit perbankan dan sektor keuangan terhadap GDP (Sumber: World Bank, 2015)

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit adalah rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) dan kredit macet (NPL) (lihat Gambar 4.5). Rivai, *et al* (2012) memaparkan bahwa rasio LDR mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Secara umum perkembangan kinerja perbankan Indonesia berdasarkan rasio LDR mengalami peningkatan selama periode 2001-2013 yaitu dari 43,52 persen menjadi 89,70 persen. Jika mengacu pada batas LDR yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu 110 persen, maka performa perbankan Indonesia dari sisi likuiditas selama 2003-2013 masih dalam kriteria baik (sehat). Sebaliknya, indikator yang menggambarkan rasio kredit yang bermasalah

terhadap total kredit yaitu *Non-Performing Loan* (NPL) menunjukkan tren menurun secara berkelanjutan dari 6,78 persen tahun 2003 menjadi 1,77 persen tahun 2013.



Gambar 4.5 Perkembangan rasio NPL dan LDR Bank Umum Konvensional (Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2014 diolah)

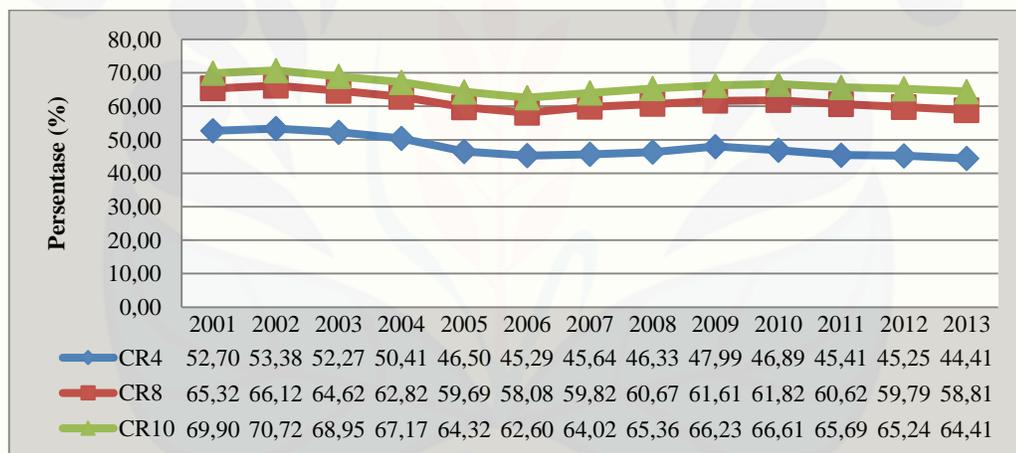
Meningkatnya fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari peningkatan DPK yang dihimpun dan kredit yang disalurkan serta perbaikan kinerja perbankan sebagaimana yang ditunjukkan oleh indikator-indikator kinerjanya dianggap sebagai dampak dari berbagai kebijakan deregulasi sejak tahun 1983. Deregulasi tersebut diyakini pula berhasil menurunkan tingkat konsentrasi sehingga meningkatkan efisiensi industri perbankan di Indonesia (Lubis, 2012).

#### 4.2 Analisis Eklektik Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia

Subbab 4.2 ini memaparkan hasil analisis eklektik untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu seberapa besar derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia. Variabel yang digunakan untuk mengukur derajat konsentrasi tersebut terdiri dari total aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank dan kredit yang disalurkan oleh bank. Ketiga variabel tersebut akan diukur menggunakan tiga indeks konsentrasi yaitu *k-bank concentration ratio* (CRk), *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) serta Kurva Lorenz dan Koefisien Gini.

#### 4.2.1 Hasil Perhitungan *k-bank Concentration Ratio* (CR<sub>k</sub>)

*Concentration Ratio* didefinisikan sebagai persentase dari keseluruhan output industri yang dihasilkan oleh firm-firm besar. Pengukuran *k-bank concentration ratio* (CR<sub>k</sub>) sering digunakan untuk menjelaskan kinerja kompetitif industri perbankan sebagai hasil dari struktur pasar yang ada (Bikker dan Haaf, 2002a). Tidak ada aturan baku untuk menentukan jumlah bank *k* yang digunakan dalam menghitung CR, namun semakin banyak jumlah bank dalam industri maka hasil perhitungan CR<sub>k</sub> akan semakin menurun. Penelitian ini menggunakan tiga rasio konsentrasi yang mewakili empat bank terbesar (CR<sub>4</sub>), delapan bank terbesar (CR<sub>8</sub>) dan sepuluh bank terbesar (CR<sub>10</sub>) dalam industri perbankan Indonesia, dan masing-masing rasio akan dihitung berdasarkan variabel yang mewakili indikator utama perbankan yaitu total aset, DPK dan kredit.



Gambar 4.6 Perkembangan CR<sub>4</sub>, CR<sub>8</sub> dan CR<sub>10</sub> pangsa aset periode 2001-2013 (Sumber: Lampiran A1, diolah)

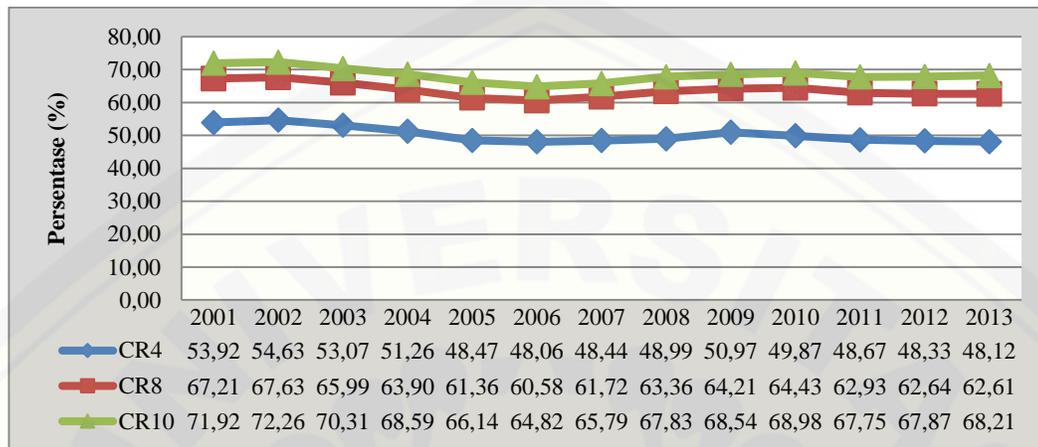
Hasil perhitungan ketiga rasio konsentrasi tersebut terhadap total aset menunjukkan bahwa pasar aset perbankan Indonesia masih dikuasai oleh empat bank terbesar sebagaimana ditunjukkan oleh nilai CR<sub>4</sub> yang berkisar antara 44,41-53,38 persen selama periode pengamatan (lihat Lampiran A1: hal 97). Penambahan empat bank kedalam perhitungan rasio konsentrasi menunjukkan perubahan nilai dari CR<sub>4</sub> sebesar 52,70 persen menjadi CR<sub>8</sub> 65,32 persen tahun 2001, dan CR<sub>4</sub> 44,41 persen

menjadi CR8 58,81 persen tahun 2013, yang berarti bahwa penambahan 4 bank menghasilkan peningkatan pangsa pasar sebesar 12-15 persen selama periode pengamatan. Senada dengan hal tersebut, penambahan jumlah bank dari delapan bank menjadi sepuluh bank terbesar kembali menunjukkan peningkatan yang tidak terlalu besar dari CR8 sebesar 65,32 persen menjadi CR10 69,90 persen tahun 2001, dan CR8 58,81 persen menjadi CR10 64,41 persen tahun 2013. Dengan demikian penambahan dua bank menghasilkan peningkatan pangsa pasar sebesar 4-6 persen selama periode pengamatan.

Berpijak pada hasil perhitungan rasio konsentrasi CR4, CR8 dan CR10, maka dapat diketahui perubahan struktur pasar industri perbankan Indonesia selama periode pengamatan. Pada periode 2001-2004, nilai CR4, CR8 dan CR10 adalah diatas 50 persen (*secondary concentration*) yang berarti bahwa aset industri perbankan dikuasai oleh beberapa bank terbesar saja dan hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar industri perbankan Indonesia pada periode tersebut adalah oligopoli. Pada periode 2005-2006 nilai CR4, CR8 dan CR10 mengalami penurunan, namun kembali meningkat selama periode 2007-2010 dan kembali turun pada periode 2011-2013. Meskipun cukup berfluktuasi, namun perubahan nilai CR8 dan CR10 tersebut tidak menyebabkan perubahan struktur pasar yang ada karena masih diatas 50 persen yang berarti tetap berada pada struktur pasar oligopoli. Dengan demikian secara keseluruhan diketahui bahwa struktur pasar aset industri perbankan nasional selama periode pengamatan berada pada kondisi persaingan oligopoli, hanya saja terjadi pergeseran dari oligopoli ketat menuju oligopoli longgar sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan CR4 dari 52,70 persen tahun 2001 menjadi 44,41 persen tahun 2013.

Variabel kedua yang digunakan untuk mengukur rasio konsentrasi industri perbankan Indonesia adalah DPK. Dalam hal ini DPK menggambarkan kemampuan bank dalam menghimpun dana dari pihak ketiga berbentuk giro, tabungan dan deposito, baik dalam rupiah maupun valas. Hasil perhitungan CR4, CR8 dan CR10 DPK cenderung memiliki tren yang sama dengan total aset, yaitu menurun di awal periode

pengamatan, kemudian sedikit meningkat pada periode pertengahan dan kembali turun perlahan di akhir periode pengamatan.

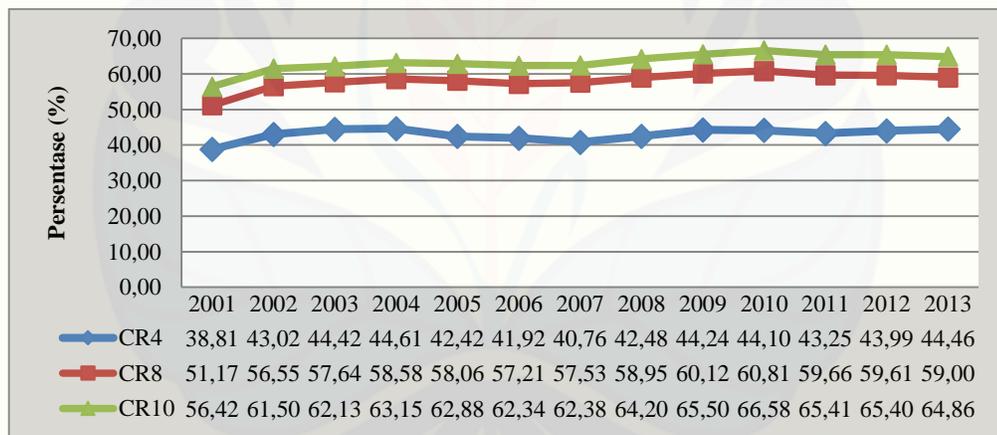


Gambar 4.7 Perkembangan CR4, CR8 dan CR10 pangsa DPK periode 2001-2013 (Sumber: Lampiran A2, diolah)

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa hasil perhitungan ketiga rasio konsentrasi CR4, CR8, dan CR10 DPK dikuasai oleh empat bank terbesar (lihat Lampiran A2: hal 100). Penambahan empat bank kedalam perhitungan rasio konsentrasi hanya menunjukkan peningkatan pangsa pasar DPK sebesar 13-15 persen selama periode pengamatan sebagaimana ditunjukkan oleh perubahan nilai CR4 dari 53,92 persen menjadi CR8 67,21 persen tahun 2001, dan CR4 48,12 persen menjadi CR8 62,61 persen tahun 2013. Senada dengan hal tersebut, penambahan kembali sejumlah dua bank dalam perhitungan menghasilkan peningkatan yang tidak terlalu besar pada penguasaan DPK perbankan yaitu sebesar 4-6 persen, dari CR8 67,21 persen menjadi CR10 71,92 persen tahun 2001, dan CR8 62,61 persen menjadi CR10 68,21 persen tahun 2013. Oleh karena itu bentuk struktur pasar perbankan berdasarkan DPK tidak berbeda dengan pangsa aset yaitu persaingan oligopoli, hanya saja terjadi pergeseran dari oligopoli ketat menjadi oligopoli longgar sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan nilai ketiga rasio konsentrasi selama periode pengamatan.

Indikator berikutnya adalah pasar kredit, yang merupakan pasar ketiga yang digunakan untuk mengukur derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia.

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, hasil perhitungan CR4, CR8 dan CR10 kredit lebih berfluktuatif dan cenderung memiliki tren meningkat selama periode pengamatan. Gambar 4.8 memaparkan bahwa pasar kredit industri perbankan di Indonesia tahun 2001-2004 semakin terkonsentrasi secara terus menerus sebagaimana ditunjukkan oleh nilai CR4 yang semakin meningkat dari 38,81 persen menjadi 44,61 persen pada tahun 2004, kemudian turun hingga menjadi 40,76 persen tahun 2007, dan kembali meningkat perlahan sejak 2008 hingga menjadi 44,46 persen pada 2013. Tren yang sama ditunjukkan oleh CR8 dan CR10 yakni meningkat di awal periode hingga tahun 2004, kemudian turun selama dua tahun berturut-turut menjadi CR8 57,21 persen dan CR10 62,34 persen tahun 2006. Ketika CR4 kembali turun tahun 2007, nilai CR8 dan CR10 justru meningkat hingga tahun 2010, dan kembali berfluktuasi pada tiga tahun terakhir periode pengamatan sehingga diperoleh nilai CR8 sebesar 59,00 persen dan CR 10 sebesar 64,86 persen pada tahun 2013.

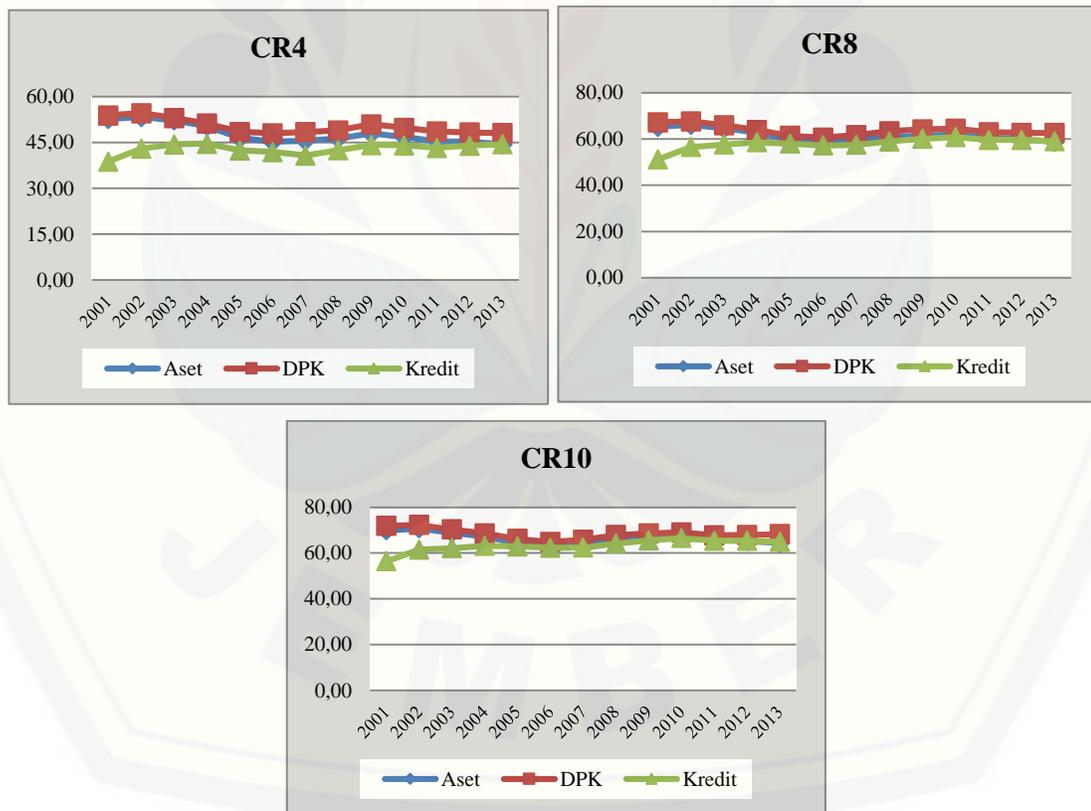


Gambar 4.8 Perkembangan CR4, CR8 dan CR10 pangsa kredit periode 2001-2013 (Sumber: Lampiran A.3, diolah)

Hasil perhitungan pangsa kredit berdasarkan ketiga rasio konsentrasi tersebut menunjukkan bahwa penguasaan pangsa kredit oleh keempat bank terbesar di Indonesia masih tidak terlalu besar (lihat Lampiran A3: hal 103), terbukti dengan nilai CR4 yang masih dibawah 50 persen (*low concentration*) selama periode pengamatan. Penambahan empat bank kedalam perhitungan meningkatkan pangsa kredit sebesar 12-

15 persen sebagaimana ditunjukkan oleh perubahan nilai CR4 dari 38,81 persen menjadi CR8 51,17 persen tahun 2001, dan CR4 44,46 persen menjadi CR8 59,00 persen pada tahun 2013. Kemudian, penambahan dua bank dalam perhitungan dari delapan bank menjadi sepuluh bank terbesar kembali menunjukkan peningkatan yang tidak terlalu besar yaitu 5-6 persen selama periode pengamatan sebagaimana perubahan CR8 dari 51,17 persen menjadi CR10 56,42 persen tahun 2001, dan CR8 59,00 persen menjadi CR10 64,86 persen tahun 2013. Bertumpu pada hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa struktur pasar industri perbankan berdasarkan pangsa kredit selama periode pengamatan berada pada kondisi pasar oligopoli.

Berdasarkan hasil perhitungan CR4, CR8 dan CR10 terhadap variabel aset, DPK dan kredit dapat diketahui perkembangan penguasaan pangsa pasar atas ketiga variabel tersebut setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada Gambar 4.9 berikut:



Gambar 4.9 Perkembangan CR4, CR8 dan CR10 pasar aset, DPK dan kredit (Sumber: Lampiran A, diolah)

Bertolak pada Gambar 4.9 diatas, dapat disimpulkan bahwa tren menurun yang ditunjukkan oleh CR4, CR8 dan CR10 variabel aset dan DPK menunjukkan bahwa pasar aset dan DPK industri perbankan Indonesia mengalami penurunan derajat konsentrasi, sebaliknya tren meningkat yang ditunjukkan CR4, CR8 dan CR10 kredit mengindikasikan bahwa pangsa kredit industri perbankan semakin terkonsentrasi selama periode pengamatan. Namun demikian, terlepas dari tren konsentrasi yang ditunjukkan oleh ketiga pasar tersebut dapat disimpulkan pula bahwa derajat konsentrasi tertinggi terdapat pada pasar DPK sedangkan pasar dengan tingkat konsentrasi terendah adalah pasar kredit.

Ditinjau berdasarkan kelompok bank, penguasaan aset terbesar selama periode pengamatan dikuasai oleh kelompok Bank Persero dengan rata-rata penguasaan aset sebesar 39,80 persen, disusul oleh BUSN Devisa dengan 37,90 persen di posisi kedua. Dari sisi penguasaan DPK dan pasar kredit, kelompok Bank Persero dan BUSN Devisa memiliki rata-rata pangsa DPK yang sama kuat yaitu 40 persen sedangkan untuk pasar kredit sebesar 38,19 persen untuk bank persero dan 37,70 persen untuk BUSN Devisa (lihat Lampiran A4: hal 106). Dominasi kelompok Bank Persero dalam menguasai pangsa pasar industri perbankan Indonesia juga diperkuat dengan komposisi empat bank terbesar (CR4) yang menguasai pangsa aset, DPK dan kredit selama periode pengamatan, dimana tiga diantaranya adalah bank milik pemerintah (Bank Persero) dan satu bank berasal dari kelompok BUSN Devisa (lihat Lampiran A). Proporsi rata-rata penguasaan pasar keempat bank tersebut tersaji sebagai berikut:

Tabel 4.3 Proporsi rata-rata pangsa pasar bank di Indonesia

No	Nama Bank	Rata-rata Pangsa Pasar (%)		
		Aset	DPK	Kredit
1.	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	16,98	16,98	14,00
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	10,49	11,04	12,16
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	9,62	9,91	8,80
4.	PT Bank Central Asia, Tbk.	10,79	12,29	7,97
5.	Bank Lainnya	52,12	49,79	57,06
	Total	100,00	100,00	100,00

melalui informasi yang tersaji pada Tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa keempat bank terbesar memiliki total rata-rata penguasaan aset sebesar 47,88 persen, total rata-rata pangsa DPK sebesar 50,21 persen, dan total rata-rata pangsa kredit sebesar 42,94 persen, sedangkan sisanya tersebar pada lebih dari 100 bank lainnya yang ada pada industri perbankan nasional. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa terjadi ketidakmerataan penguasaan pasar yang masih cukup besar pada industri perbankan di Indonesia.

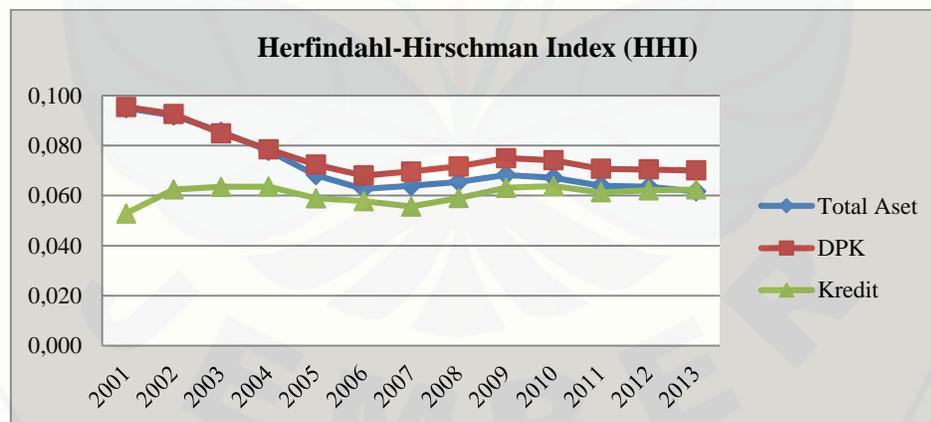
#### 4.2.2 Hasil Perhitungan *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI)

Perhitungan menggunakan HHI merupakan pendekatan struktural yang diartikan sebagai penjumlahan kuadrat pangsa pasar yang dimiliki oleh setiap bank dalam industri dengan tujuan untuk mengukur derajat konsentrasi industri perbankan. Berbeda dengan perhitungan CRk sebelumnya, perhitungan HHI tidak hanya menggunakan beberapa bank terbesar saja, melainkan menggunakan seluruh bank yang ada dalam industri. Tabel 4.4 berikut memaparkan hasil perhitungan HHI berdasarkan pasar aset, DPK dan kredit selama periode 2001-2013.

Tabel 4.4 Hasil perhitungan HHI

Tahun	HHI		
	Aset	DPK	Kredit
2001	0,095	0,095	0,053
2002	0,092	0,093	0,062
2003	0,086	0,085	0,064
2004	0,078	0,078	0,064
2005	0,068	0,072	0,059
2006	0,063	0,068	0,058
2007	0,064	0,070	0,056
2008	0,065	0,072	0,059
2009	0,068	0,075	0,063
2010	0,067	0,074	0,064
2011	0,064	0,071	0,061
2012	0,064	0,070	0,062
2013	0,062	0,070	0,062

Hasil perhitungan HHI aset, DPK dan kredit menunjukkan nilai yang berfluktuasi setiap tahunnya selama periode pengamatan. Pada Tabel 4.5 tersebut terlihat bahwa HHI aset tahun 2001 adalah sebesar 0,095. Sejak tahun 2002 terjadi penurunan nilai HHI secara terus menerus hingga menjadi 0,063 tahun 2006, kembali meningkat selama tiga tahun berturut-turut menjadi 0,068 pada tahun 2009, dan kembali turun hingga mencapai 0,062 pada tahun 2013. Hasil perhitungan HHI DPK menunjukkan tren perubahan yang sama dengan HHI aset yaitu mengalami penurunan secara terus-menerus dari 0,095 pada 2001 menjadi 0,068 pada 2006, atau dengan kata lain terdapat penurunan HHI DPK sebesar 0,027 dalam kurun waktu enam tahun. HHI DPK kembali meningkat menjadi 0,075 pada tahun 2009, kemudian kembali turun menjadi 0,070 pada tahun 2013. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh HHI kredit dimana terjadi peningkatan nilai HHI di awal periode pengamatan dari 0,053 pada 2001 menjadi 0,064 tahun 2004, kemudian berubah menjadi 0,056 tahun 2007 yang mengindikasikan terjadinya penurunan HHI sebesar 0,008. Sejak tahun 2008, HHI kredit meningkat secara terus menerus yang pada akhirnya menghasilkan nilai sebesar 0,062 pada tahun 2013, meskipun sempat turun sebesar 0,003 pada tahun 2011.

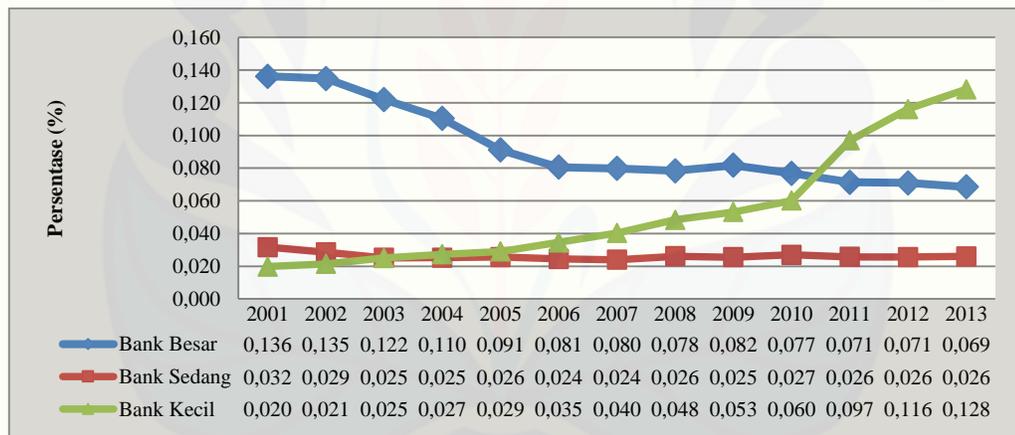


Gambar 4.10 Perkembangan HHI pasar aset, DPK dan kredit periode 2001-2013

Gambar 4.10 diatas menunjukkan bahwa HHI pasar aset dan DPK memiliki tren menurun selama periode pengamatan, sebaliknya HHI pasar kredit menunjukkan tren yang meningkat. Turunnya nilai HHI pasar aset dan DPK mengindikasikan bahwa

konsentrasi di pasar aset dan DPK semakin menurun atau dengan kata lain kondisi persaingan di kedua pasar tersebut menjadi semakin kompetitif. Namun sebaliknya, tren meningkat yang ditunjukkan oleh HHI pasar kredit menunjukkan bahwa pasar semakin terkonsentrasi selama periode pengamatan. Selain itu, melalui Gambar 4.10 tersebut dapat disimpulkan pula bahwa pasar DPK merupakan pasar dengan derajat konsentrasi tertinggi, sedangkan pasar kredit memiliki derajat konsentrasi terendah dan merupakan pasar yang paling kompetitif dibandingkan kedua pasar lainnya.

HHI dapat pula dihitung secara lebih rinci untuk melihat perubahan konsentrasi dengan mengelompokkan bank berdasarkan ukuran bank yang terdiri atas bank berukuran besar (total aset  $\geq 10$  triliun rupiah), bank berukuran sedang (total aset antara 1 triliun - 10 triliun rupiah) dan bank berukuran kecil (total aset  $< 1$  triliun rupiah) sebagai berikut:



Gambar 4.11 Perkembangan HHI berdasarkan kategori ukuran bank periode 2001-2013

Berpijak pada paparan Gambar 4.11 terlihat bahwa tingkat konsentrasi bank besar mengalami penurunan cukup besar dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013, yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah bank yang memiliki aset diatas 10 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa persaingan bank-bank besar menjadi lebih kompetitif. Di pihak lain, nilai HHI bank berukuran sedang cenderung stabil selama periode pengamatan yang berarti bahwa tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan

pada persaingan bank-bank berukuran sedang. Sebaliknya, nilai HHI bank kecil mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 0,020 di tahun 2001 menjadi 0,128 tahun 2013, yang berarti bahwa tingkat konsentrasi bank kecil semakin tinggi dan persaingan antar bank kecil menjadi kurang kompetitif.

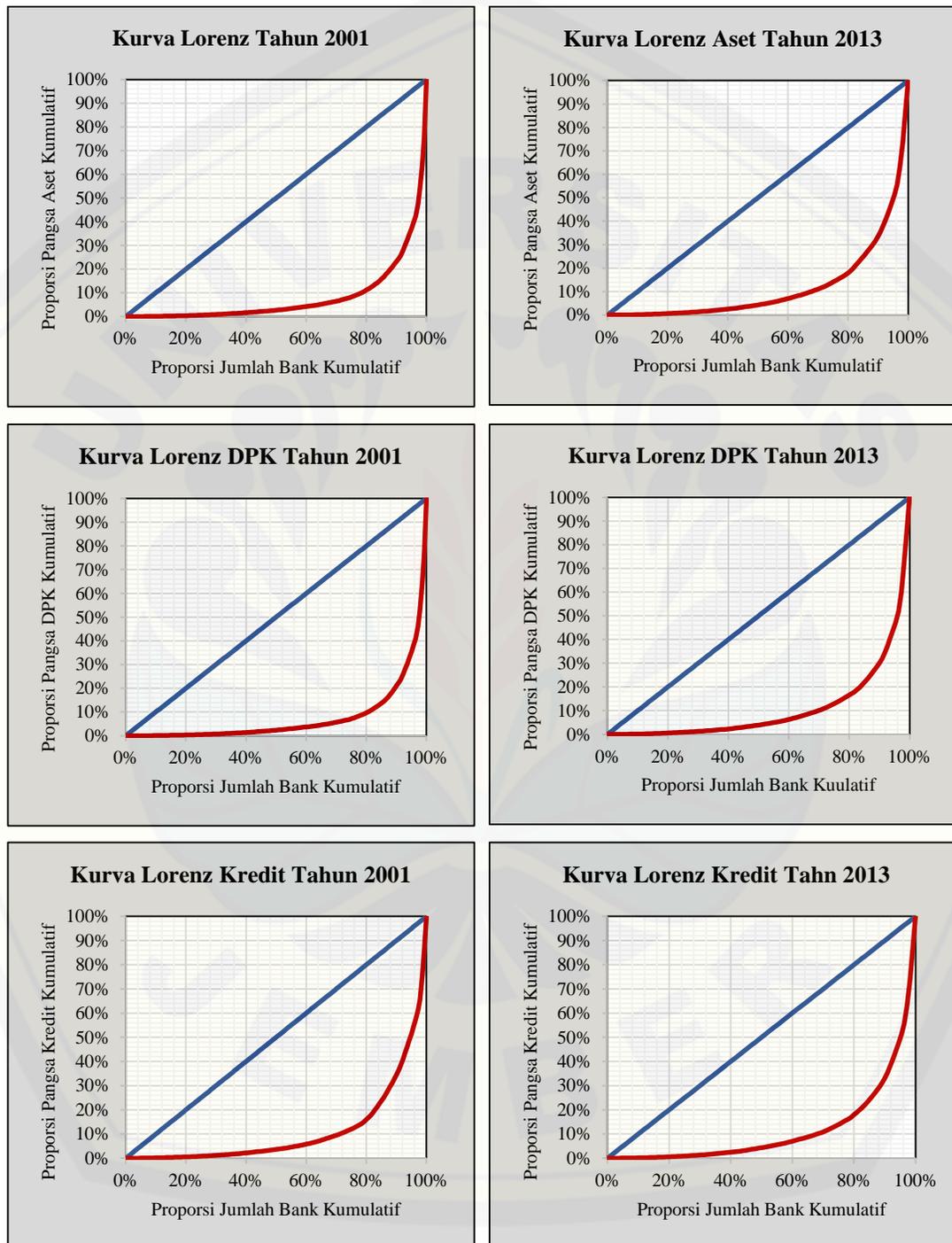
#### 4.2.3 Bentuk Kurva Lorenz dan Hasil Perhitungan Koefisien Gini

Selain menggunakan CRk dan HHI, penelitian ini juga menggunakan Kurva Lorenz dan Koefisien Gini untuk mengukur ketimpangan (*inequality*) yang ada pada industri perbankan di Indonesia. Koefisien gini diartikan sebagai rasio atau perbandingan luas daerah antara kurva Lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah segitiga di bawah garis 45 derajat tersebut dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Dari hasil perhitungan terhadap variabel aset, DPK dan kredit industri perbankan Indonesia tahun 2001-2013, diperoleh nilai Koefisien Gini seperti yang tersaji pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Hasil perhitungan Koefisien Gini tahun 2001-2013

Tahun	Koefisien Gini		
	Aset	DPK	Kredit
2001	0,840	0,852	0,781
2002	0,835	0,845	0,791
2003	0,825	0,835	0,792
2004	0,816	0,824	0,794
2005	0,803	0,814	0,792
2006	0,791	0,803	0,788
2007	0,791	0,805	0,785
2008	0,792	0,807	0,788
2009	0,788	0,804	0,786
2010	0,785	0,800	0,786
2011	0,777	0,790	0,778
2012	0,773	0,789	0,774
2013	0,769	0,787	0,771

Apabila distribusi pangsa pasar divisualisasikan, maka akan diperoleh Kurva Lorenz sebagai berikut:

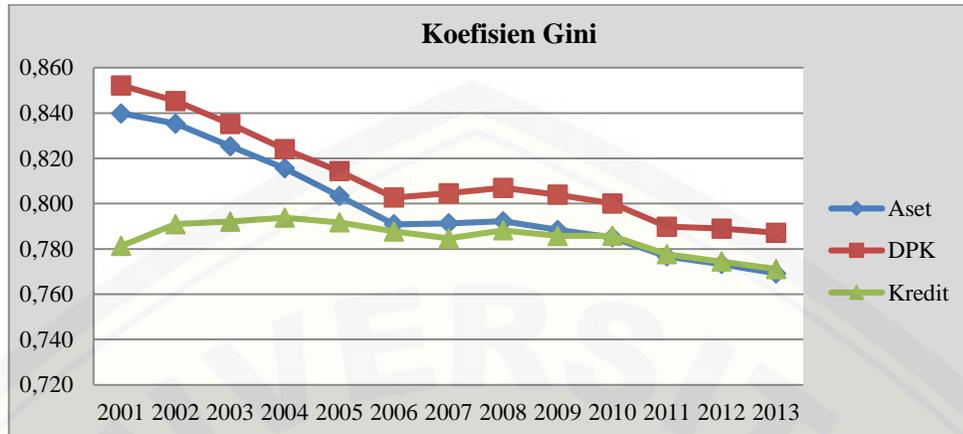


Gambar 4.12 Kurva Lorenz Aset, DPK dan Kredit Tahun 2001-2013 (Sumber: Lampiran B: hal 107)

Hasil perhitungan berdasarkan bentuk Kurva Lorenz tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2001 Koefisien Gini pasar aset bernilai 84,0 persen yang mengindikasikan bahwa terdapat ketimpangan yang sangat besar antara pangsa aset bank besar dan bank kecil. Selama kurun waktu 13 tahun, terjadi penurunan rasio ketimpangan secara terus-menerus sebesar 7,1 persen, akan tetapi penurunan tersebut belum berdampak signifikan terhadap ketimpangan yang ada di pasar aset, terbukti dengan nilai Koefisien Gini yang masih cukup besar di akhir periode pengamatan yaitu 76,9 persen. Dengan nilai Koefisien Gini yang lebih dari 50 persen ( $>0,5$ ) menunjukkan bahwa pasar aset industri perbankan Indonesia memiliki tingkat ketimpangan berat.

Ketimpangan pangsa DPK juga masih sangat besar pada tahun 2001 yaitu 85,2 persen. Selama periode 2001-2013 terjadi penurunan Koefisien Gini dengan total 6,5 persen sehingga nilai koefisien gini DPK berubah menjadi 78,7 persen pada tahun 2013. Nilai tersebut masih tergolong tinggi (diatas 50 persen) yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pasar DPK tidak berubah secara signifikan selama kurun waktu tigabelas tahun yaitu tetap pada tingkat ketimpangan berat. Di sisi lain, ketimpangan pangsa kredit meningkat di awal tahun pengamatan seperti yang ditunjukkan oleh hasil perhitungan Koefisien Gini yaitu dari 78,1 persen tahun 2001 meningkat menjadi 79,4 persen tahun 2004 (lihat Tabel 4.6). Nilai tersebut berangsur turun sejak tahun 2005 hingga 2013 yaitu dari 79,2 persen menjadi 77,1 persen. Namun, Koefisien Gini yang masih diatas 50 persen menunjukkan bahwa ketimpangan pangsa kredit masih tergolong berat dan tidak berubah secara signifikan selama tigabelas tahun terakhir.

Jika hasil perhitungan Koefisien Gini pada ketiga pasar tersebut dibandingkan, maka diketahui bahwa ketimpangan pada ketiga pasar tersebut masih tergolong ketimpangan berat, namun memiliki tren menurun yang mengindikasikan bahwa distribusi pangsa pasar mengalami perbaikan setiap tahunnya. Selain itu dapat disimpulkan bahwa pasar DPK memiliki tingkat ketimpangan terbesar, sebaliknya tingkat ketimpangan terkecil terdapat pada pasar kredit (lihat Gambar 4.13).



Gambar 4.13 Perkembangan Koefisien Gini berdasarkan pasar aset, DPK dan kredit

#### 4.3 Preskripsi Keterkaitan antara Pengaturan dan Pengawasan Bank dengan Perilaku dan Kinerja Industri Perbankan di Indonesia

Konsepsi sebuah pengaturan dan pengawasan bank cukup mendapat perhatian besar di berbagai negara terutama negara berkembang di kawasan Asia pasca terjadinya krisis keuangan di akhir tahun 1990an. Perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem pengaturan dan pengawasan perbankan telah dilakukan oleh negara-negara tersebut sebagai upaya menjaga dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan pada umumnya, khususnya industri perbankan (Barth *et al*, 2002, 2008; Čihák *et al*, 2012). Berpijak pada peran penting bank dalam perekonomian baik sebagai lembaga intermediasi keuangan, bagian dari sistem pembayaran, maupun sebagai media transmisi kebijakan moneter bank sentral, serta besarnya dana yang dibutuhkan dan risiko kerugian yang akan ditanggung oleh pemerintah dan perekonomian untuk mengkompensasi dampak runtuhnya industri perbankan memperkuat alasan diperlukannya pengaturan dan pengawasan industri perbankan

Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999 bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan di Indonesia (Siregar dan Williams, 2004). Namun, krisis keuangan tahun 1997/1998 yang diindikasikan terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan perbankan oleh bank sentral memunculkan gagasan untuk melepaskan fungsi pengaturan dan

pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada suatu lembaga pengawas jasa keuangan (LPJK) (Pradiptyo, *et al*, 2011). Penciptaan sistem pengaturan yang efektif dan sistem pengawasan yang independen dan efektif sebagaimana tertuang dalam pilar kedua dan ketiga API serta berbagai kasus *moral hazard* yang melibatkan sejumlah bank selama periode 2001-2009 semakin membuktikan lemahnya pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan dan memperkuat rencana pengalihan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan ke LPJK. Dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) merupakan langkah awal perpindahan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan industri perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Subbab 4.3 ini akan memaparkan keterkaitan antara sistem pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia dan OJK dengan perilaku dan kinerja industri perbankan di Indonesia.

#### 4.3.1 Sistem Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia

Setiap negara memiliki sistem pengawasan sektor keuangan dan industri perbankan yang berbeda-beda dilatarbelakangi oleh kondisi (*landscape*) perekonomian dan pengalaman sejarah yang berbeda di setiap negara (AMRO, 2014). Sistem pengawasan sektor keuangan suatu negara meliputi struktur pengawasan, ruang lingkup pengawasan dan independensi lembaga pengawas di negara tersebut. Penentuan struktur pengawasan yang dianut suatu negara dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan (Barth *et al*, 2002; Hussain, 2009).

Suatu negara dikategorikan memiliki struktur pengawasan multi-lembaga (*multiple-agencies approach*) apabila terdapat satu lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi satu pasar/industri, dan dikatakan menganut struktur pengawasan terpadu (*integrated approach*) apabila hanya terdapat satu lembaga tunggal untuk mengawasi semua pasar/industri keuangan. Selain itu terdapat pula pendekatan semi-terpadu atau *hybrid* dimana satu lembaga pengawas bertanggung jawab mengawasi lebih dari satu pasar keuangan/industri tetapi tetap melibatkan lebih dari satu lembaga dalam

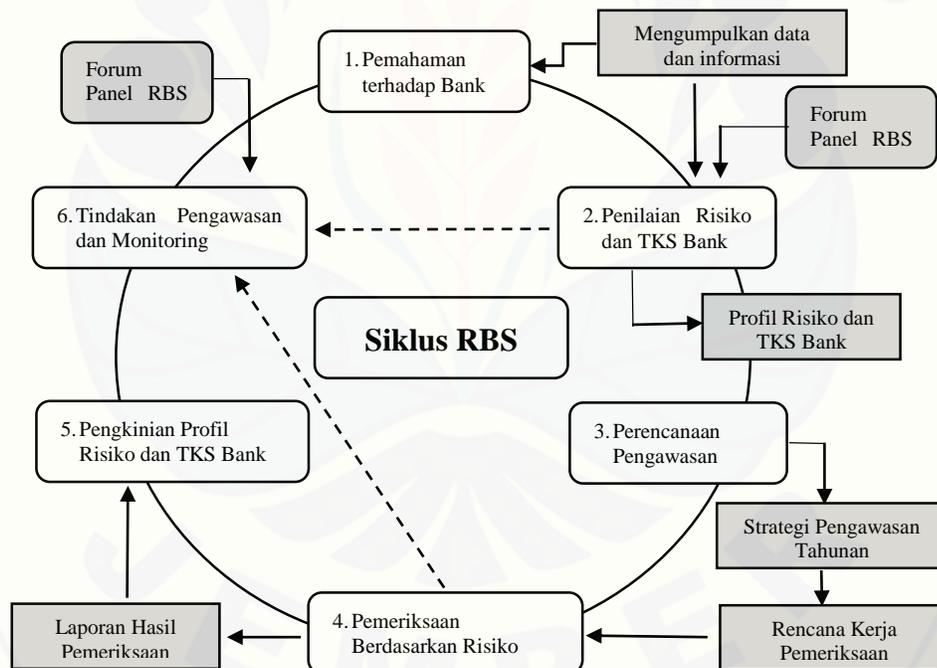
pengawasan keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan pernyataan tersebut struktur pengawasan sektor keuangan di Indonesia hingga tahun 2012 tergolong sebagai sistem pengawasan *multiple-agencies approach* karena melibatkan lebih dari satu lembaga dalam pengawasan sektor keuangan.

Fungsi pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia selama ini telah dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu Bank Indonesia yang bertanggung jawab industri perbankan dan Bapepam-LK yang bertanggung jawab atas pasar modal, lembaga asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Pradipto, *et al*, 2010, 2011; Lestari, 2012). Fungsi pengaturan dan pengawasan industri perbankan telah dilakukan Bank Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip pengaturan dan pengawasan bank berbasis kehati-hatian (*banking prudential principles*) yang mengacu pada *25 Core Principles on Effective Banking Supervision* (lihat Lampiran D: hal 134). Implementasi prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha dan pengelolaan bank secara sehat, meminimalisir risiko kegagalan bank terutama yang bersifat sistemik sehingga mendatangkan *multiplier effect* yang besar bagi perputaran perekonomian Indonesia.

Ruang lingkup Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan bank tercermin melalui empat kewenangan yang dimilikinya (Bank Indonesia, 2012). Pertama, kewenangan memberikan izin (*right to license*) yaitu berhak menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank meliputi pembukaan, penutupan, pemindahan, kepemilikan dan izin melakukan kegiatan usaha tertentu, termasuk keputusan untuk melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi. Kewenangan kedua adalah kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*) yang mencakup pengaturan kesehatan industri perbankan secara keseluruhan (*macroprudential*) maupun kesehatan individual bank (*microprudential*). Pengaturan tersebut berbentuk seperangkat ketentuan yang mengatur keberadaan dan kegiatan operasional bank meliputi peraturan permodalan hingga perlindungan konsumen yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pengaturan aspek permodalan bank selama ini telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip Basel II yang merupakan hasil

penyempurnaan *Basel Capital Accord* tahun 1988 dengan persyaratan CAR minimum sebesar 8 persen dan peningkatan transparansi bank kepada masyarakat dan para investor sebagai upaya penciptaan disiplin pasar (Riva'i, *et al*, 2012:11).

Ketiga, kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) menggunakan pendekatan pengawasan berbasis kepatuhan (*compliance based supervision/CBS*) dan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision/RBS*). Paradigma CBS mengacu pada kondisi bank di masa lalu yang menekankan pada pemantauan kepatuhan bank dalam melaksanakan berbagai aturan operasi dan pengelolaan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Sebaliknya, RBS merupakan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*) dan difokuskan pada risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus sebagai berikut:



Gambar 4.14 Siklus Pengawasan Risiko (Sumber: Bank Indonesia, 2012)

Prinsip-prinsip pengawasan bank berbasis risiko mulai diadopsi oleh Bank Indonesia sejak tahun 2004. Model pengawasan ini dipandang sebagai konsep

pengawasan yang komprehensif dan dinamis yang tidak hanya melihat kondisi perbankan pada saat ini namun telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan di masa depan termasuk menilai kemampuan bank mengantisipasi dan menghadapi potensi risiko terhadap individu bank maupun dampaknya terhadap sistem perbankan secara menyeluruh. Kegiatan pengawasan ini dilakukan baik secara langsung (*on-site supervision*) dengan mendatangi dan memeriksa bank, maupun secara tidak langsung (*off-site supervision*) melalui laporan yang disampaikan bank pada periode tertentu.

Pada tahun 2010, cakupan pengawasan industri perbankan yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dalam pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung meliputi bank umum konvensional, bank syariah, BPR dan BPR syariah dengan total 1.868 kantor dengan melibatkan 1.437 staf pengawas. Setiap bank diawasi oleh satu tim yang jumlahnya bervariasi tergantung pada ukuran dan kondisi masing-masing bank. Bank kategori besar dengan aset diatas Rp 10 triliun akan diawasi oleh 13 orang pengawas; bank kategori sedang (aset Rp 1 triliun – Rp 10 triliun) diawasi oleh tujuh-delapan orang pengawas; bank kategori kecil (aset kurang dari Rp 1 triliun) diawasi oleh lima-enam orang pengawas; sedangkan BPR akan diawasi oleh dua-tiga orang pengawas. Adapun periode pengawasan kantor pusat memerlukan waktu selama 35 hari dalam satu tahun, sedangkan kantor cabang memerlukan waktu 4-6 hari. Namun, jumlah pengawas dan periode pengawasan dapat bertambah apabila sebuah bank mengalami permasalahan khusus (Pradiptyo, *et al*, 2010).

Pengawasan bank berdasarkan risiko memerlukan waktu yang lebih panjang karena terdiri dari banyak kriteria meliputi delapan risiko perbankan. Selain kriteria risiko yang cukup beragam, tantangan lain yang dihadapi oleh pengawas adalah perbedaan sistem inti (*core banking system*) yang dimiliki oleh masing-masing bank (Pradiptyo, *et al*, 2010). Dengan bank umum berjumlah 120 bank tahun 2011, berarti Bank Indonesia telah menghadapi 120 sistem inti dan profil risiko bank umum yang berbeda dan ribuan sistem inti BPR yang berbeda pula dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Kompleksitas pengawasan industri perbankan tersebut telah

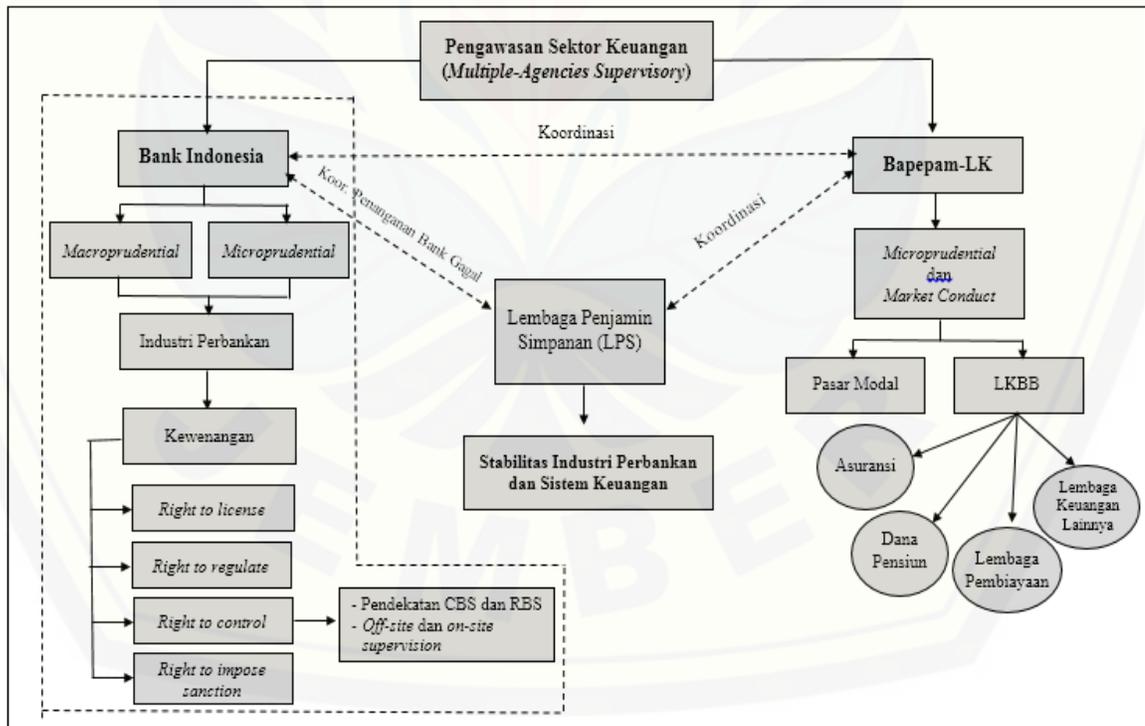
mendorong Bank Indonesia melakukan pengembangan sistem informasi yang dimilikinya seperti SIM-SPB, SID dan SIMWAS BPR secara berkelanjutan.

Kewenangan yang terakhir adalah kewenangan mengenakan sanksi (*right to impose sanction*) terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini Bank Indonesia tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan secara langsung, namun hanya berwenang melakukan investigasi atas kasus-kasus yang terindikasi penyelewengan kemudian menyerahkan penanganan tindak pidana tersebut kepada Polisi dan Kejaksaan Agung (Murdadi, 2012). Hasil investigasi Bank Indonesia (dalam Pradiptyo, *et al*, 2010) atas pelanggaran perbankan selama tahun 2004-2009 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran perbankan mencapai 1.139 kasus dengan jumlah bank dan BPR yang diinvestigasi mencapai 589. Jumlah kasus yang telah selesai diinvestigasi mencapai 1.026, walaupun demikian dikarenakan beberapa alasan maka terdapat 292 kasus yang proses investigasinya tidak dilanjutkan. Pada 2009 terdapat 141 kasus sengketa perdata dari 68 bank yang ada di Indonesia.

Independensi otoritas pengawas juga berperan penting dalam menentukan efektivitas sistem pengawasan perbankan yang dilakukan (Siregar dan Williams, 2004). Sebelum UU No. 23 Tahun 1999 diterbitkan, kapasitas Bank Indonesia dalam hal kemandirian dan kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan masih sangat kurang dikarenakan sebelum tahun 1999 Bank Indonesia merupakan bagian dari pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia berstatus sebagai Menteri Kabinet. Namun, dikeluakannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Independensi Bank Sentral telah dengan tegas menyatakan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Independensi bank sentral tersebut memperkuat alasan penyerahan tugas pengaturan dan pengawasan industri perbankan ke tangan Bank Indonesia sebelum akhirnya diserahkan kepada LPJK.

Terlepas dari sistem pengaturan dan pengawasan yang digunakan, muncul polemik terkait keterlibatan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan industri perbankan (Barth, *et al* 2002; dan Hussain, 2009). Bank Indonesia sebagai

otoritas pengawas berkewajiban mengatur dan mengawasi bank karena bank merupakan jalur utama transmisi kebijakan moneter bank sentral. Bank Indonesia juga perlu memiliki akses terhadap informasi solvabilitas dan likuiditas bank dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*, serta mempercepat upaya penanggulangan krisis melalui sistem perbankan. Sebaliknya, pemberian tanggung jawab ganda sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan dapat memicu timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) (Goodhard dan Schoemaker, 1995). Di satu sisi, bank sentral sebagai otoritas moneter mengharapkan tingkat bunga yang tinggi untuk mengendalikan nilai tukar dan inflasi, sebagai otoritas pengawas bank, akan muncul kekhawatiran atas dampak negatif tingginya tingkat suku bunga terhadap profitabilitas dan solvabilitas perbankan. Jika hal ini terus berlanjut maka dapat memunculkan persepsi bahwa setiap keputusan atau kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral dipengaruhi oleh stabilitas keuangan dan hal tersebut akan mempengaruhi kredibilitas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.



Gambar 4.15 Sistem Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia

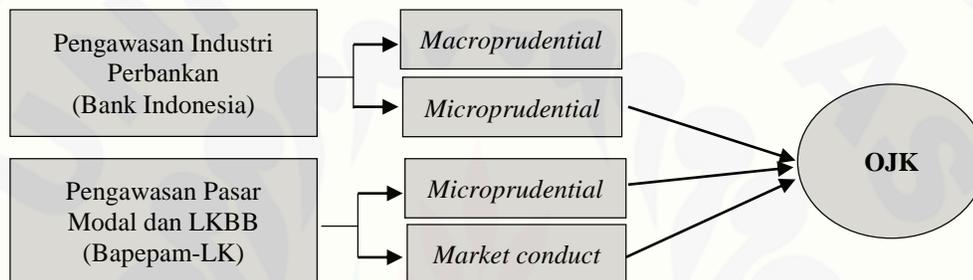
#### 4.3.2 Sistem Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh OJK

Pembentukan OJK di Indonesia dilatarbelakangi oleh krisis keuangan tahun 1997/1998 dimana Bank Indonesia dipandang tidak optimal dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga menyebabkan terjadinya *bank runs* yang bermuara pada krisis keuangan. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial yang semakin pesat telah menciptakan sistem keuangan yang lebih kompleks, dinamis dan saling terkait. Peningkatan konglomerasi keuangan dan abitrasi peraturan, permasalahan lintas sektoral, *moral hazard* serta lemahnya perlindungan terhadap konsumen memperparah kompleksitas pengawasan di sektor keuangan (Permata, 2013). Di sisi lain, adanya kecenderungan peralihan fungsi pengawasan bank dari bank sentral kepada suatu lembaga pengawas yang bersifat independen di beberapa negara semakin mendorong realisasi pembentukan OJK sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2004.

Pengesahan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) menyebabkan terjadi pergeseran struktur pengawasan sektor keuangan di Indonesia dari *multiple-agency approach* menjadi struktur pengawasan yang terpadu (*integrated system*). Sistem pengawasan terpadu pada umumnya diterapkan oleh negara-negara yang memiliki *universal banking* di mana produk-produknya merupakan *hybrid product* atau produk yang sifatnya sudah sedemikian menyatu sehingga sulit dibedakan antara produk keluaran bank atau lembaga keuangan non-bank (Pradiptyo, *et al* 2010).

Pada struktur pengawasan terpadu, OJK akan bertindak sebagai otoritas tunggal yang tidak hanya mengawasi salah satu pasar/industri, melainkan akan mengawasi pasar/industri keuangan secara keseluruhan termasuk industri perbankan, asuransi dan pasar modal. OJK resmi mengambilalih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dari Bapepam-LK pada awal tahun 2013 dan pengawasan bank dari Bank Indonesia mulai 1 Januari 2014 (AMRO, 2014). Khusus pada industri perbankan, pengaturan dan pengawasan *microprudential* meliputi kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank menjadi tugas dan wewenang OJK, sedangkan pengaturan dan pengawasan *macroprudential* tetap menjadi tugas dan wewenang Bank Indonesia

(Lestari, 2012). Selain itu, mengingat beberapa kelemahan Bank Indonesia selama menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan yang memicu timbulnya sejumlah kasus *moral hazard* mengindikasikan kurangnya perlindungan yang diberikan kepada konsumen industri perbankan. Oleh karenanya, fokus pengaturan dan pengawasan OJK tidak hanya berlandaskan pada *banking prudential principle*, melainkan juga pada perilaku pasar (*market conduct*) dengan tujuan meningkatkan perlindungan konsumen melalui berbagai upaya pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum terhadap konsumen.



Gambar 4.16 Pengalihan fungsi pengawasan sektor keuangan

Ruang lingkup OJK dalam fungsi pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana diamanatkan oleh UU OJK terdiri dari empat kewenangan yang telah dimiliki Bank Indonesia yaitu kewenangan memberikan izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), serta satu kewenangan baru yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*) terhadap lembaga keuangan yang diawasi dan melakukan penuntutan jika diperlukan (Pradipto, *et al*, 2011; dan Murdadi, 2012). Sejauh ini otoritas pengawas yang memiliki kewenangan menyidik hanya Bapepam-LK, bahkan kewenangan ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia.

Selama menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia menggunakan kerangka kerja Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai *blueprint* pembangunan industri perbankan nasional sejak 2004. Namun, karena API disusun untuk jangka waktu 5-10 tahun, maka selaku otoritas pengawas yang baru OJK akan

menyusun kerangka kerja baru untuk pengembangan industri perbankan periode 2014-2023 yang dikenal sebagai *Master Plan* Perbankan Indonesia 2014-2023. Terkait dengan pengaturan struktur permodalan bank, jika Bank Indonesia telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip Basel II secara menyeluruh pada tahun 2013, maka peraturan permodalan bank era OJK akan mengacu pada Basel III yang akan diimplementasikan secara bertahap sejak awal tahun 2014. Alam (2012) memaparkan bahwa Basel III merupakan perbaikan atas berbagai kekurangan dalam Basel II dimana aturan Basel III tersebut lebih meningkatkan kualitas dan kedalaman modal dan memperbarui fokus pada pengelolaan likuiditas dengan tujuan memacu bank untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko yang dimilikinya. Dengan kata lain, pengawasan di era OJK akan lebih mengarah kepada pengawasan yang berbasis risiko.

Ditinjau dari sisi independensi, Pasal 2 ayat 2 UU OJK telah memaparkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut (Permata, 2013). Namun, berkaca pada susunan Dewan Komisioner OJK yang diantaranya terdiri dari 2 orang anggota yang berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menimbulkan keraguan atas independensi OJK. Di satu sisi, penempatan dua pejabat tersebut dalam susunan Dewan Komisioner OJK dilakukan dengan alasan menjamin koordinasi, kerjasama dan harmonisasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan. Di sisi lain, telah dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) yang diketuai oleh Menteri Keuangan, dan beranggotakan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sebenarnya dirasa cukup untuk menjamin jalinan koordinasi antar lembaga pengawas.

Independensi OJK juga cukup diragukan jika ditinjau dari segi pembiayaan kegiatan operasionalnya. Berbeda dengan Bank Indonesia yang murni menggunakan APBN, sumber dana untuk membiayai operasional OJK seperti diamanatkan oleh Pasal 34 ayat 2 UU OJK tidak hanya berasal dari APBN, melainkan berasal pula dari pungutan terhadap industri jasa keuangan. Jenis pungutan yang ditetapkan berupa biaya

perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengawasan, pemeriksaan, penelitian, perdagangan efek, dan biaya lainnya dengan besaran secara proporsional didasarkan atas nilai kekayaan, laba operasional, arus kas dan ekuitas lembaga keuangan (Pradiptyo, *et al*, 2010; Permata, 2013). Penetapan pungutan kepada lembaga keuangan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika tidak dikelola dengan baik.

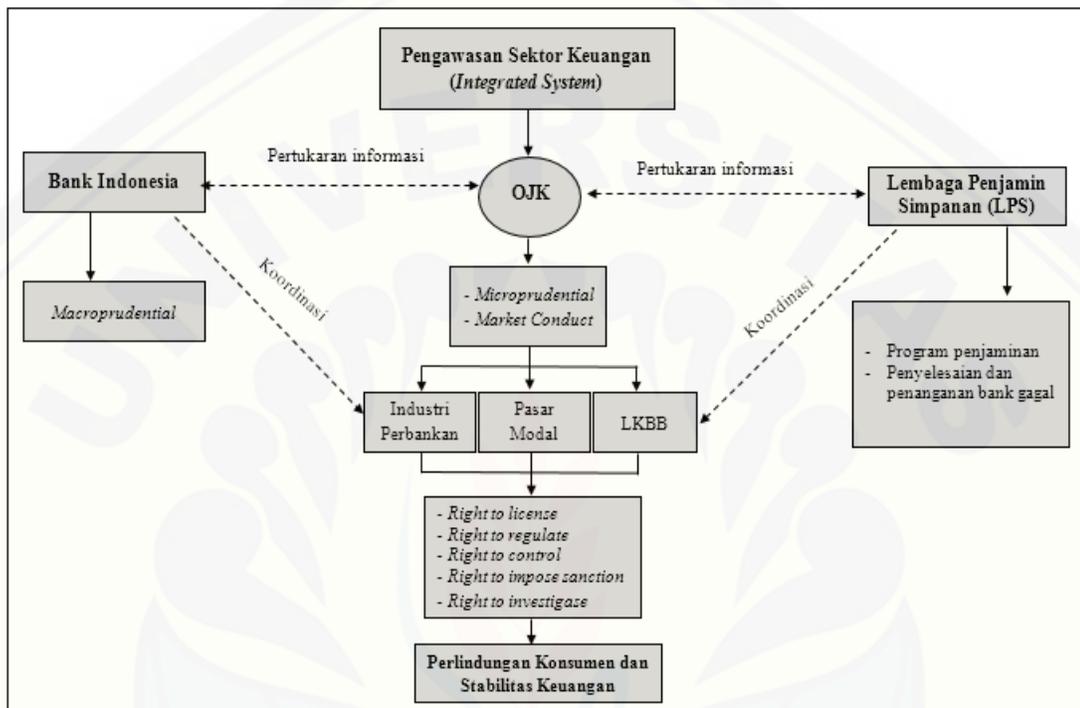
Tabel 4.6 Perbandingan sistem pengaturan dan pengawasan bank oleh BI dan OJK

Aspek Pengaturan dan Pengawasan	Bank Indonesia (Tahun 1992-2013)	OJK (Sejak 1 Januari 2014)
Ruang Lingkup	<i>Macroprudential</i> dan <i>microprudential</i>	<i>Microprudential</i>
Kewenangan	a. <i>Right to license</i> b. <i>Right to regulate</i> c. <i>Right to control</i> d. <i>Right to impose sanction</i>	a. <i>Right to license</i> b. <i>Right to regulate</i> c. <i>Right to control</i> d. <i>Right to impose sanction</i> e. <i>Right to investigate</i>
Pendekatan	a. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (CBS) b. Pengawasan berdasarkan risiko (RBS)	a. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (CBS) b. Pengawasan berdasarkan risiko (RBS)
Fokus pengawasan	<i>Prudential supervision</i>	<i>Prudential supervision</i> dan <i>Market conduct</i>
Prinsip Permodalan	Basel II	Basel III
Kerangka Kerja	Arsitektur Perbankan Indonesia (API)	<i>Master Plan</i> Perbankan Indonesia 2014-2023
Sumber Pembiayaan	APBN	APBN dan pungutan ke lembaga yang diawasi

Sumber: Berbagai sumber, diolah

Pergeseran tanggung jawab pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK akan diikuti pula oleh perpindahan pejabat dan pegawai Bank Indonesia yang selama ini melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor perbankan ke OJK, dan belum menunjukkan perubahan rencana sistem pengawasan yang terlalu signifikan (Lihat Tabel 4.6). Tidak adanya perubahan yang cukup berarti dalam mekanisme pengawasan serta aparat pengawas yang masih sama mengindikasikan bahwa bukanlah perubahan sistem yang terjadi, melainkan hanya

perpindahan kantor aparat pengawas dari Bank Indonesia ke OJK sehingga sulit untuk memprediksi apakah kinerja OJK dalam melakukan upaya penguatan industri perbankan akan lebih baik dibandingkan Bank Indonesia.



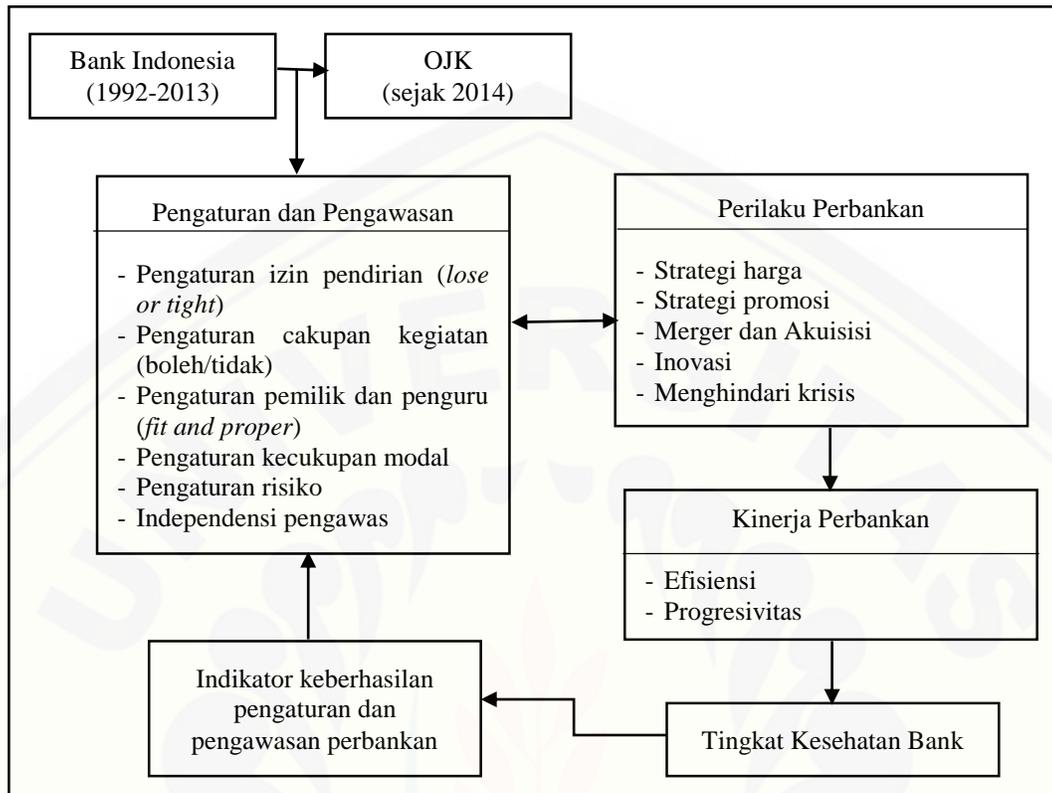
Gambar 4.17 Sistem Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh OJK

Terlepas dari kekurangan tersebut, pergeseran struktur pengawasan dari *multiple-agencies supervisory* menjadi *integrated system* diharapkan dapat membawa angin perubahan bagi pengawasan perbankan di Indonesia. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa *integrated system supervisory* memiliki keunggulan dibandingkan dengan *multiple agencies supervisory*, diantaranya adalah mampu meminimalisir arbitrase peraturan, lebih mampu untuk menyelesaikan konflik yang muncul karena adanya perbedaan tujuan setiap peraturan, memiliki akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik, mampu mendukung kerjasama pengawasan internasional dan lebih fleksibel dalam merespon perubahan pada sektor keuangan.

Dari segi biaya, akan tercipta *economic of scale* dari fungsi pengaturan terpadu yang memungkinkan pengembangan fungsi administrasi, informasi, teknologi pengawasan yang lebih modern, peningkatan kualitas tenaga pengawas serta perbaikan pemantauan yang lebih komprehensif (Barth, *et al*, 2002; Siregar dan Williams, 2004; Hussain, 2009). Eksistensi otoritas pengawas tunggal di sektor perbankan juga mampu meminimalisir risiko peningkatan konglomerasi di sektor keuangan akibat semakin mudarnya klasifikasi antar institusi keuangan, dapat meningkatkan kinerja pengawasan melalui penggunaan pendekatan holistik (menyeluruh) terhadap pengawasan sektor keuangan sehingga negara dengan pengawasan terpadu memiliki pengalaman krisis yang lebih sedikit dibandingkan dengan *multiple-agencies supervisory* (Abrams dan Taylor, 2000; Hussain, 2009).

#### 4.3.3 Dampak Pengaturan dan Pengawasan Bank terhadap Perilaku dan Kinerja Perbankan

Pengaturan dan pengawasan bank menjadi komponen penting dalam upaya menciptakan industri perbankan yang sehat dan stabil mengingat bahwa bank sebagai lembaga yang berbasis kepercayaan cukup rentan terhadap krisis. Fungsi pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia sejauh ini dilaksanakan Bank Indonesia dan kemudian dialihkan kepada OJK per 1 Januari 2014. Ditinjau dari prosedur pengawasan yang digunakan, belum terdapat perubahan yang substansial antara sistem pengawasan Bank Indonesia dengan rencana pengawasan yang akan dilaksanakan oleh OJK. Di sisi lain, tingkat keketatan atau kelonggaran pengaturan dan pengawasan bank akan berdampak pada kondisi persaingan industri perbankan yang tercermin melalui perubahan perilaku dan kinerja perbankan. Mengacu pada kerangka kerja SCP yang dipaparkan oleh Doris (1997), maka keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank terhadap perilaku dan kinerja bank dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.18 Keterkaitan pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja

Keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja industri perbankan terlihat dari kemampuan pengaturan dan pengawasan bank dalam mempengaruhi tingkat inovasi dan cara bank manajemen risiko (Barth *et al*, 2002). Inovasi pada industri perbankan dapat terjadi sebagai hasil dari efisiensi biaya atau peningkatan pendapatan yang diperoleh bank. Semakin baik kemampuan bank dalam manajemen risiko usahanya, maka kualitas kredit yang disalurkan akan semakin tinggi dan mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi pula bagi bank. Sebaliknya, perilaku dan kinerja perbankan yang kurang baik akan direspon dengan dikeluarkannya beberapa peraturan baru oleh otoritas pengawas untuk mencegah terjadinya kemunduran industri perbankan yang berkelanjutan.

Secara garis besar ruang lingkup pengaturan dan pengawasan industri perbankan di Indonesia tergambar melalui kewenangan yang dimiliki oleh Bank

Indonesia dan OJK meliputi pengaturan izin pendirian bank, pengaturan cakupan kegiatan bank, pengaturan kepemilikan dan kepengurusan bank, pengaturan kecukupan modal dan pengaturan risiko serta kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pengaturan tentang perizinan bank sangat dibutuhkan karena akan berdampak terhadap struktur pasar dan persaingan pada industri perbankan. Warjiyo (2004:145) berpendapat bahwa perizinan pendirian bank yang terlalu liberal dapat meningkatkan jumlah dan operasi bank dalam mendukung perekonomian, mendorong efisiensi dan persaingan usaha bank dan memperluas cakupan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat. Namun, apabila tingkat permodalan bank-bank tersebut tidak cukup besar dan dikelola dengan kurang tepat maka kemunculan bank baru tersebut akan menimbulkan masalah baru. Sebaliknya, izin pendirian yang ketat atau bahkan menutup izin pendirian bank baru dapat mengakibatkan kondisi persaingan menjadi tidak sehat karena proteksi yang berlebihan akan menyebabkan pengelolaan bank menjadi kurang optimal.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa modal memegang peranan penting dalam kegiatan usaha bank dan menjadi salah satu fokus otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Bagi bank, peran kunci modal adalah untuk melindungi para deposan dari risiko kegagalan bank (Doris, 1997), Permodalan yang kuat merupakan prasyarat utama untuk menjaga eksistensi usaha bank, pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas penyaluran kredit dalam rangka ekspansi usaha bank (Mulyaningsih dan Daly, 2011). Besarnya modal yang disyaratkan untuk pendirian bank baru di Indonesia cukup bervariasi tergantung dari jenis bank yang ingin didirikan, sedangkan bagi bank yang sudah ada rasio modal minimum yang disyaratkan adalah 8 persen mengacu pada pilar I (*minimum capital requirement*) Basel II. Implementasi API sejak tahun 2004 yang mensyaratkan pemenuhan modal bank Rp 80 miliar pada akhir tahun 2007 dan Rp 100 miliar pada akhir tahun 2010 serta dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban

Penyertaan Modal Minimum Bank Umum secara tidak langsung telah menjadi sarana bagi bank untuk menerapkan prinsip pilar I Basel II.

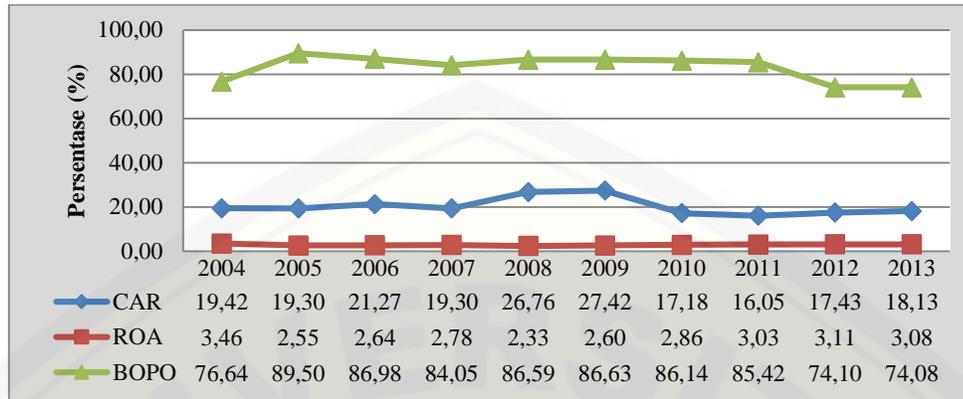
Tabel 4.7 Perkembangan jumlah bank berdasarkan modal inti

Modal Inti	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
> Rp 10 Triliun	3	4	6	8	8	9	10
Rp 1 T s.d 10 T	25	28	33	33	40	44	49
Rp 100 M s.d < Rp 1 T	63	68	62	69	74	67	61
< Rp 100 Miliar	39	28	23	11	0	0	0
Total Bank	130	128	124	121	122	120	120

Sumber: Laporan Pengawasan Bank (berbagai edisi)

Implementasi Basel II dan API telah mendorong bank melakukan bermacam upaya untuk memenuhi ketentuan kecukupan modal minimum melalui penambahan modal baru, merger, dan penerbitan saham baru dan *subordinated loan* (Nirmalawati, *et al*, 2013). Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil cukup bagus terlihat dari jumlah bank yang mengalami peningkatan kinerja permodalan setiap tahunnya (lihat Tabel 4.7). Pada tahun 2010 target modal minimum sebesar Rp 10 triliun berhasil dicapai dimana jumlah bank dengan modal diatas Rp 10 triliun meningkat menjadi 8 bank, dan 114 bank lainnya sudah memiliki permodalan antara Rp 100 miliar hingga Rp 10 triliun.

Ditinjau dari rasio kecukupan modal, nilai CAR industri perbankan cukup berfluktuasi selama periode pengamatan namun masih berada jauh diatas 8 persen sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Pada tahun awal implementasi API, ROA mengalami penurunan, namun perlahan-lahan kembali meningkat hingga mencapai 3,08 persen tahun 2013 (lihat Gambar 4.19). ROA yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin baiknya posisi bank dari segi penggunaan aset sehingga tingkat keuntungan yang dicapai semakin besar (Rivai, *et al*, 2013). Rasio BOPO mengalami peningkatan hingga tahun 2006, kemudian turun perlahan hingga tahun 2013 yaitu sebesar 74,08 persen. Penurunan rasio BOPO menunjukkan bahwa bank semakin efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya.



Gambar 4.19 Perkembangan indikator kinerja industri perbankan periode 2003-2013 (Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, berbagai edisi)

Hasil ini sesuai dengan penelitian Alam (2012) bahwa peraturan-peraturan terkait implementasi pilar I Basel II yang semakin ketat berdampak positif pada efisiensi bank dan mengurangi *risk-taking behavior* bank. Persyaratan permodalan yang semakin besar akan pula berdampak positif pada profitabilitas industri perbankan (Barth *et al*, 2010; Bauheni *et al*, 2014). Sebangun dengan ketentuan permodalan, pengaturan perizinan berdasarkan prinsip kehati-hatian juga harus mempertimbangkan kompetensi dan kelayakan (*fit and proper*) calon pengurus bank. Otoritas pengawas perlu melakukan *fit and proper test* terhadap segenap calon jajaran pengurus bank sebab kesehatan suatu bank juga tergantung dari kredibilitas pengelola bank. Semakin membaiknya kinerja permodalan memberikan sinyal positif bagi *shareholders* bank baik pemegang saham, kreditur, maupun deposan atas kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu kecukupan permodalan dan pengelolaan modal bank yang baik, serta keberadaan pengurus yang kompeten sangat diperlukan sebagai jaminan kesehatan dan kemampuan bank dalam menanggulangi krisis di masa depan serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan secara menyeluruh.

Bank Indonesia dan OJK disamping mengatur masalah perizinan dan kecukupan modal bank, harus pula mengatur kegiatan operasional bank yang boleh atau tidak untuk dilaksanakan. Pengaturan mengenai kegiatan operasional bank juga akan berdampak terhadap struktur perbankan dan persaingan pada industri perbankan.

Pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan operasional suatu bank seperti pembatasan melakukan kegiatan di daerah tertentu atau pembatasan untuk memberikan kredit pada sektor-sektor tertentu berpotensi mengurangi efisiensi industri perbankan (Warjiyo, 2004:146). Hal ini diperkuat oleh beberapa temuan empiris bahwa pembatasan kegiatan bank berdampak negatif terhadap kinerja, stabilitas dan pembangunan industri perbankan dibandingkan ketika bank diberikan keleluasaan untuk memperoleh pendapatan dari sumber yang beragam (Barth *et al*, 2002, 2010, 2013). Semakin tinggi pembatasan terhadap cakupan kegiatan usaha bank akan meningkatkan perilaku pengambilan risiko pada bank konvensional, menyebabkan bank tidak dapat melakukan diversifikasi sumber pembiayaan sehingga meningkatkan kerentanan industri perbankan terhadap krisis (Beck *et al*, 2003; Demirgüç-Kunt, *et al*, 2004; Laeven dan Levine, 2009; dan Alam 2012). Negara dengan pengaturan pembatasan kegiatan bank yang terlalu ketat memiliki pembangunan dan kinerja industri perbankan yang lebih lemah dan menghadapi kemungkinan terjadinya krisis yang lebih tinggi.

Bagi negara maju dengan struktur industri perbankan yang telah mapan dan produk-produk keuangan yang sudah tergolong *hybrid product*, pembatasan secara ketat terhadap kegiatan bank memang akan berdampak negatif terhadap kinerja bank. Namun, untuk kasus Indonesia dimana struktur industri perbankan yang dimiliki belum terlalu kokoh dan mengingat bahwa kegiatan bank merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko seperti kekurangan likuiditas, kredit macet serta mudah terpengaruh oleh gejala eksternal seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan ketidakpastian kondisi perekonomian global menyebabkan pengaturan pembatasan kegiatan operasional terutama yang mengandung risiko tinggi misalnya kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak internal bank dan eksposur transaksi valuta asing perlu diawasi dengan seksama.

Pengawasan bank di era Bank Indonesia maupun OJK nantinya akan tetap memfokuskan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui penerapan pengawasan berbasis risiko (RBS). Risiko kredit merupakan risiko tertinggi yang sering dialami oleh negara-negara di kawasan Asian Tenggara, termasuk Indonesia (AMRO, 2014). Selain risiko kredit, tingginya risiko likuiditas dan risiko operasional

juga masih sering dihadapi oleh perbankan Indonesia (Bank Indonesia, 2004). Untuk meminimalisir risiko tersebut, pengaturan risiko yang dilakukan dapat berupa penetapan batas maksimum pemberian kredit dan batas penyediaan alat-alat likuid perbankan. Sedangkan risiko lain terutama yang berkaitan dengan fluktuasi variable-variabel makro dapat dicegah melalui penetapan batas posisi devisa neto dan mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen berbasis risiko yang mencakup kebijakan umum dan pedoman operasional mengenai penilaian risiko dominan yang dihadapi bank, pengukuran besarnya risiko dan pengaruhnya terhadap modal, serta langkah-langkah pengendalian risiko (Warjiyo, 2004:148).

Upaya menciptakan industri perbankan yang kuat dan stabil juga memerlukan independensi otoritas pengawas dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan yang efektif (Siregar dan Williams, 2004). Namun, eksistensi otoritas pengawas yang terlalu kuat (*powerfull*) berpotensi menyebabkan inefisiensi pada industri perbankan (Alam, 2012), meningkatkan korupsi dan kurang mendatangkan manfaat pada stabilitas perbankan (Barth *et al*, 2006, 2013). Perpindahan tanggung jawab pengawasan industri perbankan dari Bank Indonesia ke OJK akan disertai pula dengan rencana penarikan biaya (pungutan) kepada bank atas jasa pengawasan yang diberikan sebagaimana tertuang pada UU OJK. Pengenaan pungutan tersebut berpotensi melemahkan posisi tawar dan independensi OJK terhadap lembaga keuangan yang diawasi dan akan berdampak pula terhadap peningkatan biaya operasional bank (Pradiptyo, *et al*, 2010). Besarnya biaya yang akan dikenakan terhadap perbankan adalah 0,03-0,045 persen dari aset. Untuk menanggulangi peningkatan biaya operasional tersebut, bank akan melakukan berbagai upaya pengalihan beban pembayaran biaya ke nasabah melalui peningkatan harga pelayanan jasa keuangan, yang pada gilirannya akan berdampak pula terhadap profitabilitas dan kinerja bank secara keseluruhan. Apabila pungutan tersebut ditiadakan, maka dana sebesar 0,03-0,045 persen tersebut dapat dimanfaatkan bank untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan skala usaha dan kinerja bank.

#### 4.4 Pembahasan

Hasil perhitungan rasio konsentrasi CR4, CR8, CR10, HHI dan Koefisien Gini dalam penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia. Secara umum, perhitungan rasio-rasio konsentrasi tersebut dilakukan pada tiga pasar yang merupakan indikator utama perbankan yaitu pasar aset, pasar DPK dan pasar kredit. Ketiga pasar tersebut memiliki fluktuasi tingkat konsentrasi yang berbeda-beda selama periode pengamatan.

Pada pasar aset, hasil perhitungan CR4, CR8 dan CR10 menunjukkan tren yang menurun selama periode pengamatan. Nilai CR yang berada pada kisaran 44,41-70,72 persen mengindikasikan bahwa konsentrasi di pasar aset tergolong pada *secondary concentration* dan identik dengan pasar oligopoli. Perhitungan dengan HHI terhadap pasar aset juga menunjukkan tren menurun selama periode pengamatan. Berpijak pada kriteria KPPU, hasil perhitungan HHI pasar aset yang berada pada kisaran 0,062-0,095 atau kurang dari 1800 (0,18) menunjukkan bahwa HHI aset berada pada spektrum I yaitu tingkat konsentrasi rendah. Selain itu meskipun masih cukup tinggi atau tergolong ketimpangan berat, namun ketimpangan distribusi pangsa pasar aset turun perlahan setiap tahunnya sebagaimana yang terlihat dari turunnya nilai koefisien gini dari 84,0 persen tahun 2001 menjadi 76,9 persen tahun 2013. Tren menurun yang ditunjukkan oleh hasil perhitungan ketiga indikator konsentrasi tersebut menunjukkan bahwa pasar aset mengalami penurunan derajat konsentrasi atau pasar menjadi semakin kompetitif selama periode pengamatan.

Sebangun dengan pasar aset, pasar DPK menjadi semakin kompetitif selama periode pengamatan, seperti yang terlihat dari tren menurun pada ketiga indeks konsentrasinya. Nilai CR selama tahun 2001-2013 berada pada kisaran 48,06-72,26 persen menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi pasar DPK berdasarkan penguasaan pangsa pasar sepuluh bank terbesar berada pada posisi *secondary concentration* dan identik dengan pasar oligopoli. Hasil tersebut diperkuat dengan hasil perhitungan HHI yaitu antara 0,068 hingga 0,095 yang berarti konsentrasi di pasar DPK berada dalam

tingkat konsentrasi rendah (spektrum I). Ketimpangan pangsa pasar DPK juga mengalami penurunan meskipun masih tergolong berat dengan nilai koefisien gini yang masih cukup tinggi yaitu 78,7 persen pada tahun 2013.

Berbeda dengan kedua pasar sebelumnya, CR dan HHI pasar kredit justru menunjukkan trend meningkat yang mengindikasikan bahwa pasar kredit menjadi lebih terkonsentrasi selama periode pengamatan. Berdasarkan hasil perhitungan CR yaitu antara 38,81 persen hingga 66,58 persen menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi pasar kredit adalah *secondary concentration* dengan struktur pasar yang identik dengan oligopoli. HHI kredit yang kurang dari 1800 (0,18) juga menunjukkan bahwa pasar kredit termasuk pasar dengan tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) namun dengan tingkat ketimpangan yang tidak mengalami perubahan berarti selama periode pengamatan yaitu masih tergolong berat dengan nilai koefisien gini sebesar 78,1 persen tahun 2001 menjadi 77,1 persen tahun 2013.

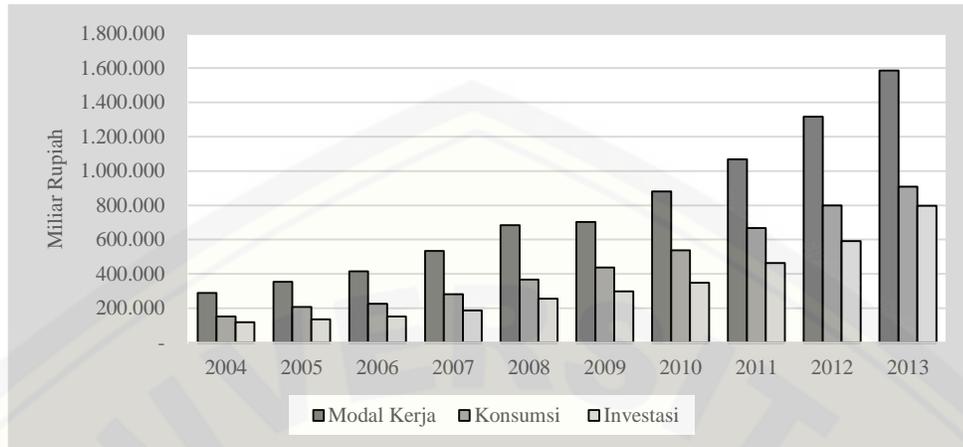
Hasil perhitungan terhadap pasar aset, DPK dan kredit secara umum menunjukkan bahwa pasar aset dan DPK mengalami penurunan tingkat konsentrasi, sebaliknya konsentrasi di pasar kredit justru meningkat. Penurunan tingkat konsentrasi dan ketimpangan yang terjadi di pasar aset dan DPK tersebut tidak terlepas dari beberapa peristiwa penting dalam industri perbankan mulai dari dikeluarkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan kebijakan *single presence policy*, hingga peraturan kepemilikan modal minimum yang pada akhirnya diikuti oleh keputusan beberapa bank untuk melakukan merger. Selama periode 2004-2006 terjadi tiga proses merger yang melibatkan 5 bank berukuran kecil dan 2 bank berukuran besar. Merger tersebut menghasilkan tiga bank yaitu PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, PT Bank Century (yang telah berganti nama menjadi PT Bank Mutiara), dan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Selama periode 2007-2011 kembali terjadi 7 merger yang melibatkan 2 bank berukuran besar, 5 bank sedang dan 8 bank kecil (lihat Tabel 4.2). Merger yang dilakukan oleh dua bank besar yaitu PT. Bank Niaga dan PT. Bank Lippo yang menghasilkan PT Bank CIMB Niaga, Tbk dilakukan untuk memenuhi syarat

kepemilikan tunggal, sedangkan merger lainnya dilakukan untuk memperkuat permodalan bank.

Merger yang sebagian besar dilakukan oleh bank berukuran kecil dan sedang (bukan bank dominan) menghasilkan ukuran aset yang dimiliki bank-bank tersebut menjadi lebih besar sekaligus meningkatkan kemampuan bank dalam menghimpun DPK yang lebih besar pula. Hal tersebut melatarbelakangi terjadinya penurunan derajat konsentrasi dan ketimpangan di pasar aset dan DPK karena distribusi pangsa aset dan DPK antara bank besar, sedang dan kecil menjadi lebih merata dari sebelumnya. Sebaliknya, peningkatan derajat konsentrasi di pasar kredit terjadi karena meningkatnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara keseluruhan, namun kredit yang disalurkan oleh bank-bank besar (bank-bank dominan) mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank berukuran kecil dan sedang sehingga menyebabkan konsentrasi di pasar kredit memiliki tren yang meningkat selama periode pengamatan.

Penyaluran kredit oleh bank umum tersebut jika ditinjau dari jenis penggunaannya dalam sepuluh tahun terakhir masih didominasi oleh kredit modal kerja, diikuti oleh kredit konsumsi kemudian kredit investasi. Ketiga jenis kredit tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama kredit modal kerja yang meningkat lebih cepat dibandingkan dua jenis kredit lainnya yang kembali menunjukkan bahwa peran industri perbankan dalam mendorong perekonomian Indonesia melalui pembiayaan pelaku mikro baik pengusaha maupun rumah tangga menjadi semakin besar (lihat Gambar 4.20).

Apabila ditinjau secara keseluruhan, maka pasar aset, DPK dan kredit tergolong pada *secondary concentration* dan memiliki struktur pasar oligopoli. Tingkat konsentrasi tertinggi masih dimiliki oleh pasar DPK, sedangkan tingkat konsentrasi terendah berada di pasar kredit. Hasil ini sebangun dengan penelitian yang dilakukan Malik (2008), Sharma dan Bal (2010), Nguyen dan Steward (2010), Tushaj (2010), Iveta (2012), Sugiyanto dan Jumono (2012).



Gambar 4.20 Kredit bank umum berdasarkan jenis penggunaan (Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah)

Struktur pasar industri perbankan yang terbentuk tidak terlepas dari sistem pengaturan dan pengawasan yang diterapkan oleh otoritas pengawas. Selain berdampak terhadap struktur pasar, ketat atau tidaknya pengaturan dan pengawasan akan berdampak pula terhadap perilaku dan kinerja industri perbankan. Sejauh ini, ruang lingkup pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia mencakup pengaturan izin pendirian, cakupan kegiatan, kepemilikan dan kepengurusan bank, kecukupan permodalan bank serta pengaturan risiko bank. Perhitungan derajat konsentrasi menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia cukup terkonsentrasi dan didominasi oleh beberapa bank besar sehingga mendorong bank-bank kecil dan sedang untuk bergabung dalam rangka pemenuhan modal minimum atau kebijakan kepemilikan tunggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas pengawas. Seiring dengan hal tersebut, terjadi pergeseran strategi bank untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi persaingan bank yang semakin ketat, yaitu dari *organic growth* seperti peluncuran produk baru dan pembukaan kantor cabang baru, menjadi *unorganic growth* melalui merger atau kerjasama dengan bank lainnya

Selain merger, selama periode 2001-2013 juga terdapat beberapa keputusan likuidasi yang dilakukan oleh pemerintah dan atas inisiatif sendiri, serta keputusan konversi beberapa bank dari bank konvensional menjadi bank syariah seperti yang

tersaji pada Tabel 4.8 berikut yang turut serta mempengaruhi perubahan tingkat konsentrasi pada industri perbankan di Indonesia.

Tabel 4.8 Daftar bank yang ditutup dan konversi ke syariah

No	Nama Bank	Keterangan
1.	PT ING Indonesia Bank	<i>Self liquidation</i> pada Oktober 2004
2.	Bank Asiatic	Dicabut izin usahanya pada April 2004
3.	Bank Dagang Bali	Dicabut izin usahanya pada April 2004
4.	PT Global International	Dicabut izin usahanya pada Januari 2005
5.	American Express Bank, Ltd	Dicabut izin usahanya pada Februari 2009
6.	PT Bank IFI	Dicabut izin usahanya pada 2009
7.	PT Bank Ekspor Indonesia	Dicabut izin usahanya pada 2009
8.	PT Bank Persyarikatan Indonesia	Konversi ke bank syariah menjadi PT Bank Syariah Bukopin pada 27 Oktober 2008
9.	PT Bank Harfa	Konversi ke bank syariah menjadi PT Bank Panin Syariah pada 6 Oktober 2009
10.	PT Bank Swaguna	Konversi ke bank syariah menjadi PT Victoria Syariah pada 10 Februari 2010
11.	PT Maybank Indocorp	Konversi ke bank syariah menjadi PT Bank Maybank Syariah pada 23 September 2010
12.	PT Bank UIB	Konversi ke bank syariah menjadi PT Bank BCA Syariah pada 2 Maret 2010
13.	PT Bank Jasa Arta	Konversi ke bank Syariah menjadi PT Bank BRI Syariah pada 16 Oktober 2010
14.	PT Bank Barclays Indonesia	Dicabut izin usaha pada tahun 2011

Sumber: Laporan Pengawasan Bank, berbagai tahun

Serangkaian merger dan keputusan-keputusan lain yang menyangkut industri perbankan telah mengurangi jumlah bank yang ada di Indonesia selama periode 2001-2013. Semakin sedikit jumlah bank seharusnya disertai dengan peningkatan derajat konsentrasi pada industri perbankan. Namun, penelitian ini menunjukkan dua hasil yang berbeda yaitu: (i) derajat konsentrasi di pasar aset dan DPK semakin turun seiring dengan berkurangnya jumlah bank yang ada di Indonesia; (ii) derajat konsentrasi di pasar kredit semakin meningkat seiring berkurangnya jumlah bank di Indonesia. Hasil pertama memperkuat temuan Gelos dan Roldos (2004), Sharma dan Bal (2010) dan Mulyaningsih dan Daly (2011) yang menyimpulkan bahwa penurunan jumlah bank tidak secara langsung diterjemahkan sebagai peningkatan konsentrasi pasar sebagaimana ditunjukkan oleh hasil perhitungan CR dan HHI di beberapa negara di

Asia. Hal ini dikarenakan konsolidasi perbankan di negara-negara kawasan Asia bukan didorong atau diakibatkan oleh persaingan yang ketat di dalam pasar, namun lebih karena dorongan pemerintah. Selain itu konsolidasi perbankan di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh bank-bank berukuran sedang dan kecil dalam rangka mematuhi kebijakan kepemilikan tunggal dan modal minimum serta untuk meningkatkan skala ekonomi bank yang bergabung sehingga konsolidasi menghasilkan distribusi pasar aset dan DPK perbankan yang lebih merata namun tidak menciptakan peningkatan konsentrasi pada kedua pasar tersebut. Sebaliknya, hasil kedua mendukung penelitian Kusumastuti (2009) yang menyebutkan bahwa berkurangnya jumlah bank akan menghasilkan industri perbankan yang lebih terkonsentrasi.

Proses merger yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu tiga belas tahun berjalan cukup lambat dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Industri perbankan Indonesia yang sejauh ini masih terdiri dari banyak bank berukuran kecil dan sedang dengan struktur permodalan yang lemah akan lebih rentan terhadap krisis dibandingkan dengan industri perbankan yang lebih terkonsentrasi dengan beberapa bank besar sebagaimana yang diyakini oleh pendukung teori *pro-concentration* atau *concentration-stability* (Allen dan Gale, 2004; Le, 2014). Bertumpu pada hasil perhitungan HHI yang bernilai kurang dari 1000 dan jumlah bank di Indonesia yang masih cukup banyak, maka otoritas pengawas perlu menerapkan peraturan-peraturan yang mengarah pada peningkatan partisipasi bank untuk melakukan merger. Selama merger yang dilakukan menghasilkan tingkat konsentrasi atau nilai HHI kurang dari 1800 (spektrum I) maka tidak akan mengubah struktur pasar yang telah ada serta tidak akan menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang disyaraktan oleh KPPU. Namun, perlu diperhatikan bahwa merger bank membutuhkan biaya yang cukup besar dan biasanya disertai pula dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi jumlah karyawan dan biaya operasional. Oleh karena itu kebijakan yang mendorong partisipasi bank untuk merger harus disertai pula dengan kebijakan lain atau solusi konkrit terkait nasib karyawan bank agar tidak berujung pada timbulnya masalah baru.

Eksistensi bank-bank besar, kokoh dan stabil yang dapat diciptakan melalui proses merger dan akuisisi diperlukan agar bisa bersaing di pasar perbankan internasional (Widyastuti dan Armanto, 2013). Struktur permodalan yang kuat juga akan sangat bermanfaat dalam membantu menjaga stabilitas industri perbankan. Partisipasi asing terhadap industri perbankan Indonesia yang masih cukup tinggi sejak dilakukannya liberalisasi perbankan semakin meningkatkan kerentanan industri perbankan terhadap krisis. Liberalisasi perbankan di satu sisi dapat meningkatkan akses likuiditas perbankan Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, namun di lain sisi juga membuat sistem perbankan nasional menjadi lebih rentan terhadap guncangan keuangan dari luar negeri. Krisis keuangan tahun 2008 merupakan contoh nyata dimana globalisasi sektor keuangan berperan besar dalam mentransmisikan dampak menular (*contagion effect*) guncangan ekonomi dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu upaya pencapaian persaingan yang sehat dan industri perbankan yang stabil juga tidak dapat dipisahkan dari peran otoritas pengawas baik itu Bank Indonesia maupun OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 ini akan memaparkan kesimpulan atas hasil penelitian baik yang dianalisis menggunakan perhitungan eklektik, maupun analisis deskriptif naratif sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan pula beberapa saran yang tepat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia serta keterkaitan antara sistem pengaturan dan pengawasan bank terhadap perilaku dan kinerja industri perbankan selama periode 2001-2013. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan derajat konsentrasi menggunakan indeks-indeks konsentrasi terhadap aset, DPK dan kredit secara umum menyimpulkan bahwa pasar aset dan DPK mengalami penurunan tingkat konsentrasi, sebaliknya konsentrasi di pasar kredit meningkat seiring dengan berkurangnya jumlah bank di Indonesia. Pasar DPK memiliki tingkat konsentrasi tertinggi, sedangkan konsentrasi terendah berada di pasar kredit. Hasil perhitungan CR4, CR8 dan CR10 pada aset, DPK dan kredit yang secara keseluruhan masih berada di bawah 80 persen menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia tergolong pada *secondary concentration* dan memiliki struktur pasar oligopoli. Jika mengacu pada ketentuan KPPU maka nilai tersebut tergolong pada konsentrasi moderat. Nilai HHI pada ketiga pasar yang kurang dari 1.800 ( $HHI < 0,18$ ) menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria KPPU konsentrasi industri perbankan Indonesia masih berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I), sedangkan nilai Koefisien Gini yang berada pada kisaran 76,9 persen hingga 85,2 persen menunjukkan bahwa ketimpangan pada industri perbankan Indonesia masih tergolong berat namun memiliki tren yang menurun selama periode pengamatan.

2. Keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank terhadap perilaku dan kinerja industri perbankan tercermin melalui kemampuan pengaturan dan pengawasan bank dalam mempengaruhi tingkat inovasi dan cara bank manajemen risiko. Pengaturan permodalan bank menjadi salah satu fokus otoritas pengawas dalam menjalankan prinsip kehati-hatian sebab modal yang kuat merupakan syarat utama yang menjamin kelangsungan usaha suatu bank. Peraturan permodalan yang semakin ketat yang mengacu pada pilar I Basel II dapat mengurangi *risk-taking behavior* bank serta menunjukkan dampak positif pada kinerja perbankan yang tercermin melalui perbaikan rasio indikator-indikator kesehatan perbankan seperti CAR, ROA dan BOPO. Peraturan terkait izin pendirian bank, hambatan masuk dan pembatasan-pembatasan yang terlalu ketat terhadap kegiatan operasional bank berdampak negatif terhadap kinerja dan pembangunan industri perbankan. Namun, mengingat bahwa struktur industri perbankan di Indonesia belum cukup kuat dan masih menghadapi risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional yang tinggi, maka pengaturan terhadap kegiatan bank terutama yang mengandung risiko tinggi perlu ditingkatkan. Independensi otoritas pengawas juga menentukan efektifitas pengaturan dan mengawasi yang dilakukan, namun eksistensi otoritas pengawas yang terlalu *powerfull* berpotensi mendatangkan inefisiensi pada industri perbankan. Pengalihan wewenang pengaturan dan pengawasan industri perbankan dari Bank Indonesia ke OJK belum menunjukkan perubahan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang cukup berarti, oleh karena itu masih sulit untuk memprediksi apakah kinerja pengaturan dan pengawasan bank serta kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku dan kinerja industri perbankan di era OJK akan lebih baik dibandingkan dengan Bank Indonesia.

## 5.2 Saran

Eksistensi industri perbankan yang kuat dan stabil merupakan suatu keharusan untuk diupayakan secara berkelanjutan demi mengoptimalkan peran dan fungsi bank.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan sebagai berikut:

1. Menggalakkan program merger dan akuisisi untuk meningkatkan konsolidasi perbankan terutama bagi bank berukuran kecil dan sedang mengingat bahwa jumlah bank di Indonesia masih cukup banyak dan didominasi oleh bank kecil-sedang dengan struktur permodalan yang masih lemah. Tingkat konsentrasi yang masih pada level spektrum I mengindikasikan bahwa peluang melakukan merger antar bank di Indonesia masih terbuka lebar. Namun, kebijakan yang mendorong merger harus pula disertai dengan kebijakan lain terutama yang menyangkut masalah nasib karyawan karena merger biasanya disertai pula dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi jumlah karyawan bank hasil merger.
2. Selain melalui merger dan akuisisi, penguatan struktur permodalan bank dapat dipercepat melalui optimalisasi upaya-upaya lainnya baik melalui penambahan modal baru dari para *shareholder* bank, penerbitan saham baru di pasar modal maupun dengan menerbitkan *subordinated loan*.
3. Seiring dengan peralihan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga pengawas dalam menjamin kelangsungan implementasi program-program penguatan industri perbankan baik yang tertuang pada kerangka kerja API, maupun kerangka kerja baru (*Master Plan Perbankan*) yang akan disusun OJK.

Sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah penggunaan pendekatan non-struktural dengan berbagai alternatif model yaitu model Iwata, model Bresnahan-Lau dan model Panzar Rosse sebagai pendamping pendekatan struktural dalam melihat perubahan persaingan pada industri perbankan. Penelitian lebih lanjut juga dapat dikembangkan untuk menganalisis keterkaitan antara peraturan dan pengawasan bank terhadap kinerja dan stabilitas industri perbankan menggunakan metode Panel Data Dinamis *Generalized Method of Moment* (GMM) untuk menangkap fenomena persaingan dan stabilitas industri perbankan yang bersifat dinamis.

**DAFTAR BACAAN**

- Abdullah, P. 2010. Kejahatan perbankan dan Efektivitas Pengawasan Perbankan: Menggabungkan Teori Permainan dan Pendekatan Analytical Network Process. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Oktober 2010: 223-242
- Abrams, R. K. & Taylor, M. W. 2000. Issue in the Unification of Financial Sector Supervision. IMF Working Paper WP/00/213
- Afriany, D. dan Jamaan, A. 2012. Transnasionalisasi Jasa Keuangan. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. 10(2): 67-147
- Akingunola, Olusegun, Oluwaseyi, & Olusoji. 2013. The Effect of the Financial Liberalisation on Economic Growth. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*. 2(1): 123-155
- Alam, N. 2012. The Impact of Regulatory and Supervisory Structures on Bank Risk and Efficiency: Evidence from Dual Banking System. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 4(1): 216-244
- Allen, F., & Gale, D. 2004. Competition and Financial Stability. *Journal of Money, Credit, and Banking*, 36(3): 453-480
- AMRO. 2015. Understanding Banking Supervisory Priorities and Capacities in ASEAN+3 Economies. ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Singapore
- Arestis, P. & Sawyer, M. 2006. *A Handbook of Alternative Monetary Economics*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc
- Ariyanto, T. 2004. Profil Persaingan Usaha Dalam Industri Perbankan Indonesia. *Perbanas Finance and Banking Journal*, 6(2): 95-108
- Arrawatia, R. & Misra, A. 2012. Competition in Banking Industry: A Literature Review. *International Journal of Commerce, Business and Management (IJCBM)*, 1(3): 120-126
- Athoillah, M. 2010. Struktur Pasar Industri Perbankan Indonesia: Rosse-Panzar Test. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 4(1):1-10

- Bank Indonesia. 2014. *Arsitektur Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia
- Barth, J. R., Caprio, G., & Levine R. 2003. *Bank Regulation and Supervision: Lesson from a New Database*. World Bank Policy Research Working Paper (February 2003)
- Barth, J. R., Caprio, G., & Levine R. 2004. *Bank Regulation and Supervision: What Works Best?* *Journal of Financial Intermediation*, 12: 205-248
- Barth, J. R., Caprio, G., & Levine R. 2006. *The Design and Governance of Bank Supervision*
- Barth, J. R., Caprio, G., & Levine R. 2013. *Bank Regulation and Supervision in 180 Countries from 1999-2011*. World Bank Policy Research Working Paper (January 2013)
- Barth, J. R., Nolle, D. E., & Phumiwasana, T. 2002. *A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance*. Economic and Policy Analysis Working Paper 2002-2
- Berger, A. N., Klapper, L. F. & Ariss, R. T. 2008. *Bank Competition and Financial Stability*. The World Bank Policy Research Working Paper 4696
- Biro Riset BUMN Centre FE UI. 2012. *Analisa Industri Perbankan Indonesia 2012*
- Bikker, J.A, dan Haaf, K. 2002a. *Competition, Concentration and Their Relationship: An Empirical Analysis of The Banking Industry*. *Jurnal of Banking dan Finance*
- Bikker, J.A, dan Haaf, K. 2002b. *Measures of Competition and Concentration in the Banking Industry: a Review of the Literature*. *Economic and Financial Modelling Summer 2002*. Central Bank of Netherland
- Case, K.E., dan Fair, R.C. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan Jilid I*. Jakarta: Erlangga
- Čihák, Demirgüç-Kunt, Pería & Cheraghlou. 2012. *Bank Regulation and Supervision around The World*. The World Bank Policy Research Working Paper No. 6286
- Colander, D. 2004. *Microeconomic Fifth Edition*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Davcev, L. & Hourvoulides, N. 2013. *Banking Concentration in FYROM: Evidence from a Country in Transition*. *Procedia Economic and Finance*, 5: 222-230

- Demirgüç-Kunt, A. & Huizinga, H. 2000. Market Discipline and Financial Safety Net Design. Draft of Development Research Group, The World Bank, and Department of Economics, Tilburg University, and, CEPR Journal, Revised: April 2000.
- Demirguc-Kunt, A., Laeven, L., & Levine, R. 2004. Regulations, Market Structure, Institutions, and the Cost of Financial Intermediation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 36, 593-622.
- Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. 2000. Bank Concentration: Cross-Country Evidence. The World Bank, October.
- Deriantino, E. 2013. Banking Competition and Effectiveness of Monetary Policy Transmission: A Theoretical and Empirical Assessment on Indonesia Case
- Doris, N. 1997. Structure, Conduct, and Performance in Banking Markets. Thunen-Series of Applied Economic Theory Working Paper No.12
- Fischer, S. 2008 Remarks about Financial Supervision Authorities. Speech (as the Governor of the Bank of Israel) delivered at “The Marker” Capital Markets Conference, Tel Aviv, May 21st
- Gelos, R.G dan Roldos, J. 2004. Consolidation and Market Structure in Emerging Market Banking System. *Emerging Market Review* 5: 39-59
- Goeltom, M.S. dan Harun, C.A. 2010. Banking Supervision and Regulations in East Asia and the Prospect of Regional Cooperative Framework
- Goodhart, C. & Scoenmaker, D. 1995. Should the Function of Monetary Policy and Banking Supervision Be Separated? *Oxford Economic Papers*, New Series, 47(4):539-560
- Gopalan, S. dan Rajan, R.S. 2009. Financial Sector De-regulation in Emerging Asia: Focus on Foreign Bank Entry
- Hussain, B. 2009. Integrated Financial Supervision and its Implication for Banking Sector Stability. Thesis. Leonard N. Stern Scholl of Business, New York University: May 2009
- Iuga, I. 2013. Analysis of The Banking System’s Concentration Degree in EU Countries. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica* 15(1):184-193
- Iveta, R. 2012. Market Power in the Czech Banking Sector. *Journal of Competitiveness* 4(1): 143-155

- Khan, S. J. M. 2014. Concentration in Southeast Asia Banking. *American Journal of Economics*, 4(3): 150-158
- Kusumastuti, S.Y. 2009. Competition Degree of the Indonesian Banking Sector: After the Economic Crisis. *Policy Discussion Paper Series Centre for Industry, SME & Business Competition Studies Trisakti University*
- Le, T.H. 2014. Market Concentration and Competition in Vietnamese Banking Sector. *Munich Personal RePeEc Archive (MPRA) Paper No.57406*
- Lestari, H, D. 2012. Otoritas Jasa Keuangan: Sistem baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3): 557-567
- Lubis, A.F. 2012. Market Power Perbankan Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. 14(3): 235-256
- Macit, F. 2012. Recent Evidence on Concentration and Competition in Turkish Banking Sector. *Theoretical and Applied Economics* 19(8):19-28
- Malik, N. 2008. Struktur Pasar dan Perilaku Kompetitif Industri Perbankan Indonesia Pasca Implementasi API 2004. *Ekonomika-Bisnis* 1(1): 93-110
- Martin, S. 1994. *Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy Second Edition*. New York: Macmillan Publishing Company
- Miskhin, F. S. 1999. Financial Consolidation: Danger and Opportunities. *Journal of Banking and Finance* 23: 675-691
- Mulyaningsih, T dan Daly A. 2011. Competitive Conditions in Banking Industry: An Empirical Analysis of the Consolidation, Competition and Concentration in the Indonesia Banking Industry between 2001 and 2009. *Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan*, 14(2):151-186
- Murdadi, B. 2012. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Value Added*, 8(20): 32-46
- Nawasi & Martini, M. 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- Nirmalawati, D., Esti, R. H. & Hadinugroho, L. 2013. Dampak Regulasi Modal dan Kepemilikan Tunggal pada Persaingan Industri Perbankan di Indonesia. International Conference for Emerging Markets (ICEM)

- Nguyen, T.N. dan Stewart, C. 2010. Concentration and Efficiency in the Vietnamese Banking System between 1999 and 2009: a Structural Model Approach. *Working Paper Series No.12 London Metropolitan Business School*.
- Permata, B. P. 2013. Persamaan dan Perbedaan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan Financial Services Authority Inggris. Privat Law Edisi 02 Juli –Oktober 2013
- Phan, H.T dan Daly, K. 2013. Bank Competition in Emerging Asian Countries: Pre-Post the Global Financial Crisis. Proceedings of World Business and Social Science Research Conference 24-25 October 2013, Novotel Bangkok om Siam Square, Bangkok, Thailand
- Pradiptyo, Sasmitasiwi, Sahadewo, Rokhim, Ulpah & Faradynawati. 2010. Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik. Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM & FE UI
- Pradiptyo, Sasmitasiwi, Rokhim, Gumilang, Sahadewo, Ulpah, & Faradynawati. 2011. A Bridge too Far; The Strive o Establish a Financial Service Regulatory Authority (OJK) in Indonesia. *Munich Personel RePEc Archive (MPRA) Paper No. 32004*
- Rivai, Basir, Sudarto dan Veithzal. 2013. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sharma, M.K. dan Bal, H.K. 2010. Bank Market Concentration: A Case Study of India. *International Review of Business Research Papers* 6(6): 95-107
- Simorangkir, I. 2011. Penyebab Bank Runs di Indonesia: Bad Luck atau Fundamental? *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Juli 2011: 52-77
- Siregar, R.Y. & Williams, J. E. 2004. Designing an Integrated Financial Supervision Agency: Selected Lesson and Challenges for Indonesia. Centre for International Economic Studies Discussion Paper No. 0405
- Siringoringo, R. 2012. Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Juli 2012: 61-83
- Soedamono W. 2011 Bank Capital Inflows, Institutional Development and Risk: Evidence from Publicly-Traded Banks in Asia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. 14(2): 135-149
- Sugiyanto dan Jumono, S. 2012. Struktur, Perilaku dan Kinerja Perbankan Indonesia. *Forum Ilmiah* 9(2):133-141

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sutardjo, Daryanto, Arifin dan Priyarsono. 2011. Struktur Pasar Persaingan Perbankan Indonesia dalam Periode Konsolidasi. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis* 8(2): 115-128
- Titilayo, B.O dan Victor, O.T. 2014. Bank Consolidation and Market Structure n Nigeria: Application of the Herfindahl-Hirschman Index. *International Journal of Economics and Finance* 6(2).
- Tushaj, A. 2010. Market Concentration in the Banking Sector: Evidence from Albania. *Bamberg Economic Research Group (BERG) Working Paper Series on government and Growth* No.73
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi ketiga. Jember: Jember University Press.
- Usman, H. & Akbar, P. S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Warjiyo, P. 2004. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PSSK) Bank Indonesia
- Widyastuti, S. dan Armanto B. 2013. Kompetisi Industri Perbankan Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 15(4):418-436
- Yildirim, H.S. dan Philippatos, G. 2006. Restructuring, Consolidation and Competition in Latin American Banking Markets.

Lampiran A

A.1 Daftar 10 Bank dengan Pangsa Aset Terbesar (CR10)

NO	NAMA BANK	2001		NAMA BANK	2002	
		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	261.300.870	24,22	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	249.169.809	23,01
2	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	128.577.202	11,92	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	125.455.990	11,58
3	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	103.032.534	9,55	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	117.137.843	10,82
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	75.716.081	7,02	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	86.344.896	7,97
5	PT. BANK DANAMON INDONESIA	52.676.743	4,88	PT. BANK DANAMON INDONESIA	46.909.240	4,33
6	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	30.461.588	2,82	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	36.156.557	3,34
7	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	26.509.197	2,46	PT. BANK BALI, Tbk	27.873.532	2,57
8	PT. BANK BALI, Tbk	26.486.734	2,45	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	27.071.977	2,50
9	CITIBANK	25.547.409	2,37	PT. BANK LIPPO, Tbk	25.200.175	2,33
10	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	23.859.175	2,21	CITIBANK	24.562.360	2,27
	TOTAL ASET INDUSTRI	1.078.978.908	<b>69,90</b>	TOTAL ASET INDUSTRI	1.083.000.342	<b>70,72</b>

NO	NAMA BANK	2003		NAMA BANK	2004	
		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	245.811.737	21,24	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	240.436.505	19,17
2	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	132.969.372	11,49	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	148.750.288	11,86
3	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	131.576.926	11,37	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	136.066.651	10,85
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	94.709.726	8,18	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	107.040.172	8,53
5	PT. BANK DANAMON INDONESIA	52.680.025	4,55	PT. BANK DANAMON INDONESIA	57.637.257	4,60
6	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	34.606.263	2,99	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	35.794.487	2,85
7	PT. BANK PERMATA, Tbk	28.868.580	2,49	PT. BANK PERMATA, Tbk	31.597.908	2,52
8	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	26.805.829	2,32	PT. BANK NIAGA	30.637.555	2,44
9	PT. BANK LIPPO, Tbk	26.466.353	2,29	PT. BANK LIPPO, Tbk	27.832.108	2,22
10	PT. BANK NIAGA	23.621.859	2,04	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	26.743.114	2,13

NO	NAMA BANK	2005		NAMA BANK	2006	
		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	254.289.275	17,55	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	256.211.217	15,35
2	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	149.663.350	10,33	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	176.183.585	10,56
3	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	147.108.315	10,15	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	168.803.456	10,11
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	122.775.579	8,47	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	154.725.486	9,27
5	PT. BANK DANAMON INDONESIA	66.763.707	4,61	PT. BANK DANAMON INDONESIA	79.598.490	4,77
6	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	47.332.844	3,27	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	48.253.624	2,89
7	PT. BANK NIAGA	41.362.277	2,85	PT. BANK NIAGA	46.452.272	2,78
8	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	35.757.586	2,47	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	39.098.477	2,34
9	PT. BANK PERMATA, Tbk	34.594.193	2,39	PT. BANK PERMATA, Tbk	37.769.729	2,26
10	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	32.575.464	2,25	CITIBANK	37.550.519	2,25
	<b>TOTAL ASET INDUSTRI</b>	<b>1.449.240.322</b>	<b>64,32</b>	<b>TOTAL ASET INDUSTRI</b>	<b>1.668.895.655</b>	<b>62,60</b>

NO	NAMA BANK	2007		NAMA BANK	2008	
		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	303.435.870	15,28	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	338.404.265	14,97
2	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	217.180.173	10,94	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	264.026.225	11,68
3	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	203.603.934	10,25	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	244.729.251	10,82
4	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	182.007.749	9,17	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	200.390.507	8,86
5	PT. BANK NIAGA	93.257.331	4,70	PT. BANK DANAMON INDONESIA	104.821.926	4,64
6	PT. BANK DANAMON INDONESIA	86.617.017	4,36	PT. BANK CIMB NIAGA	102.604.732	4,54
7	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	51.192.502	2,58	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	62.772.547	2,78
8	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	50.527.287	2,54	PT. BANK PERMATA, Tbk	53.959.827	2,39
9	CITIBANK	44.215.733	2,23	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	53.778.786	2,38
10	PT. BANK PERMATA, Tbk	39.183.704	1,97	CITIBANK	52.329.336	2,31
	<b>TOTAL ASET INDUSTRI</b>	<b>1.985.636.569</b>	<b>64,02</b>	<b>TOTAL ASET INDUSTRI</b>	<b>2.261.117.199</b>	<b>65,36</b>

NO	NAMA BANK	2009		NAMA BANK	2010	
		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	370.310.994	14,92	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	408.771.732	13,99
2	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	314.748.430	12,68	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	398.393.138	13,64
3	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	280.817.338	11,31	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	321.973.412	11,02
4	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	225.541.328	9,08	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	240.590.147	8,24
5	PT. BANK CIMB NIAGA	106.803.360	4,30	PT. BANK CIMB NIAGA	142.812.919	4,89
6	PT. BANK DANAMON INDONESIA	96.630.214	3,89	PT. BANK DANAMON INDONESIA	113.864.875	3,90
7	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	76.075.202	3,06	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	105.918.394	3,63
8	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	58.701.483	2,36	PT. BANK PERMATA, Tbk	73.570.333	2,52
9	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	58.447.667	2,35	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	71.624.563	2,45
10	PT. BANK PERMATA, Tbk	56.186.702	2,26	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	68.385.539	2,34
	<b>TOTAL ASET INDUSTRI</b>	<b>2.482.660.851</b>	<b>66,23</b>	<b>TOTAL ASET INDUSTRI</b>	<b>2.921.354.862</b>	<b>66,61</b>

NO	NAMA BANK	2011		NAMA BANK	2013	
		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)		T. ASET (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	489.106.664	13,78	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	647.152.376	13,60
2	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	456.531.093	12,87	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	606.370.242	12,74
3	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	377.250.966	10,63	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	488.508.280	10,27
4	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	288.511.901	8,13	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	371.045.746	7,80
5	PT. BANK CIMB NIAGA	164.137.582	4,63	PT. BANK CIMB NIAGA	213.573.570	4,49
6	PT. BANK DANAMON INDONESIA	155.791.308	4,39	PT. BANK PERMATA, Tbk	165.542.733	3,48
7	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	118.269.344	3,33	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	154.128.770	3,24
8	PT. BANK PERMATA, Tbk	101.534.393	2,86	PT. BANK DANAMON INDONESIA	151.977.554	3,19
9	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	90.740.977	2,56	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	135.088.430	2,84
10	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	89.121.459	2,51	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	131.237.122	2,76
	<b>TOTAL ASET INDUSTRI</b>	<b>3.548.462.275</b>	<b>65,69</b>	<b>TOTAL ASET INDUSTRI</b>	<b>4.757.832.089</b>	<b>64,41</b>

**A.2 Daftar 10 Bank dengan Pangsa DPK Terbesar (CR10)**

NO	NAMA BANK	2001		NAMA BANK	2002	
		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	189.027.647	23,31	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	183.192.945	22,08
2	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	100.229.553	12,36	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	103.677.250	12,50
3	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	90.287.308	11,13	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	96.673.317	11,65
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	57.694.910	7,12	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	69.611.928	8,39
5	PT. BANK DANAMON INDONESIA	39.799.052	4,91	PT. BANK DANAMON INDONESIA	34.882.573	4,21
6	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	24.894.788	3,07	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	29.102.777	3,51
7	PT. BANK BALI, Tbk	22.179.715	2,74	PT. BANK LIPPO, Tbk	22.062.195	2,66
8	CITIBANK	20.896.782	2,58	PT. BANK BALI, Tbk	21.843.860	2,63
9	PT. BANK LIPPO, Tbk	19.988.907	2,47	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	19.899.204	2,40
10	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	18.174.835	2,24	CITIBANK	18.491.248	2,23
	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>810.887.147</b>	<b>71,92</b>	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>829.531.358</b>	<b>72,26</b>

NO	NAMA BANK	2003		NAMA BANK	2004	
		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	176.158.193	19,70	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	169.994.363	17,84
2	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	117.988.743	13,20	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	131.637.551	13,82
3	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	104.074.301	11,64	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	104.310.521	10,95
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	76.227.286	8,53	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	82.398.747	8,65
5	PT. BANK DANAMON INDONESIA	39.699.419	4,44	PT. BANK DANAMON INDONESIA	40.179.946	4,22
6	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	28.573.534	3,20	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	29.494.860	3,10
7	PT. BANK LIPPO, Tbk	23.783.174	2,66	PT. BANK PERMATA, Tbk	25.953.916	2,72
8	PT. BANK PERMATA, Tbk	23.446.344	2,62	PT. BANK LIPPO, Tbk	24.852.485	2,61
9	PT. BANK NIAGA	19.348.006	2,16	PT. BANK NIAGA	24.739.558	2,60
10	CITIBANK	19.318.430	2,16	CITIBANK	19.909.336	2,09
	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>894.054.760</b>	<b>70,31</b>	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>952.748.123</b>	<b>68,59</b>

NO	NAMA BANK	2005		NAMA BANK	2006	
		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	199.037.097	17,86	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	197.438.261	15,56
2	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	129.555.911	11,62	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	152.737.016	12,04
3	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	114.620.403	10,28	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	135.016.585	10,64
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	97.045.469	8,71	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	124.466.447	9,81
5	PT. BANK DANAMON INDONESIA	44.311.767	3,98	PT. BANK DANAMON INDONESIA	54.125.843	4,27
6	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	36.661.803	3,29	PT. BANK NIAGA	39.153.386	3,09
7	PT. BANK NIAGA	34.387.175	3,09	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	36.893.446	2,91
8	PT. BANK PERMATA, Tbk	28.301.828	2,54	PT. BANK PERMATA, Tbk	28.660.303	2,26
9	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	27.290.171	2,45	CITIBANK	27.061.882	2,13
10	CITIBANK	25.978.315	2,33	PT. BANK LIPPO, Tbk	26.693.173	2,10
	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>1.114.522.609</b>	<b>66,14</b>	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>1.268.522.203</b>	<b>64,82</b>

NO	NAMA BANK	2007		NAMA BANK	2008	
		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	235.802.393	15,54	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	273.565.806	15,86
2	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	189.177.865	12,47	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	209.534.858	12,15
3	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	165.475.256	10,90	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	201.495.222	11,68
4	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	144.624.999	9,53	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	160.283.417	9,29
5	PT. BANK NIAGA	75.532.367	4,98	PT. BANK CIMB NIAGA	84.065.431	4,87
6	PT. BANK DANAMON INDONESIA	57.372.164	3,78	PT. BANK DANAMON INDONESIA	73.953.033	4,29
7	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	36.772.754	2,42	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	46.281.634	2,68
8	CITIBANK	31.828.333	2,10	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	43.448.673	2,52
9	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	31.368.961	2,07	PT. BANK PERMATA, Tbk	42.803.015	2,48
10	PT. BANK LIPPO, Tbk	30.365.877	2,00	CITIBANK	34.289.447	1,99
	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>1.517.491.521</b>	<b>65,79</b>	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>1.724.539.640</b>	<b>67,83</b>

NO	NAMA BANK	2009		NAMA BANK	2010	
		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	299.721.940	15,54	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	332.727.856	14,71
2	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	254.168.613	13,18	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	328.555.801	14,52
3	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	244.666.006	12,68	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	277.533.692	12,27
4	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	184.590.063	9,57	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	189.378.393	8,37
5	PT. BANK CIMB NIAGA	84.523.143	4,38	PT. BANK CIMB NIAGA	115.375.988	5,10
6	PT. BANK DANAMON INDONESIA	67.141.579	3,48	PT. BANK DANAMON INDONESIA	79.541.163	3,52
7	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	56.307.224	2,92	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	75.054.982	3,32
8	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	47.515.274	2,46	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	59.507.744	2,63
9	PT. BANK PERMATA, Tbk	44.636.259	2,31	PT. BANK PERMATA, Tbk	57.711.510	2,55
10	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	38.949.509	2,02	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	45.332.091	2,00
	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>1.929.041.673</b>	<b>68,54</b>	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>2.262.440.358</b>	<b>68,98</b>

NO	NAMA BANK	2011		NAMA BANK	2013	
		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)		DPK (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	380.236.178	14,23	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	499.718.040	14,34
2	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	372.148.122	13,93	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	486.366.371	13,96
3	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	323.457.283	12,10	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	409.513.564	11,76
4	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	224.755.289	8,41	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	280.743.853	8,06
5	PT. BANK CIMB NIAGA	127.677.474	4,78	PT. BANK CIMB NIAGA	157.323.703	4,52
6	PT. BANK DANAMON INDONESIA	88.836.632	3,32	PT. BANK PERMATA, Tbk	121.001.693	3,47
7	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	85.536.601	3,20	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	117.421.976	3,37
8	PT. BANK PERMATA, Tbk	79.258.385	2,97	PT. BANK DANAMON INDONESIA	108.894.184	3,13
9	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	70.075.044	2,62	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	104.350.300	3,00
10	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	58.649.604	2,19	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	90.852.326	2,61
	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>2.672.512.989</b>	<b>67,75</b>	<b>TOTAL DPK INDUSTRI</b>	<b>3.483.715.771</b>	<b>68,21</b>

**A.3 Daftar 10 Bank dengan Pangsa Kredit Terbesar (CR10)**

NO	NAMA BANK	2001		NAMA BANK	2002	
		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	47.199.515	14,14	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	63.940.617	16,95
2	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	35.265.277	10,56	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	39.367.419	10,43
3	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	32.357.625	9,69	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	37.501.252	9,94
4	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	14.752.324	4,42	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	21.495.924	5,70
5	CITIBANK	12.061.382	3,61	PT. BANK DANAMON INDONESIA	18.167.557	4,82
6	PT. BANK DANAMON INDONESIA	10.484.535	3,14	PT. BANK NIAGA	11.651.977	3,09
7	PT. BANK BALI, Tbk	9.922.582	2,97	CITIBANK	10.995.170	2,91
8	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	8.808.951	2,64	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	10.210.984	2,71
9	PT. BANK NIAGA	8.780.514	2,63	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	9.751.343	2,58
10	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	8.727.877	2,61	PT. BANK BALI, Tbk	8.927.313	2,37
TOTAL KREDIT INDUSTRI		333.869.447	<b>56,42</b>	TOTAL KREDIT INDUSTRI	377.273.488	<b>61,50</b>

NO	NAMA BANK	2003		NAMA BANK	2004	
		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	73.310.718	16,56	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	88.544.603	15,89
2	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	47.523.002	10,73	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	62.367.695	11,20
3	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	46.504.457	10,50	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	57.197.129	10,27
4	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	29.328.716	6,62	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	40.383.971	7,25
5	PT. BANK DANAMON INDONESIA	19.891.510	4,49	PT. BANK DANAMON INDONESIA	28.944.118	5,20
6	PT. BANK NIAGA	14.284.022	3,23	PT. BANK NIAGA	21.121.779	3,79
7	PT. BANK BUKOPIN	13.225.361	2,99	PT. BANK PERMATA, Tbk	14.785.416	2,65
8	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	11.160.966	2,52	PT. BANK BUKOPIN	12.976.777	2,33
9	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	10.003.930	2,26	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	12.889.140	2,31
10	CITIBANK	9.878.487	2,23	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	12.608.978	2,26
TOTAL KREDIT INDUSTRI		442.785.050	<b>62,13</b>	TOTAL KREDIT INDUSTRI	557.085.681	<b>63,15</b>

NO	NAMA BANK	2005		NAMA BANK	2006	
		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	100.325.751	14,58	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	109.379.723	14,03
2	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	75.533.234	10,98	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	90.282.752	11,58
3	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	61.831.568	8,99	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	65.507.448	8,40
4	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	54.170.186	7,87	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	61.595.395	7,90
5	PT. BANK DANAMON INDONESIA	35.790.612	5,20	PT. BANK DANAMON INDONESIA	40.878.420	5,24
6	PT. BANK NIAGA	29.352.110	4,27	PT. BANK NIAGA	33.194.708	4,26
7	PT. BANK PERMATA, Tbk	22.207.182	3,23	PT. BANK PERMATA, Tbk	23.804.500	3,05
8	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	20.280.544	2,95	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	21.295.476	2,73
9	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	18.086.350	2,63	CITIBANK	20.859.996	2,68
10	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	15.059.284	2,19	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	19.137.017	2,46
	TOTAL KREDIT INDUSTRI	688.055.435	<b>62,88</b>	TOTAL KREDIT INDUSTRI	779.485.155	<b>62,34</b>

NO	NAMA BANK	2007		NAMA BANK	2008	
		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	126.826.445	12,60	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	161.061.059	12,63
2	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	113.853.335	11,31	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	159.007.051	12,47
3	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	86.875.192	8,63	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	112.846.634	8,85
4	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	82.566.624	8,21	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	108.896.144	8,54
5	PT. BANK NIAGA	59.934.606	5,96	PT. BANK CIMB NIAGA	73.918.341	5,80
6	PT. BANK DANAMON INDONESIA	50.926.572	5,06	PT. BANK DANAMON INDONESIA	64.233.906	5,04
7	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	29.549.177	2,94	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	36.868.879	2,89
8	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	28.365.466	2,82	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	35.057.139	2,75
9	PT. BANK PERMATA, Tbk	26.454.502	2,63	PT. BANK PERMATA, Tbk	34.850.805	2,73
10	CITIBANK	22.346.349	2,22	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	32.025.231	2,51
	TOTAL KREDIT INDUSTRI	1.006.289.473	<b>62,38</b>	TOTAL KREDIT INDUSTRI	1.275.381.650	<b>64,20</b>

NO	NAMA BANK	2009		NAMA BANK	2010	
		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	205.563.569	14,51	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	246.968.128	14,47
2	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	179.687.845	12,68	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	218.992.542	12,83
3	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	123.901.269	8,74	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	153.923.157	9,02
4	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	117.644.695	8,30	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	132.852.979	7,78
5	PT. BANK CIMB NIAGA	81.936.661	5,78	PT. BANK CIMB NIAGA	102.108.984	5,98
6	PT. BANK DANAMON INDONESIA	59.832.098	4,22	PT. BANK DANAMON INDONESIA	75.090.482	4,40
7	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	43.200.105	3,05	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	57.525.466	3,37
8	PT. BANK PERMATA, Tbk	40.059.119	2,83	PT. BANK PERMATA, Tbk	50.589.480	2,96
9	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	38.737.202	2,73	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	49.695.623	2,91
10	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	37.491.774	2,65	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	48.702.920	2,85
	<b>TOTAL KREDIT INDUSTRI</b>	<b>1.416.878.145</b>	<b>65,50</b>	<b>TOTAL KREDIT INDUSTRI</b>	<b>1.706.960.446</b>	<b>66,58</b>

NO	NAMA BANK	2011		NAMA BANK	2013	
		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)		KREDIT (Juta Rp)	PANGSA (%)
1	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	283.586.497	13,36	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	430.621.874	13,68
2	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	273.962.101	12,91	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	416.978.030	13,25
3	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	202.268.608	9,53	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	312.380.146	9,93
4	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	158.164.743	7,45	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	239.363.451	7,61
5	PT. BANK CIMB NIAGA	120.219.882	5,66	PT. BANK CIMB NIAGA	143.641.157	4,56
6	PT. BANK DANAMON INDONESIA	91.532.966	4,31	PT. BANK PERMATA, Tbk	106.980.019	3,40
7	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	70.793.812	3,34	PT. BANK DANAMON INDONESIA	103.895.851	3,30
8	PT. BANK PERMATA, Tbk	65.859.107	3,10	PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	103.045.656	3,27
9	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	62.574.123	2,95	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	92.386.308	2,94
10	PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	59.337.756	2,80	PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	92.202.514	2,93
	<b>TOTAL KREDIT INDUSTRI</b>	<b>2.122.519.116</b>	<b>65,41</b>	<b>TOTAL KREDIT INDUSTRI</b>	<b>3.147.350.691</b>	<b>64,86</b>

**A.4 Rata-rata penguasaan aset, DPK dan kredit berdasarkan Kelompok Bank**

Tahun	Total Aset						Dana Pihak Ketiga (DPK)						Kredit					
	Bank Persero	BUSN Devisa	Bank Asing	BPD	Bank Campuran	BUSN Non-Devisa	Bank Persero	BUSN Devisa	Bank Asing	BPD	Bank Campuran	BUSN Non-Devisa	Bank Persero	BUSN Devisa	Bank Asing	BPD	Bank Campuran	BUSN Non-Devisa
2001	46,65	35,18	8,40	4,34	4,06	1,36	39,28	43,70	4,42	8,19	2,97	1,44	38,58	32,03	13,45	4,60	9,03	2,31
2002	45,65	35,97	7,52	5,35	3,85	1,66	39,74	42,91	5,32	6,90	2,81	2,31	41,44	33,54	9,63	5,69	7,15	2,56
2003	43,53	37,30	7,71	5,83	3,69	1,94	40,01	41,47	5,86	7,28	2,75	2,63	41,22	35,36	8,15	6,60	5,88	2,78
2004	41,34	38,38	8,40	6,24	4,22	1,42	41,23	39,03	6,16	8,00	3,24	2,34	40,74	36,12	8,36	6,70	5,90	2,19
2005	39,00	38,43	9,69	7,30	4,30	1,29	40,60	38,79	7,66	8,27	3,27	1,41	37,90	38,89	9,21	6,54	5,72	1,75
2006	37,27	38,49	9,29	9,51	4,09	1,36	40,75	37,41	10,09	7,19	3,10	1,46	37,12	38,69	9,56	7,18	5,58	1,86
2007	37,13	39,26	8,76	8,50	4,79	1,56	41,05	37,28	8,78	7,39	3,92	1,59	35,43	40,43	8,87	7,15	6,20	1,92
2008	38,04	36,68	9,84	8,13	5,76	1,55	39,34	38,41	8,24	7,47	4,92	1,61	36,93	38,55	9,16	7,55	6,73	1,07
2009	39,07	37,38	8,16	7,98	5,48	1,93	40,13	39,61	7,75	5,61	4,93	1,97	38,23	38,02	7,35	8,55	5,72	2,13
2010	38,21	38,86	7,54	8,12	5,02	2,25	41,47	38,93	7,87	5,39	4,21	2,13	37,90	39,51	6,85	8,21	5,20	2,33
2011	37,29	39,39	7,50	8,50	4,87	2,45	41,70	38,24	8,57	5,21	3,98	2,30	36,47	40,70	6,70	8,04	5,54	2,56
2012	37,33	38,89	7,31	8,86	4,96	2,65	38,91	40,15	9,11	5,20	4,04	2,58	37,03	39,79	6,88	8,22	5,38	2,71
2013	36,90	38,51	8,11	8,12	5,60	2,76	38,81	40,47	8,41	5,17	4,46	2,69	37,53	38,42	7,48	8,16	5,73	2,68
Total	517,41	492,72	108,23	96,78	60,69	24,18	523,02	516,40	98,24	87,27	48,60	26,46	496,52	490,05	111,65	93,19	79,76	28,85
Rata-rata	<b>39,80</b>	<b>37,90</b>	<b>8,33</b>	<b>7,44</b>	<b>4,67</b>	<b>1,86</b>	<b>40,23</b>	<b>39,72</b>	<b>7,56</b>	<b>6,71</b>	<b>3,74</b>	<b>2,04</b>	<b>38,19</b>	<b>37,70</b>	<b>8,59</b>	<b>7,17</b>	<b>6,14</b>	<b>2,22</b>

**LAMPIRAN B.**

**B.1 Perhitungan Koefisien Gini Total Aset Tahun 2001 dan 2013**

KOEFSIEN GINI TAHUN 2001								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
PT BANK SWAGUNA	11.790	1	11.790	0,007	0,000	0,007	0,000	0,000
PT. BANK ALFINDO SEJAHTERA	35.276	2	47.066	0,014	0,000	0,007	0,000	0,000
PT BANK CREDIT LYONNAIS	46.525	3	93.591	0,021	0,000	0,007	0,000	0,000
PT. BANK PURBA DANARTA	52.653	4	146.244	0,028	0,000	0,007	0,000	0,000
PT. BANK ROYAL INDONESIA	58.012	5	204.256	0,035	0,000	0,007	0,000	0,000
PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK	99.160	6	303.416	0,043	0,000	0,007	0,000	0,000
PT BANK BINTANG MANUNGGAL, Tbk	105.549	7	408.965	0,050	0,000	0,007	0,001	0,000
PT. BANK ARTOS INDONESIA	120.017	8	528.982	0,057	0,000	0,007	0,001	0,000
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI	120.398	9	649.380	0,064	0,001	0,007	0,001	0,000
PT BANK HARMONI INTERNASIONAL	127.047	10	776.427	0,071	0,001	0,007	0,001	0,000
PT LIMAN INTERNASIONAL BANK	136.580	11	913.007	0,078	0,001	0,007	0,002	0,000
PT BANK MAYORA	142.237	12	1.055.244	0,085	0,001	0,007	0,002	0,000
PT BANK INA PERDANA	144.525	13	1.199.769	0,092	0,001	0,007	0,002	0,000
PT BANK FAMA INTERNASIONAL	144.828	14	1.344.597	0,099	0,001	0,007	0,002	0,000
PT BANK PERSYARIKATAN INDONESIA	153.191	15	1.497.788	0,106	0,001	0,007	0,003	0,000
PT. BANK MITRANIAGA	156.618	16	1.654.406	0,113	0,002	0,007	0,003	0,000
PR BANK HARFA	171.929	17	1.826.335	0,121	0,002	0,007	0,003	0,000
PT BPD SULAWESI TENGAH	180.719	18	2.007.054	0,128	0,002	0,007	0,004	0,000
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL	183.019	19	2.190.073	0,135	0,002	0,007	0,004	0,000
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA	190.341	20	2.380.414	0,142	0,002	0,007	0,004	0,000
PT. BANK PATRIOT	193.215	21	2.573.629	0,149	0,002	0,007	0,005	0,000
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK	198.724	22	2.772.353	0,156	0,003	0,007	0,005	0,000
PT BANK JASA ARTA	200.724	23	2.973.077	0,163	0,003	0,007	0,005	0,000
PT BPD BENGKULU	208.617	24	3.181.694	0,170	0,003	0,007	0,006	0,000
PT PRIMA MASTER BANK	216.389	25	3.398.083	0,177	0,003	0,007	0,006	0,000

PT. BANK INDO MONEX	225.672	26	3.623.755	0,184	0,003	0,007	0,007	0,000
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI	248.817	27	3.872.572	0,191	0,004	0,007	0,007	0,000
PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk	254.371	28	4.126.943	0,199	0,004	0,007	0,007	0,000
BPD SULAWESI TENGGARA	273.098	29	4.400.041	0,206	0,004	0,007	0,008	0,000
PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk	293.846	30	4.693.887	0,213	0,004	0,007	0,008	0,000
PT. BANK METRO EXPRESS	308.529	31	5.002.416	0,220	0,005	0,007	0,009	0,000
PT BANK HARDA INTERNASIONAL	322.798	32	5.325.214	0,227	0,005	0,007	0,010	0,000
PT. BANK SOCIETE GENERALE INDONESIA	325.658	33	5.650.872	0,234	0,005	0,007	0,010	0,000
PT. BANK ICBC INDONESIA	335.325	34	5.986.197	0,241	0,006	0,007	0,011	0,000
PT. BANK DIPO INTERNASIONAL	341.154	35	6.327.351	0,248	0,006	0,007	0,011	0,000
PT. BANK SRI PARTHA	342.181	36	6.669.532	0,255	0,006	0,007	0,012	0,000
PT BANK UIB	416.928	37	7.086.460	0,262	0,007	0,007	0,013	0,000
PT BPD JAMBI	421.247	38	7.507.707	0,270	0,007	0,007	0,014	0,000
PT. BANK ASIATIC	427.427	39	7.935.134	0,277	0,007	0,007	0,014	0,000
PT. BANK BARCLAYS INDONESIA	433.832	40	8.368.966	0,284	0,008	0,007	0,015	0,000
PT. BANK SWADESI, Tbk	435.179	41	8.804.145	0,291	0,008	0,007	0,016	0,000
PT. BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ	452.141	42	9.256.286	0,298	0,009	0,007	0,017	0,000
BPD NUSA TENGGARA TIMUR	489.064	43	9.745.350	0,305	0,009	0,007	0,018	0,000
PT. BANK HAGAKITA	510.169	44	10.255.519	0,312	0,010	0,007	0,019	0,000
PT. BANK ANTAR DAERAH	524.447	45	10.779.966	0,319	0,010	0,007	0,019	0,000
PT BANK MAYBANK INDOCORP	532.632	46	11.312.598	0,326	0,010	0,007	0,020	0,000
PT BPD LAMPUNG	534.954	47	11.847.552	0,333	0,011	0,007	0,021	0,000
PT. BANK OCBC INDONESIA	535.275	48	12.382.827	0,340	0,011	0,007	0,022	0,000
PT. BANK INDEX SELINDO	536.390	49	12.919.217	0,348	0,012	0,007	0,023	0,000
PT BANK MERINCORP	558.873	50	13.478.090	0,355	0,012	0,007	0,024	0,000
PT. BANK SINARMAS, Tbk	578.094	51	14.056.184	0,362	0,013	0,007	0,026	0,000
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT	596.917	52	14.653.101	0,369	0,014	0,007	0,027	0,000
PT. BANK GANESHA	618.107	53	15.271.208	0,376	0,014	0,007	0,028	0,000
PT BANK KALIMANTAN TENGAH	637.727	54	15.908.935	0,383	0,015	0,007	0,029	0,000
PT. ING INDONESIA BANK	691.913	55	16.600.848	0,390	0,015	0,007	0,030	0,000

PT. BANK MULTICOR	693.674	56	17.294.522	0,397	0,016	0,007	0,031	0,000
PT BPD MALUKU	696.695	57	17.991.217	0,404	0,017	0,007	0,033	0,000
PT. BANK INTERPACIFIC	718.238	58	18.709.455	0,411	0,017	0,007	0,034	0,000
PT. BANK DANPAC	722.291	59	19.431.746	0,418	0,018	0,007	0,035	0,000
PT BPD SULAWESI UTARA	738.620	60	20.170.366	0,426	0,019	0,007	0,037	0,000
PT. BANK ARTA NIAGA KENCANA	745.975	61	20.916.341	0,433	0,019	0,007	0,038	0,000
PT BPD KALIMANTAN SELATAN	751.545	62	21.667.886	0,440	0,020	0,007	0,039	0,000
BPD YOGYAKARTA	761.781	63	22.429.667	0,447	0,021	0,007	0,041	0,000
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA	775.417	64	23.205.084	0,454	0,022	0,007	0,042	0,000
PT. KEPPEL TAT LEE BUANA BANK	793.221	65	23.998.305	0,461	0,022	0,007	0,044	0,000
PT. BANK IFI	793.337	66	24.791.642	0,468	0,023	0,007	0,045	0,000
BANK OF AMERIKA	802.841	67	25.594.483	0,475	0,024	0,007	0,047	0,000
PT BPD KALIMANTAN BARAT	877.369	68	26.471.852	0,482	0,025	0,007	0,048	0,000
PT BANK JASA JAKARTA	880.060	69	27.351.912	0,489	0,025	0,007	0,050	0,000
PT. QNB KESAWAN, Tbk	894.187	70	28.246.099	0,496	0,026	0,007	0,052	0,000
PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk	924.922	71	29.171.021	0,504	0,027	0,007	0,053	0,000
PT. BANK COMMONWEALTH	1.019.474	72	30.190.495	0,511	0,028	0,007	0,055	0,000
PT. BANK YUDHA BAKTI	1.048.459	73	31.238.954	0,518	0,029	0,007	0,057	0,000
PT. BANK BUMI ARTA	1.071.348	74	32.310.302	0,525	0,030	0,007	0,059	0,000
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk	1.120.834	75	33.431.136	0,532	0,031	0,007	0,061	0,000
PT BANK FINCONESIA	1.121.709	76	34.552.845	0,539	0,032	0,007	0,063	0,000
PT GLOBAL INTERNASIONAL BANK	1.140.914	77	35.693.759	0,546	0,033	0,007	0,065	0,000
PT. BANK MASPION INDONESIA	1.148.279	78	36.842.038	0,553	0,034	0,007	0,067	0,000
PT BPD SUMSEL DAN BANGKA BELITUNG	1.164.537	79	38.006.575	0,560	0,035	0,007	0,069	0,000
PT BANK DBS INDONESIA	1.239.223	80	39.245.798	0,567	0,036	0,007	0,072	0,001
BPD SULAWESI SELATAN	1.249.269	81	40.495.067	0,574	0,038	0,007	0,074	0,001
PT. PRIMA EXPRESS BANK	1.280.386	82	41.775.453	0,582	0,039	0,007	0,076	0,001
THE BANGKOK BANK COMP., Ltd	1.282.937	83	43.058.390	0,589	0,040	0,007	0,079	0,001
PT BPD PAPUA	1.298.150	84	44.356.540	0,596	0,041	0,007	0,081	0,001
PT BPD ACEH	1.343.535	85	45.700.075	0,603	0,042	0,007	0,083	0,001

PT. BANK DAGANG BALI	1.369.478	86	47.069.553	0,610	0,044	0,007	0,086	0,001
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL	1.381.100	87	48.450.653	0,617	0,045	0,007	0,089	0,001
PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL, Tbk	1.503.155	88	49.953.808	0,624	0,046	0,007	0,091	0,001
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk	1.546.392	89	51.500.200	0,631	0,048	0,007	0,094	0,001
PT. BANK MESTIKA DHARMA	1.632.848	90	53.133.048	0,638	0,049	0,007	0,097	0,001
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk	1.638.125	91	54.771.173	0,645	0,051	0,007	0,100	0,001
PT. CHINATRUST INDONESIA	1.785.793	92	56.556.966	0,652	0,052	0,007	0,103	0,001
PT. BANK RABOBANK DUTA	1.813.156	93	58.370.122	0,660	0,054	0,007	0,107	0,001
PT ANZ PANIN BANK	1.882.436	94	60.252.558	0,667	0,056	0,007	0,110	0,001
PT BANK KEB INDONESIA	1.917.304	95	62.169.862	0,674	0,058	0,007	0,113	0,001
PT. BANK HANVIT INDONESIA	1.937.781	96	64.107.643	0,681	0,059	0,007	0,117	0,001
PT. BANK HAGA	1.992.310	97	66.099.953	0,688	0,061	0,007	0,121	0,001
PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk	2.000.662	98	68.100.615	0,695	0,063	0,007	0,124	0,001
PT BPD SUMATERA BARAT	2.122.568	99	70.223.183	0,702	0,065	0,007	0,128	0,001
PT. BANK UOB INDONESIA	2.171.591	100	72.394.774	0,709	0,067	0,007	0,132	0,001
PT BPD BALI	2.621.393	101	75.016.167	0,716	0,070	0,007	0,137	0,001
PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk	2.640.563	102	77.656.730	0,723	0,072	0,007	0,141	0,001
PT BPD SUMATERA UTARA	2.649.651	103	80.306.381	0,730	0,074	0,007	0,146	0,001
AMERICAN EXPRESS BANK, Ltd	2.663.110	104	82.969.491	0,738	0,077	0,007	0,151	0,001
JP MORGAN CHASE BANK	3.218.324	105	86.187.815	0,745	0,080	0,007	0,157	0,001
PT. BANK RESONA PERDANIA	3.366.361	106	89.554.176	0,752	0,083	0,007	0,163	0,001
BPD KALIMANTAN TIMUR	3.499.482	107	93.053.658	0,759	0,086	0,007	0,169	0,001
PT BPD RIAU KEPRI	3.865.901	108	96.919.559	0,766	0,090	0,007	0,176	0,001
PT BPD JAWA TENGAH	4.153.598	109	101.073.157	0,773	0,094	0,007	0,184	0,001
PT BANK DKI	4.566.613	110	105.639.770	0,780	0,098	0,007	0,192	0,001
PT. BANK EKONOMI RAHARJA	4.962.784	111	110.602.554	0,787	0,103	0,007	0,200	0,001
PT. UFJ INDONESIA	5.275.625	112	115.878.179	0,794	0,107	0,007	0,210	0,001
PT BPD JAWA TIMUR	5.551.354	113	121.429.533	0,801	0,113	0,007	0,220	0,002
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk	5.592.667	114	127.022.200	0,809	0,118	0,007	0,230	0,002
PT BANK MIZUHO INDONESIA	6.177.246	115	133.199.446	0,816	0,123	0,007	0,241	0,002

PT. BANK SUITOMO MITSUI INDONESIA	6.692.149	116	139.891.595	0,823	0,130	0,007	0,253	0,002
PT. BANK ARTA GRAHA	7.011.684	117	146.903.279	0,830	0,136	0,007	0,266	0,002
PT. BANK OCBC NISP, Tbk	7.131.074	118	154.034.353	0,837	0,143	0,007	0,279	0,002
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI, Ltd	7.695.091	119	161.729.444	0,844	0,150	0,007	0,293	0,002
PT. BANK BUKOPIN	9.602.001	120	171.331.445	0,851	0,159	0,007	0,309	0,002
STANDARD CHARTERED BANK	9.962.746	121	181.294.191	0,858	0,168	0,007	0,327	0,002
PT. BANK CIC	10.503.899	122	191.798.090	0,865	0,178	0,007	0,346	0,002
PT. BANK UNIVERSAL, Tbk	11.114.391	123	202.912.481	0,872	0,188	0,007	0,366	0,003
PT. BANK EKSPOR INDONESIA	11.233.044	124	214.145.525	0,879	0,198	0,007	0,387	0,003
PT. BANK MEGA, Tbk	12.232.072	125	226.377.597	0,887	0,210	0,007	0,408	0,003
PT. BANK UOB BUANA	12.274.101	126	238.651.698	0,894	0,221	0,007	0,431	0,003
DEUTSCHE BANK AG	12.339.919	127	250.991.617	0,901	0,233	0,007	0,454	0,003
ABN AMRO NV	13.061.938	128	264.053.555	0,908	0,245	0,007	0,477	0,003
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	14.103.263	129	278.156.818	0,915	0,258	0,007	0,503	0,004
PT. BANK NIAGA	22.843.572	130	301.000.390	0,922	0,279	0,007	0,537	0,004
PT. BANK LIPPO, Tbk	23.810.985	131	324.811.375	0,929	0,301	0,007	0,580	0,004
PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	23.859.175	132	348.670.550	0,936	0,323	0,007	0,624	0,004
CITIBANK	25.547.409	133	374.217.959	0,943	0,347	0,007	0,670	0,005
PT. BANK BALI, Tbk	26.486.734	134	400.704.693	0,950	0,371	0,007	0,718	0,005
PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	26.509.197	135	427.213.890	0,957	0,396	0,007	0,767	0,005
PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	30.461.588	136	457.675.478	0,965	0,424	0,007	0,820	0,006
PT. BANK DANAMON INDONESIA	52.676.743	137	510.352.221	0,972	0,473	0,007	0,897	0,006
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	75.716.081	138	586.068.302	0,979	0,543	0,007	1,016	0,007
PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	103.032.534	139	689.100.836	0,986	0,639	0,007	1,182	0,008
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	128.577.202	140	817.678.038	0,993	0,758	0,007	1,396	0,010
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	261.300.870	141	1.078.978.908	1,000	1,000	0,007	1,758	0,012
TOTAL ASET INDUSTRI	1.078.978.908					1,000	22,579	0,160
<b>Koefisien Gini 2001</b>							<b>0, 840</b>	

KOEFSIEN GINI TAHUN 2013								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK	177.461	1	177.461	0,009	0,000	0,009	0,000	0,000
PT. BANK SAHABAT PURBA DANARTA	300.438	2	477.899	0,018	0,000	0,009	0,000	0,000
PT. BANK ROYAL INDONESIA	469.929	3	947.828	0,028	0,000	0,009	0,000	0,000
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL	541.062	4	1.488.890	0,037	0,000	0,009	0,001	0,000
PT. BANK ARTOS INDONESIA	657.012	5	2.145.902	0,046	0,000	0,009	0,001	0,000
PT. BANK METRO EXPRESS	804.940	6	2.950.842	0,055	0,001	0,009	0,001	0,000
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK	839.607	7	3.790.449	0,064	0,001	0,009	0,001	0,000
PT BANK FAMA INTERNASIONAL	843.590	8	4.634.039	0,073	0,001	0,009	0,002	0,000
PT BANK DINAR INDONESIA	854.801	9	5.488.840	0,083	0,001	0,009	0,002	0,000
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI	1.094.972	10	6.583.812	0,092	0,001	0,009	0,003	0,000
PT. BANK MITRANIAGA	1.285.157	11	7.868.969	0,101	0,002	0,009	0,003	0,000
PT. BANK ANDARA	1.295.655	12	9.164.624	0,110	0,002	0,009	0,004	0,000
PT BANK INA PERDANA	1.402.171	13	10.566.795	0,119	0,002	0,009	0,004	0,000
PT BANK HARDA INTERNASIONAL	1.639.444	14	12.206.239	0,128	0,003	0,009	0,005	0,000
PT. BANK ANTAR DAERAH	1.675.462	15	13.881.701	0,138	0,003	0,009	0,005	0,000
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA	1.695.125	16	15.576.826	0,147	0,003	0,009	0,006	0,000
PT BPD SULAWESI TENGAH	1.797.346	17	17.374.172	0,156	0,004	0,009	0,007	0,000
PT. BANK GANESHA	1.993.409	18	19.367.581	0,165	0,004	0,009	0,008	0,000
PT PRIMA MASTER BANK	2.070.110	19	21.437.691	0,174	0,005	0,009	0,009	0,000
PT. BANK YUDHA BAKTI	2.304.508	20	23.742.199	0,183	0,005	0,009	0,009	0,000
PT BANK AGRIS	2.509.281	21	26.251.480	0,193	0,006	0,009	0,011	0,000
PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA	2.669.698	22	28.921.178	0,202	0,006	0,009	0,012	0,000
PT BANK MAYORA	2.839.786	23	31.760.964	0,211	0,007	0,009	0,013	0,000
PT. BANK SBI INDONESIA	2.856.828	24	34.617.792	0,220	0,007	0,009	0,014	0,000
BANK OF AMERIKA	2.921.864	25	37.539.656	0,229	0,008	0,009	0,015	0,000
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI	3.024.922	26	40.564.578	0,239	0,009	0,009	0,016	0,000
BPD SULAWESI TENGGARA	3.124.331	27	43.688.909	0,248	0,009	0,009	0,018	0,000
PT BPD BENGKULU	3.159.550	28	46.848.459	0,257	0,010	0,009	0,019	0,000

PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk	3.601.335	29	50.449.794	0,266	0,011	0,009	0,020	0,000
PT. BANK NATIONALNOBU	3.877.270	30	54.327.064	0,275	0,011	0,009	0,022	0,000
PT BANK KALIMANTAN TENGAH	3.972.968	31	58.300.032	0,284	0,012	0,009	0,024	0,000
PT. BANK BUMI ARTA	4.048.010	32	62.348.042	0,294	0,013	0,009	0,025	0,000
PT. BANK MASPION INDONESIA	4.170.476	33	66.518.518	0,303	0,014	0,009	0,027	0,000
PT BPD JAMBI	4.276.507	34	70.795.025	0,312	0,015	0,009	0,029	0,000
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT	4.319.265	35	75.114.290	0,321	0,016	0,009	0,031	0,000
PT BPD MALUKU	4.560.889	36	79.675.179	0,330	0,017	0,009	0,033	0,000
PT BPD LAMPUNG	4.590.407	37	84.265.586	0,339	0,018	0,009	0,034	0,000
PT BANK JASA JAKARTA	4.708.470	38	88.974.056	0,349	0,019	0,009	0,036	0,000
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA	4.890.503	39	93.864.559	0,358	0,020	0,009	0,038	0,000
PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk	5.124.070	40	98.988.629	0,367	0,021	0,009	0,041	0,000
PT. BANK INDEX SELINDO	5.286.660	41	104.275.289	0,376	0,022	0,009	0,043	0,000
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV	5.581.113	42	109.856.402	0,385	0,023	0,009	0,045	0,000
PT BANK KEB INDONESIA	5.896.601	43	115.753.003	0,394	0,024	0,009	0,047	0,000
PT. BANK WOORI INDONESIA	6.221.881	44	121.974.884	0,404	0,026	0,009	0,050	0,000
BPD YOGYAKARTA	6.523.243	45	128.498.127	0,413	0,027	0,009	0,053	0,000
PT BANK CAPITAL INDONESIA	7.139.276	46	135.637.403	0,422	0,029	0,009	0,056	0,001
BPD NUSA TENGGARA TIMUR	7.267.810	47	142.905.213	0,431	0,030	0,009	0,059	0,001
PT BPD SULAWESI UTARA	7.805.462	48	150.710.675	0,440	0,032	0,009	0,062	0,001
PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL	7.917.214	49	158.627.889	0,450	0,033	0,009	0,065	0,001
PT. BANK MESTIKA DHARMA	8.004.635	50	166.632.524	0,459	0,035	0,009	0,068	0,001
BPD SULAWESI SELATAN	8.059.960	51	174.692.484	0,468	0,037	0,009	0,072	0,001
PT. BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk	8.188.437	52	182.880.921	0,477	0,038	0,009	0,075	0,001
PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk	8.196.244	53	191.077.165	0,486	0,040	0,009	0,079	0,001
PT BANK HANA	8.692.545	54	199.769.710	0,495	0,042	0,009	0,082	0,001
PT. CHINATRUST INDONESIA	8.832.307	55	208.602.017	0,505	0,044	0,009	0,086	0,001
PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk	9.003.124	56	217.605.141	0,514	0,046	0,009	0,090	0,001
PT BPD KALIMANTAN SELATAN	9.473.179	57	227.078.320	0,523	0,048	0,009	0,093	0,001
PT BPD KALIMANTAN BARAT	9.642.735	58	236.721.055	0,532	0,050	0,009	0,097	0,001

PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk	9.985.736	59	246.706.791	0,541	0,052	0,009	0,102	0,001
PT. QNB KESAWAN, Tbk	11.047.815	60	257.754.606	0,550	0,054	0,009	0,106	0,001
PT. RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA	13.543.874	61	271.298.480	0,560	0,057	0,009	0,111	0,001
PT. BANK RESONA PERDANIA	13.849.147	62	285.147.627	0,569	0,060	0,009	0,117	0,001
PT BPD SUMSEL DAN BANGKA BELITUNG	14.220.980	63	299.368.607	0,578	0,063	0,009	0,123	0,001
PT BPD BALI	14.366.984	64	313.735.591	0,587	0,066	0,009	0,129	0,001
PT. BANK MUTIARA	14.576.094	65	328.311.685	0,596	0,069	0,009	0,135	0,001
BANK OF CHINA LIMITED	15.094.347	66	343.406.032	0,606	0,072	0,009	0,141	0,001
THE BANGKOK BANK COMP., Ltd	15.162.270	67	358.568.302	0,615	0,075	0,009	0,148	0,001
PT BPD ACEH	15.250.212	68	373.818.514	0,624	0,079	0,009	0,154	0,001
JP MORGAN CHASE BANK	15.421.561	69	389.240.075	0,633	0,082	0,009	0,160	0,001
PT BPD SUMATERA BARAT	16.244.113	70	405.484.188	0,642	0,085	0,009	0,167	0,002
PT. BANK SINARMAS, Tbk	17.447.455	71	422.931.643	0,651	0,089	0,009	0,174	0,002
PT BPD PAPUA	17.665.211	72	440.596.854	0,661	0,093	0,009	0,181	0,002
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL	18.003.522	73	458.600.376	0,670	0,096	0,009	0,189	0,002
PT BPD RIAU KEPRI	19.459.918	74	478.060.294	0,679	0,100	0,009	0,197	0,002
PT. BANK COMMONWEALTH	20.611.792	75	498.672.086	0,688	0,105	0,009	0,205	0,002
PT. BANK ARTA GRAHA INTERNASIONAL	21.208.898	76	519.880.984	0,697	0,109	0,009	0,214	0,002
PT BPD SUMATERA UTARA	21.494.699	77	541.375.683	0,706	0,114	0,009	0,223	0,002
DEUTSCHE BANK AG	23.531.809	78	564.907.492	0,716	0,119	0,009	0,233	0,002
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk	24.015.572	79	588.923.064	0,725	0,124	0,009	0,243	0,002
BPD KALIMANTAN TIMUR	27.615.848	80	616.538.912	0,734	0,130	0,009	0,253	0,002
PT. BANK EKONOMI RAHARJA	28.771.765	81	645.310.677	0,743	0,136	0,009	0,265	0,002
PT BPD JAWA TENGAH	30.695.212	82	676.005.889	0,752	0,142	0,009	0,278	0,003
PT BANK DKI	30.748.280	83	706.754.169	0,761	0,149	0,009	0,291	0,003
PT ANZ INDONESIA	32.159.601	84	738.913.770	0,771	0,155	0,009	0,304	0,003
PT. BANK ICBC INDONESIA	32.237.524	85	771.151.294	0,780	0,162	0,009	0,317	0,003
PT BPD JAWA TIMUR	33.046.537	86	804.197.831	0,789	0,169	0,009	0,331	0,003
PT BANK MIZUHO INDONESIA	40.758.204	87	844.956.035	0,798	0,178	0,009	0,347	0,003
PT. BANK SUITOMO MITSUI INDONESIA	46.832.512	88	891.788.547	0,807	0,187	0,009	0,365	0,003

PT BANK DBS INDONESIA	55.246.695	89	947.035.242	0,817	0,199	0,009	0,386	0,004
STANDARD CHARTERED BANK	62.250.091	90	1.009.285.333	0,826	0,212	0,009	0,411	0,004
CITIBANK	64.283.872	91	1.073.569.205	0,835	0,226	0,009	0,438	0,004
PT. BANK BUKOPIN	66.244.963	92	1.139.814.168	0,844	0,240	0,009	0,465	0,004
PT. BANK MEGA, Tbk	66.509.336	93	1.206.323.504	0,853	0,254	0,009	0,493	0,005
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk	66.720.141	94	1.273.043.645	0,862	0,268	0,009	0,521	0,005
PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk	69.664.873	95	1.342.708.518	0,872	0,282	0,009	0,550	0,005
PT. BANK UOB BUANA	71.382.207	96	1.414.090.725	0,881	0,297	0,009	0,579	0,005
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	84.393.627	97	1.498.484.352	0,890	0,315	0,009	0,612	0,006
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI, Ltd	97.198.377	98	1.595.682.729	0,899	0,335	0,009	0,650	0,006
PT. BANK OCBC NISP, Tbk	97.524.537	99	1.693.207.266	0,908	0,356	0,009	0,691	0,006
PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	131.237.122	100	1.824.444.388	0,917	0,383	0,009	0,739	0,007
PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	135.088.430	101	1.959.532.818	0,927	0,412	0,009	0,795	0,007
PT. BANK DANAMON INDONESIA	151.977.554	102	2.111.510.372	0,936	0,444	0,009	0,856	0,008
PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	154.128.770	103	2.265.639.142	0,945	0,476	0,009	0,920	0,008
PT. BANK PERMATA, Tbk	165.542.733	104	2.431.181.875	0,954	0,511	0,009	0,987	0,009
PT. BANK CIMB NIAGA	213.573.570	105	2.644.755.445	0,963	0,556	0,009	1,067	0,010
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	371.045.746	106	3.015.801.191	0,972	0,634	0,009	1,190	0,011
PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	488.508.280	107	3.504.309.471	0,982	0,737	0,009	1,370	0,013
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	606.370.242	108	4.110.679.713	0,991	0,864	0,009	1,601	0,015
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	647.152.376	109	4.757.832.089	1,000	1,000	0,009	1,864	0,017
TOTAL ASET INDUSTRI	4.757.832.089					1,000	25,158	0,231
<b>Koefisien Gini 2013</b>								<b>0,769</b>

**Keterangan:**

Kolom A	: Nama Bank	Kolom D	: Jumlah Kumulatif Pangsa Aset	Kolom G	: $(X_k - X_{k-1})$
Kolom B	: Pangsa Aset	Kolom E	: Proporsi Kumulatif Bank (X)	Kolom H	: $(Y_k + Y_{k-1})$
Kolom C	: Jumlah Kumulatif Bank	Kolom F	: Proporsi Kumulatif Pangsa Aset (Y)	Kolom I	: $(X_k - X_{k-1}) (Y_k + Y_{k-1})$

**B.2. Perhitungan Koefisien Gini DPK Tahun 2001 dan 2013**

KOEFSIEN GINI DPK TAHUN 2001								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
PT. BANK EKSPOR INDONESIA	0	1	0	0,007	0,000	0,007	0,000	0,000
PT BANK CREDIT LYONNAIS	2.287	2	2.287	0,014	0,000	0,007	0,000	0,000
PT BANK MERINCORP	7.843	3	10.130	0,021	0,000	0,007	0,000	0,000
PT BANK SWAGUNA	9.531	4	19.661	0,028	0,000	0,007	0,000	0,000
PT. BANK ALFINDO SEJAHTERA	26.319	5	45.980	0,035	0,000	0,007	0,000	0,000
PT. BANK PURBA DANARTA	35.002	6	80.982	0,043	0,000	0,007	0,000	0,000
PT BANK PERSYARIKATAN INDONESIA	35.203	7	116.185	0,050	0,000	0,007	0,000	0,000
PT. BANK ROYAL INDONESIA	40.692	8	156.877	0,057	0,000	0,007	0,000	0,000
PT. BANK INTERPACIFIC	60.021	9	216.898	0,064	0,000	0,007	0,000	0,000
PT BANK BINTANG MANUNGGAL, Tbk	76.168	10	293.066	0,071	0,000	0,007	0,001	0,000
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI	79.543	11	372.609	0,078	0,000	0,007	0,001	0,000
PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK	81.186	12	453.795	0,085	0,001	0,007	0,001	0,000
PT LIMAN INTERNASIONAL BANK	83.091	13	536.886	0,092	0,001	0,007	0,001	0,000
PT. BANK ARTOS INDONESIA	87.372	14	624.258	0,099	0,001	0,007	0,001	0,000
PT BANK HARMONI INTERNASIONAL	106.059	15	730.317	0,106	0,001	0,007	0,002	0,000
PR BANK HARFA	109.563	16	839.880	0,113	0,001	0,007	0,002	0,000
PT. BANK MITRANIAGA	113.788	17	953.668	0,121	0,001	0,007	0,002	0,000
PT BANK FAMA INTERNASIONAL	121.213	18	1.074.881	0,128	0,001	0,007	0,003	0,000
PT BANK MAYORA	122.634	19	1.197.515	0,135	0,001	0,007	0,003	0,000
PT BANK INA PERDANA	135.348	20	1.332.863	0,142	0,002	0,007	0,003	0,000
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI	142.525	21	1.475.388	0,149	0,002	0,007	0,003	0,000
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL	150.847	22	1.626.235	0,156	0,002	0,007	0,004	0,000
PT. BANK PATRIOT	151.679	23	1.777.914	0,163	0,002	0,007	0,004	0,000
PT. BANK SOCIETE GENERALE INDONESIA	155.055	24	1.932.969	0,170	0,002	0,007	0,005	0,000
PT BPD SULAWESI TENGAH	156.770	25	2.089.739	0,177	0,003	0,007	0,005	0,000
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK	167.228	26	2.256.967	0,184	0,003	0,007	0,005	0,000

PT. BANK MULTIARTA SENTOSA	167.929	27	2.424.896	0,191	0,003	0,007	0,006	0,000
PT BANK JASA ARTA	180.143	28	2.605.039	0,199	0,003	0,007	0,006	0,000
PT. BANK OCBC INDONESIA	182.608	29	2.787.647	0,206	0,003	0,007	0,007	0,000
PT. ING INDONESIA BANK	182.955	30	2.970.602	0,213	0,004	0,007	0,007	0,000
PT BPD BENGKULU	184.960	31	3.155.562	0,220	0,004	0,007	0,008	0,000
PT PRIMA MASTER BANK	189.060	32	3.344.622	0,227	0,004	0,007	0,008	0,000
PT. BANK METRO EXPRESS	201.588	33	3.546.210	0,234	0,004	0,007	0,008	0,000
PT. BANK INDO MONEX	201.782	34	3.747.992	0,241	0,005	0,007	0,009	0,000
PT. BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ	212.946	35	3.960.938	0,248	0,005	0,007	0,010	0,000
PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk	214.107	36	4.175.045	0,255	0,005	0,007	0,010	0,000
PT. BANK ASIATIC	226.736	37	4.401.781	0,262	0,005	0,007	0,011	0,000
BPD SULAWESI TENGGARA	229.919	38	4.631.700	0,270	0,006	0,007	0,011	0,000
PT. BANK ICBC INDONESIA	239.153	39	4.870.853	0,277	0,006	0,007	0,012	0,000
PT. BANK SRI PARTHA	254.391	40	5.125.244	0,284	0,006	0,007	0,012	0,000
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA	267.880	41	5.393.124	0,291	0,007	0,007	0,013	0,000
PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk	273.740	42	5.666.864	0,298	0,007	0,007	0,014	0,000
PT BANK HARDA INTERNASIONAL	284.844	43	5.951.708	0,305	0,007	0,007	0,014	0,000
PT. BANK DIPO INTERNASIONAL	295.319	44	6.247.027	0,312	0,008	0,007	0,015	0,000
PT BANK MAYBANK INDOCORP	309.336	45	6.556.363	0,319	0,008	0,007	0,016	0,000
PT BPD JAMBI	340.163	46	6.896.526	0,326	0,009	0,007	0,017	0,000
PT BANK UIB	352.186	47	7.248.712	0,333	0,009	0,007	0,017	0,000
PT. BANK SWADESI, Tbk	357.318	48	7.606.030	0,340	0,009	0,007	0,018	0,000
BANK OF AMERIKA	362.389	49	7.968.419	0,348	0,010	0,007	0,019	0,000
PT. BANK BARCLAYS INDONESIA	383.297	50	8.351.716	0,355	0,010	0,007	0,020	0,000
PT. BANK HAGAKITA	428.621	51	8.780.337	0,362	0,011	0,007	0,021	0,000
PT. BANK ANTAR DAERAH	432.634	52	9.212.971	0,369	0,011	0,007	0,022	0,000
BPD NUSA TENGGARA TIMUR	433.817	53	9.646.788	0,376	0,012	0,007	0,023	0,000
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT	443.013	54	10.089.801	0,383	0,012	0,007	0,024	0,000
PT BPD LAMPUNG	449.691	55	10.539.492	0,390	0,013	0,007	0,025	,000
PT BPD MALUKU	480.979	56	11.020.471	0,397	0,014	0,007	0,027	0,000

PT. BANK SINARMAS, Tbk	483.971	57	11.504.442	0,404	0,014	0,007	0,028	0,000
PT. BANK MULTICOR	485.633	58	11.990.075	0,411	0,015	0,007	0,029	0,000
PT BPD KALIMANTAN SELATAN	486.278	59	12.476.353	0,418	0,015	0,007	0,030	0,000
PT. BANK INDEX SELINDO	498.570	60	12.974.923	0,426	0,016	0,007	0,031	0,000
PT GLOBAL INTERNASIONAL BANK	505.579	61	13.480.502	0,433	0,017	0,007	0,033	0,000
PT BANK KALIMANTAN TENGAH	517.274	62	13.997.776	0,440	0,017	0,007	0,034	0,000
PT. BANK DANPAC	533.831	63	14.531.607	0,447	0,018	0,007	0,035	0,000
PT. BANK GANESHA	547.634	64	15.079.241	0,454	0,019	0,007	0,037	0,000
PT BPD SULAWESI UTARA	548.642	65	15.627.883	0,461	0,019	0,007	0,038	0,000
PT. BANK IFI	555.095	66	16.182.978	0,468	0,020	0,007	0,039	0,000
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL	599.668	67	16.782.646	0,475	0,021	0,007	0,041	0,000
PT. BANK ARTA NIAGA KENCANA	610.405	68	17.393.051	0,482	0,021	0,007	0,042	0,000
BPD YOGYAKARTA	625.882	69	18.018.933	0,489	0,022	0,007	0,044	0,000
PT. KEPPEL TAT LEE BUANA BANK	638.516	70	18.657.449	0,496	0,023	0,007	0,045	0,000
PT BANK KEB INDONESIA	639.148	71	19.296.597	0,504	0,024	0,007	0,047	0,000
PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk	677.400	72	19.973.997	0,511	0,025	0,007	0,048	0,000
PT. BANK RABOBANK DUTA	708.259	73	20.682.256	0,518	0,026	0,007	0,050	0,000
PT BANK JASA JAKARTA	747.770	74	21.430.026	0,525	0,026	0,007	0,052	0,000
PT. BANK COMMONWEALTH	768.630	75	22.198.656	0,532	0,027	0,007	0,054	0,000
PT BPD KALIMANTAN BARAT	777.189	76	22.975.845	0,539	0,028	0,007	0,056	0,000
PT. QNB KESAWAN, Tbk	780.232	77	23.756.077	0,546	0,029	0,007	0,058	0,000
PT BANK FINCONESIA	792.112	78	24.548.189	0,553	0,030	0,007	0,060	0,000
PT. BANK DAGANG BALI	799.590	79	25.347.779	0,560	0,031	0,007	0,062	0,000
THE BANGKOK BANK COMP., Ltd	800.704	80	26.148.483	0,567	0,032	0,007	0,064	0,000
PT BANK DBS INDONESIA	802.145	81	26.950.628	0,574	0,033	0,007	0,065	0,000
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk	803.246	82	27.753.874	0,582	0,034	0,007	0,067	0,000
PT. BANK HANVIT INDONESIA	824.089	83	28.577.963	0,589	0,035	0,007	0,069	0,000
PT BPD SUMSEL DAN BANGKA BELITUNG	848.326	84	29.426.289	0,596	0,036	0,007	0,072	0,001
BPD SULAWESI SELATAN	867.797	85	30.294.086	0,603	0,037	0,007	0,074	0,001
PT. BANK YUDHA BAKTI	884.579	86	31.178.665	0,610	0,038	0,007	0,076	0,001

PT. BANK BUMI ARTA	891.399	87	32.070.064	0,617	0,040	0,007	0,078	0,001
JP MORGAN CHASE BANK	977.753	88	33.047.817	0,624	0,041	0,007	0,080	0,001
PT BPD PAPUA	985.969	89	34.033.786	0,631	0,042	0,007	0,083	0,001
PT. BANK MASPION INDONESIA	996.793	90	35.030.579	0,638	0,043	0,007	0,085	0,001
PT. CHINATRUST INDONESIA	1.032.683	91	36.063.262	0,645	0,044	0,007	0,088	0,001
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk	1.185.375	92	37.248.637	0,652	0,046	0,007	0,090	0,001
PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL, Tbk	1.191.667	93	38.440.304	0,660	0,047	0,007	0,093	0,001
PT ANZ PANIN BANK	1.203.004	94	39.643.308	0,667	0,049	0,007	0,096	0,001
PT BPD ACEH	1.240.394	95	40.883.702	0,674	0,050	0,007	0,099	0,001
PT. PRIMA EXPRESS BANK	1.245.691	96	42.129.393	0,681	0,052	0,007	0,102	0,001
PT. BANK MESTIKA DHARMA	1.325.144	97	43.454.537	0,688	0,054	0,007	0,106	0,001
PT BPD SUMATERA BARAT	1.425.217	98	44.879.754	0,695	0,055	0,007	0,109	0,001
PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk	1.490.901	99	46.370.655	0,702	0,057	0,007	0,113	0,001
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk	1.498.215	100	47.868.870	0,709	0,059	0,007	0,116	0,001
PT. BANK RESONA PERDANIA	1.498.810	101	49.367.680	0,716	0,061	0,007	0,120	0,001
PT BPD BALI	1.571.531	102	50.939.211	0,723	0,063	0,007	0,124	0,001
PT. BANK UOB INDONESIA	1.685.229	103	52.624.440	0,730	0,065	0,007	0,128	0,001
AMERICAN EXPRESS BANK, Ltd	1.811.552	104	54.435.992	0,738	0,067	0,007	0,132	0,001
PT. BANK HAGA	1.838.413	105	56.274.405	0,745	0,069	0,007	0,137	0,001
PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk	2.236.680	106	58.511.085	0,752	0,072	0,007	0,142	0,001
PT BPD SUMATERA UTARA	2.249.353	107	60.760.438	0,759	0,075	0,007	0,147	0,001
PT. UFJ INDONESIA	2.635.794	108	63.396.232	0,766	0,078	0,007	0,153	0,001
BPD KALIMANTAN TIMUR	2.738.833	109	66.135.065	0,773	0,082	0,007	0,160	0,001
PT. BANK CIC	2.867.831	110	69.002.896	0,780	0,085	0,007	0,167	0,001
PT BANK DKI	3.099.494	111	72.102.390	0,787	0,089	0,007	0,174	0,001
PT BPD RIAU KEPRI	3.334.179	112	75.436.569	0,794	0,093	0,007	0,182	0,001
PT BPD JAWA TENGAH	3.550.572	113	78.987.141	0,801	0,097	0,007	0,190	0,001
PT BANK MIZUHO INDONESIA	3.681.120	114	82.668.261	0,809	0,102	0,007	0,199	0,001
PT. BANK SUITOMO MITSUI INDONESIA	4.274.067	115	86.942.328	0,816	0,107	0,007	0,209	0,001
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk	4.602.536	116	91.544.864	0,823	0,113	0,007	0,220	0,002

PT. BANK EKONOMI RAHARJA	4.637.923	117	96.182.787	0,830	0,119	0,007	0,232	0,002
PT BPD JAWA TIMUR	4.761.040	118	100.943.827	0,837	0,124	0,007	0,243	0,002
PT. BANK ARTA GRAHA	5.034.514	119	105.978.341	0,844	0,131	0,007	0,255	0,002
PT. BANK OCBC NISP, Tbk	5.590.871	120	111.569.212	0,851	0,138	0,007	0,268	0,002
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI, Ltd	5.749.763	121	117.318.975	0,858	0,145	0,007	0,282	0,002
STANDARD CHARTERED BANK	7.043.403	122	124.362.378	0,865	0,153	0,007	0,298	0,002
PT. BANK BUKOPIN	7.604.967	123	131.967.345	0,872	0,163	0,007	0,316	0,002
DEUTSCHE BANK AG	8.896.719	124	140.864.064	0,879	0,174	0,007	0,336	0,002
PT. BANK UNIVERSAL, Tbk	9.447.988	125	150.312.052	0,887	0,185	0,007	0,359	0,003
PT. BANK MEGA, Tbk	10.024.397	126	160.336.449	0,894	0,198	0,007	0,383	0,003
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	10.875.608	127	171.212.057	0,901	0,211	0,007	0,409	0,003
PT. BANK UOB BUANA	10.954.435	128	182.166.492	0,908	0,225	0,007	0,436	0,003
ABN AMRO NV	10.981.246	129	193.147.738	0,915	0,238	0,007	0,463	0,003
PT. BANK NIAGA	17.103.921	130	210.251.659	0,922	0,259	0,007	0,497	0,004
PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	17.461.991	131	227.713.650	0,929	0,281	0,007	0,540	0,004
PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	18.174.835	132	245.888.485	0,936	0,303	0,007	0,584	0,004
PT. BANK LIPPO, Tbk	19.988.907	133	265.877.392	0,943	0,328	0,007	0,631	0,004
CITIBANK	20.896.782	134	286.774.174	0,950	0,354	0,007	0,682	0,005
PT. BANK BALI, Tbk	22.179.715	135	308.953.889	0,957	0,381	0,007	0,735	0,005
PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	24.894.788	136	333.848.677	0,965	0,412	0,007	0,793	0,006
PT. BANK DANAMON INDONESIA	39.799.052	137	373.647.729	0,972	0,461	0,007	0,872	0,006
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	57.694.910	138	431.342.639	0,979	0,532	0,007	0,993	0,007
PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	90.287.308	139	521.629.947	0,986	0,643	0,007	1,175	0,008
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	100.229.553	140	621.859.500	0,993	0,767	0,007	1,410	0,010
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	189.027.647	141	810.887.147	1,000	1,000	0,007	1,767	0,013
TOTAL DPK INDUSTRI	810.887.147					1,000	20,837	0,148
<b>Koefisien Gini 2001</b>								<b>0,852</b>

KOEFSISIEN GINI DPK TAHUN 2013								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK	27.636	1	27.636	0,009	0,000	0,009	0,000	0,000
PT. BANK SAHABAT PURBA DANARTA	122.274	2	149.910	0,018	0,000	0,009	0,000	0,000
PT. BANK ANDARA	180.793	3	330.703	0,028	0,000	0,009	0,000	0,000
PT. BANK ROYAL INDONESIA	337.644	4	668.347	0,037	0,000	0,009	0,000	0,000
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL	354.330	5	1.022.677	0,046	0,000	0,009	0,000	0,000
PT. BANK ARTOS INDONESIA	395.495	6	1.418.172	0,055	0,000	0,009	0,001	0,000
PT. BANK METRO EXPRESS	546.663	7	1.964.835	0,064	0,001	0,009	0,001	0,000
PT BANK DINAR INDONESIA	560.202	8	2.525.037	0,073	0,001	0,009	0,001	0,000
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA	594.316	9	3.119.353	0,083	0,001	0,009	0,002	0,000
PT BANK FAMA INTERNASIONAL	636.837	10	3.756.190	0,092	0,001	0,009	0,002	0,000
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK	666.228	11	4.422.418	0,101	0,001	0,009	0,002	0,000
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI	837.772	12	5.260.190	0,110	0,002	0,009	0,003	0,000
PT BPD SULAWESI TENGAH	910.747	13	6.170.937	0,119	0,002	0,009	0,003	0,000
PT. BANK MITRANIAGA	1.113.260	14	7.284.197	0,128	0,002	0,009	0,004	0,000
PT BANK INA PERDANA	1.183.101	15	8.467.298	0,138	0,002	0,009	0,005	0,000
PT BANK HARDA INTERNASIONAL	1.338.486	16	9.805.784	0,147	0,003	0,009	0,005	0,000
PT. BANK ANTAR DAERAH	1.385.697	17	11.191.481	0,156	0,003	0,009	0,006	0,000
BANK OF AMERIKA	1.537.828	18	12.729.309	0,165	0,004	0,009	0,007	0,000
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV	1.577.300	19	14.306.609	0,174	0,004	0,009	0,008	0,000
PT. BANK GANESHA	1.603.746	20	15.910.355	0,183	0,005	0,009	0,009	0,000
PT PRIMA MASTER BANK	1.667.733	21	17.578.088	0,193	0,005	0,009	0,010	0,000
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA	1.891.300	22	19.469.388	0,202	0,006	0,009	0,011	0,000
PT. BANK YUDHA BAKTI	1.954.806	23	21.424.194	0,211	0,006	0,009	0,012	0,000
PT. BANK SBI INDONESIA	1.995.842	24	23.420.036	0,220	0,007	0,009	0,013	0,000
PT BANK AGRIS	2.058.575	25	25.478.611	0,229	0,007	0,009	0,014	0,000
PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA	2.100.145	26	27.578.756	0,239	0,008	0,009	0,015	0,000
BPD SULAWESI TENGGARA	2.194.336	27	29.773.092	0,248	0,009	0,009	0,016	0,000
PT BPD BENGKULU	2.287.611	28	32.060.703	0,257	0,009	0,009	0,018	0,000

PT BANK MAYORA	2.322.139	29	34.382.842	0,266	0,010	0,009	0,019	0,000
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI	2.447.828	30	36.830.670	0,275	0,011	0,009	0,020	0,000
PT BANK KEB INDONESIA	2.451.489	31	39.282.159	0,284	0,011	0,009	0,022	0,000
THE BANGKOK BANK COMP., Ltd	2.610.770	32	41.892.929	0,294	0,012	0,009	0,023	0,000
PT BPD LAMPUNG	2.634.880	33	44.527.809	0,303	0,013	0,009	0,025	0,000
PT. BANK NATIONALNOBU	2.712.184	34	47.239.993	0,312	0,014	0,009	0,026	0,000
PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk	2.740.214	35	49.980.207	0,321	0,014	0,009	0,028	0,000
PT BPD JAMBI	2.798.702	36	52.778.909	0,330	0,015	0,009	0,029	0,000
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT	3.032.455	37	55.811.364	0,339	0,016	0,009	0,031	0,000
PT BPD MALUKU	3.041.011	38	58.852.375	0,349	0,017	0,009	0,033	0,000
PT BANK KALIMANTAN TENGAH	3.193.472	39	62.045.847	0,358	0,018	0,009	0,035	0,000
PT. BANK BUMI ARTA	3.367.520	40	65.413.367	0,367	0,019	0,009	0,037	0,000
PT. BANK MASPION INDONESIA	3.443.576	41	68.856.943	0,376	0,020	0,009	0,039	0,000
PT. BANK WOORI INDONESIA	3.497.330	42	72.354.273	0,385	0,021	0,009	0,041	0,000
PT BANK JASA JAKARTA	3.884.661	43	76.238.934	0,394	0,022	0,009	0,043	0,000
PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk	4.120.253	44	80.359.187	0,404	0,023	0,009	0,045	0,000
PT. BANK INDEX SELINDO	4.662.214	45	85.021.401	0,413	0,024	0,009	0,047	0,000
PT BPD SULAWESI UTARA	5.026.542	46	90.047.943	0,422	0,026	0,009	0,050	0,000
PT. CHINATRUST INDONESIA	5.053.498	47	95.101.441	0,431	0,027	0,009	0,053	0,000
BPD NUSA TENGGARA TIMUR	5.064.915	48	100.166.356	0,440	0,029	0,009	0,056	0,001
BANK OF CHINA LIMITED	5.162.123	49	105.328.479	0,450	0,030	0,009	0,059	0,001
PT BANK HANA	5.298.291	50	110.626.770	0,459	0,032	0,009	0,062	0,001
BPD YOGYAKARTA	5.304.605	51	115.931.375	0,468	0,033	0,009	0,065	0,001
JP MORGAN CHASE BANK	5.527.191	52	121.458.566	0,477	0,035	0,009	0,068	0,001
BPD SULAWESI SELATAN	5.531.848	53	126.990.414	0,486	0,036	0,009	0,071	0,001
PT. BANK MESTIKA DHARMA	5.851.651	54	132.842.065	0,495	0,038	0,009	0,075	0,001
PT BANK CAPITAL INDONESIA	5.893.147	55	138.735.212	0,505	0,040	0,009	0,078	0,001
PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL	6.571.485	56	145.306.697	0,514	0,042	0,009	0,082	0,001
PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk	6.804.324	57	152.111.021	0,523	0,044	0,009	0,085	0,001
PT. BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk	6.834.891	58	158.945.912	0,532	0,046	0,009	0,089	0,001

PT. BANK RESONA PERDANIA	6.869.644	59	165.815.556	0,541	0,048	0,009	0,093	0,001
PT BPD KALIMANTAN SELATAN	6.940.115	60	172.755.671	0,550	0,050	0,009	0,097	0,001
PT. QNB KESAWAN, Tbk	7.244.934	61	180.000.605	0,560	0,052	0,009	0,101	0,001
PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk	7.673.461	62	187.674.066	0,569	0,054	0,009	0,106	0,001
PT BPD KALIMANTAN BARAT	8.080.189	63	195.754.255	0,578	0,056	0,009	0,110	0,001
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk	8.358.395	64	204.112.650	0,587	0,059	0,009	0,115	0,001
PT. RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA	9.943.219	65	214.055.869	0,596	0,061	0,009	0,120	0,001
DEUTSCHE BANK AG	10.107.702	66	224.163.571	0,606	0,064	0,009	0,126	0,001
PT BPD ACEH	10.644.889	67	234.808.460	0,615	0,067	0,009	0,132	0,001
PT BPD SUMSEL DAN BANGKA BELITUNG	10.869.466	68	245.677.926	0,624	0,071	0,009	0,138	0,001
PT BPD BALI	11.466.000	69	257.143.926	0,633	0,074	0,009	0,144	0,001
PT. BANK MUTIARA	11.558.082	70	268.702.008	0,642	0,077	0,009	0,151	0,001
PT BPD SUMATERA BARAT	11.885.754	71	280.587.762	0,651	0,081	0,009	0,158	0,001
PT BANK MIZUHO INDONESIA	13.003.311	72	293.591.073	0,661	0,084	0,009	0,165	0,002
PT BPD RIAU KEPRI	13.055.833	73	306.646.906	0,670	0,088	0,009	0,172	0,002
PT. BANK SINARMAS, Tbk	13.191.478	74	319.838.384	0,679	0,092	0,009	0,180	0,002
PT BPD PAPUA	13.420.917	75	333.259.301	0,688	0,096	0,009	0,187	0,002
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL	14.116.465	76	347.375.766	0,697	0,100	0,009	0,195	0,002
PT. BANK COMMONWEALTH	14.261.658	77	361.637.424	0,706	0,104	0,009	0,204	0,002
PT BPD SUMATERA UTARA	15.943.043	78	377.580.467	0,716	0,108	0,009	0,212	0,002
PT. BANK ARTA GRAHA INTERNASIONAL	17.363.407	79	394.943.874	0,725	0,113	0,009	0,222	0,002
PT. BANK SUITOMO MITSUI INDONESIA	18.532.595	80	413.476.469	0,734	0,119	0,009	0,232	0,002
BPD KALIMANTAN TIMUR	20.588.136	81	434.064.605	0,743	0,125	0,009	0,243	0,002
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk	20.657.040	82	454.721.645	0,752	0,131	0,009	0,255	0,002
PT BANK DKI	21.155.222	83	475.876.867	0,761	0,137	0,009	0,267	0,002
PT. BANK EKONOMI RAHARJA	23.346.875	84	499.223.742	0,771	0,143	0,009	0,280	0,003
PT. BANK ICBC INDONESIA	23.903.341	85	523.127.083	0,780	0,150	0,009	0,293	0,003
PT ANZ INDONESIA	24.304.353	86	547.431.436	0,789	0,157	0,009	0,307	0,003
PT BPD JAWA TENGAH	24.559.114	87	571.990.550	0,798	0,164	0,009	0,321	0,003
PT BPD JAWA TIMUR	25.728.846	88	597.719.396	0,807	0,172	0,009	0,336	0,003

THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI, Ltd	25.914.856	89	623.634.252	0,817	0,179	0,009	0,351	0,003	
STANDARD CHARTERED BANK	29.908.046	90	653.542.298	0,826	0,188	0,009	0,367	0,003	
PT BANK DBS INDONESIA	35.142.934	91	688.685.232	0,835	0,198	0,009	0,385	0,004	
CITIBANK	43.238.005	92	731.923.237	0,844	0,210	0,009	0,408	0,004	
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk	46.761.808	93	778.685.045	0,853	0,224	0,009	0,434	0,004	
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	47.872.353	94	826.557.398	0,862	0,237	0,009	0,461	0,004	
PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk	50.634.310	95	877.191.708	0,872	0,252	0,009	0,489	0,004	
PT. BANK MEGA, Tbk	52.465.294	96	929.657.002	0,881	0,267	0,009	0,519	0,005	
PT. BANK BUKOPIN	52.659.514	97	982.316.516	0,890	0,282	0,009	0,549	0,005	
PT. BANK UOB BUANA	57.278.434	98	1.039.594.950	0,899	0,298	0,009	0,580	0,005	
PT. BANK OCBC NISP, Tbk	67.934.811	99	1.107.529.761	0,908	0,318	0,009	0,616	0,006	
PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	90.852.326	100	1.198.382.087	0,917	0,344	0,009	0,662	0,006	
PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	104.350.300	101	1.302.732.387	0,927	0,374	0,009	0,718	0,007	
PT. BANK DANAMON INDONESIA	108.894.184	102	1.411.626.571	0,936	0,405	0,009	0,779	0,007	
PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	117.421.976	103	1.529.048.547	0,945	0,439	0,009	0,844	0,008	
PT. BANK PERMATA, Tbk	121.001.693	104	1.650.050.240	0,954	0,474	0,009	0,913	0,008	
PT. BANK CIMB NIAGA	157.323.703	105	1.807.373.943	0,963	0,519	0,009	0,992	0,009	
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	280.743.853	106	2.088.117.796	0,972	0,599	0,009	1,118	0,010	
PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	409.513.564	107	2.497.631.360	0,982	0,717	0,009	1,316	0,012	
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	486.366.371	108	2.983.997.731	0,991	0,857	0,009	1,574	0,014	
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	499.718.040	109	3.483.715.771	1,000	1,000	0,009	1,857	0,017	
	3.483.715.771					1,000	23,197	0,213	
<b>Koefisien Gini 2013</b>							<b>0,787</b>		

**Keterangan:**

Kolom A : Nama Bank	Kolom D : Jumlah Kumulatif Pangsa DPK	Kolom G : $(X_k - X_{k-1})$
Kolom B : Pangsa DPK	Kolom E : Proporsi Kumulatif Bank (X)	Kolom H : $(Y_k + Y_{k-1})$
Kolom C : Jumlah Kumulatif Bank	Kolom F : Proporsi Kumulatif Pangsa DPK (Y)	Kolom I : $(X_k - X_{k-1}) (Y_k + Y_{k-1})$

**B.3 Perhitungan Koefisien Gini Kredit Tahun 2001 dan 2013**

KOEFSIEN GINI KREDIT TAHUN 2001								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
PT. BANK ROYAL INDONESIA	2.077	1	2.077	0,007	0,000	0,007	0,000	0,000
PT. BANK ALFINDO SEJAHTERA	4.931	2	7.008	0,014	0,000	0,007	0,000	0,000
PT BANK SWAGUNA	5.223	3	12.231	0,021	0,000	0,007	0,000	0,000
PT. BANK PURBA DANARTA	11.276	4	23.507	0,028	0,000	0,007	0,000	0,000
PT LIMAN INTERNASIONAL BANK	27.022	5	50.529	0,035	0,000	0,007	0,000	0,000
PT BPD SULAWESI TENGAH	27.250	6	77.779	0,043	0,000	0,007	0,000	0,000
PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK	34.897	7	112.676	0,050	0,000	0,007	0,001	0,000
PT BANK MAYORA	37.735	8	150.411	0,057	0,000	0,007	0,001	0,000
PT BANK INA PERDANA	49.017	9	199.428	0,064	0,001	0,007	0,001	0,000
PT. BANK ARTOS INDONESIA	60.605	10	260.033	0,071	0,001	0,007	0,001	0,000
PT. BANK COMMONWEALTH	68.554	11	328.587	0,078	0,001	0,007	0,002	0,000
PT BPD BENGKULU	68.813	12	397.400	0,085	0,001	0,007	0,002	0,000
PT BANK BINTANG MANUNGGAL, Tbk	70.988	13	468.388	0,092	0,001	0,007	0,003	0,000
PT BANK HARMONI INTERNASIONAL	71.847	14	540.235	0,099	0,002	0,007	0,003	0,000
PT PRIMA MASTER BANK	74.271	15	614.506	0,106	0,002	0,007	0,003	0,000
PT. BANK SINARMAS, Tbk	74.477	16	688.983	0,113	0,002	0,007	0,004	0,000
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL	74.986	17	763.969	0,121	0,002	0,007	0,004	0,000
PT. BANK METRO EXPRESS	76.288	18	840.257	0,128	0,003	0,007	0,005	0,000
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI	78.478	19	918.735	0,135	0,003	0,007	0,005	0,000
PT BANK FAMA INTERNASIONAL	83.050	20	1.001.785	0,142	0,003	0,007	0,006	0,000
PT BANK JASA ARTA	85.720	21	1.087.505	0,149	0,003	0,007	0,006	0,000
PT. BANK PATRIOT	91.517	22	1.179.022	0,156	0,004	0,007	0,007	0,000
PR BANK HARFA	94.127	23	1.273.149	0,163	0,004	0,007	0,007	0,000
BPD SULAWESI TENGGARA	94.842	24	1.367.991	0,170	0,004	0,007	0,008	0,000
PT BANK PERSYARIKATAN INDONESIA	96.978	25	1.464.969	0,177	0,004	0,007	0,008	0,000
PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk	103.877	26	1.568.846	0,184	0,005	0,007	0,009	0,000

BANK OF AMERIKA	104.309	27	1.673.155	0,191	0,005	0,007	0,010	0,000
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA	105.443	28	1.778.598	0,199	0,005	0,007	0,010	0,000
PT. BANK MITRANIAGA	107.551	29	1.886.149	0,206	0,006	0,007	0,011	0,000
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK	110.990	30	1.997.139	0,213	0,006	0,007	0,012	0,000
PT. BANK OCBC INDONESIA	142.475	31	2.139.614	0,220	0,006	0,007	0,012	0,000
PT. BANK INDEX SELINDO	144.726	32	2.284.340	0,227	0,007	0,007	0,013	0,000
PT BPD MALUKU	145.551	33	2.429.891	0,234	0,007	0,007	0,014	0,000
PT. BANK ICBC INDONESIA	151.034	34	2.580.925	0,241	0,008	0,007	0,015	0,000
PT. BANK ASIATIC	152.062	35	2.732.987	0,248	0,008	0,007	0,016	0,000
PT. BANK SWADESI, Tbk	155.420	36	2.888.407	0,255	0,009	0,007	0,017	0,000
PT BPD JAMBI	158.917	37	3.047.324	0,262	0,009	0,007	0,018	0,000
BPD NUSA TENGGARA TIMUR	159.663	38	3.206.987	0,270	0,010	0,007	0,019	0,000
PT. BANK INDO MONEX	160.104	39	3.367.091	0,277	0,010	0,007	0,020	0,000
PT BANK KALIMANTAN TENGAH	162.792	40	3.529.883	0,284	0,011	0,007	0,021	0,000
PT BANK CREDIT LYONNAIS	165.504	41	3.695.387	0,291	0,011	0,007	0,022	0,000
PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk	169.015	42	3.864.402	0,298	0,012	0,007	0,023	0,000
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL	201.865	43	4.066.267	0,305	0,012	0,007	0,024	0,000
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI	203.835	44	4.270.102	0,312	0,013	0,007	0,025	0,000
PT BPD KALIMANTAN SELATAN	208.107	45	4.478.209	0,319	0,013	0,007	0,026	0,000
PT BANK HARDA INTERNASIONAL	209.788	46	4.687.997	0,326	0,014	0,007	0,027	0,000
PT. BANK BUMI ARTA	212.927	47	4.900.924	0,333	0,015	0,007	0,029	0,000
PT. BANK DANPAC	230.048	48	5.130.972	0,340	0,015	0,007	0,030	0,000
PT BPD LAMPUNG	232.029	49	5.363.001	0,348	0,016	0,007	0,031	0,000
PT BPD KALIMANTAN BARAT	234.134	50	5.597.135	0,355	0,017	0,007	0,033	0,000
PT. BANK SRI PARTHA	236.946	51	5.834.081	0,362	0,017	0,007	0,034	0,000
PT. QNB KESAWAN, Tbk	241.393	52	6.075.474	0,369	0,018	0,007	0,036	0,000
PT. BANK DIPO INTERNASIONAL	245.890	53	6.321.364	0,376	0,019	0,007	0,037	0,000
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk	251.388	54	6.572.752	0,383	0,020	0,007	0,039	0,000
PT BPD ACEH	279.778	55	6.852.530	0,390	0,021	0,007	0,040	0,000
PT BANK UIB	289.176	56	7.141.706	0,397	0,021	0,007	0,042	0,000

PT BPD NUSA TENGGARA BARAT	289.625	57	7.431.331	0,404	0,022	0,007	0,044	0,000
PT. BANK ANTAR DAERAH	315.087	58	7.746.418	0,411	0,023	0,007	0,045	0,000
PT. BANK HAGAKITA	322.445	59	8.068.863	0,418	0,024	0,007	0,047	0,000
PT BPD SULAWESI UTARA	323.141	60	8.392.004	0,426	0,025	0,007	0,049	0,000
PT. BANK BARCLAYS INDONESIA	334.099	61	8.726.103	0,433	0,026	0,007	0,051	0,000
PT BPD PAPUA	335.168	62	9.061.271	0,440	0,027	0,007	0,053	0,000
PT. BANK ARTA NIAGA KENCANA	347.359	63	9.408.630	0,447	0,028	0,007	0,055	0,000
PT. BANK SOCIETE GENERALE INDONESIA	351.139	64	9.759.769	0,454	0,029	0,007	0,057	0,000
BPD YOGYAKARTA	355.389	65	10.115.158	0,461	0,030	0,007	0,060	0,000
PT. BANK GANESHA	357.635	66	10.472.793	0,468	0,031	0,007	0,062	0,000
PT. BANK MULTICOR	361.427	67	10.834.220	0,475	0,032	0,007	0,064	0,000
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk	367.193	68	11.201.413	0,482	0,034	0,007	0,066	0,000
PT BPD RIAU KEPRI	368.669	69	11.570.082	0,489	0,035	0,007	0,068	0,000
PT GLOBAL INTERNASIONAL BANK	371.164	70	11.941.246	0,496	0,036	0,007	0,070	0,000
PT BANK MERINCORP	380.460	71	12.321.706	0,504	0,037	0,007	0,073	0,001
PT. BANK IFI	405.936	72	12.727.642	0,511	0,038	0,007	0,075	0,001
BPD KALIMANTAN TIMUR	413.312	73	13.140.954	0,518	0,039	0,007	0,077	0,001
BPD SULAWESI SELATAN	429.641	74	13.570.595	0,525	0,041	0,007	0,080	0,001
PT. BANK DAGANG BALI	431.433	75	14.002.028	0,532	0,042	0,007	0,083	0,001
PT. BANK YUDHA BAKTI	471.606	76	14.473.634	0,539	0,043	0,007	0,085	0,001
PT. BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ	507.139	77	14.980.773	0,546	0,045	0,007	0,088	0,001
PT BANK MAYBANK INDOCORP	540.789	78	15.521.562	0,553	0,046	0,007	0,091	0,001
PT BPD SUMSEL DAN BANGKA BELITUNG	548.174	79	16.069.736	0,560	0,048	0,007	0,095	0,001
PT. ING INDONESIA BANK	553.243	80	16.622.979	0,567	0,050	0,007	0,098	0,001
PT BANK JASA JAKARTA	560.801	81	17.183.780	0,574	0,051	0,007	0,101	0,001
PT BANK DKI	571.387	82	17.755.167	0,582	0,053	0,007	0,105	0,001
PT. KEPPEL TAT LEE BUANA BANK	587.854	83	18.343.021	0,589	0,055	0,007	0,108	0,001
PT. BANK MASPION INDONESIA	593.761	84	18.936.782	0,596	0,057	0,007	0,112	0,001
THE BANGKOK BANK COMP., Ltd	665.290	85	19.602.072	0,603	0,059	0,007	0,115	0,001
PT. PRIMA EXPRESS BANK	709.248	86	20.311.320	0,610	0,061	0,007	0,120	0,001

PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk	722.102	87	21.033.422	0,617	0,063	0,007	0,124	0,001
PT. BANK HANVIT INDONESIA	722.337	88	21.755.759	0,624	0,065	0,007	0,128	0,001
PT BANK DBS INDONESIA	771.674	89	22.527.433	0,631	0,067	0,007	0,133	0,001
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk	837.893	90	23.365.326	0,638	0,070	0,007	0,137	0,001
AMERICAN EXPRESS BANK, Ltd	860.698	91	24.226.024	0,645	0,073	0,007	0,143	0,001
PT. BANK HAGA	866.849	92	25.092.873	0,652	0,075	0,007	0,148	0,001
PT BPD SUMATERA UTARA	921.673	93	26.014.546	0,660	0,078	0,007	0,153	0,001
PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL, Tbk	956.435	94	26.970.981	0,667	0,081	0,007	0,159	0,001
PT BANK FINCONESIA	966.237	95	27.937.218	0,674	0,084	0,007	0,164	0,001
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA	996.480	96	28.933.698	0,681	0,087	0,007	0,170	0,001
PT BANK KEB INDONESIA	1.001.473	97	29.935.171	0,688	0,090	0,007	0,176	0,001
PT BPD BALI	1.012.428	98	30.947.599	0,695	0,093	0,007	0,182	0,001
PT. BANK MESTIKA DHARMA	1.037.518	99	31.985.117	0,702	0,096	0,007	0,188	0,001
PT. BANK UOB INDONESIA	1.125.385	100	33.110.502	0,709	0,099	0,007	0,195	0,001
PT BPD SUMATERA BARAT	1.135.843	101	34.246.345	0,716	0,103	0,007	0,202	0,001
PT. BANK INTERPACIFIC	1.171.560	102	35.417.905	0,723	0,106	0,007	0,209	0,001
JP MORGAN CHASE BANK	1.221.391	103	36.639.296	0,730	0,110	0,007	0,216	0,002
PT. CHINATRUST INDONESIA	1.226.814	104	37.866.110	0,738	0,113	0,007	0,223	0,002
PT ANZ PANIN BANK	1.232.831	105	39.098.941	0,745	0,117	0,007	0,231	0,002
PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk	1.280.732	106	40.379.673	0,752	0,121	0,007	0,238	0,002
PT. BANK EKONOMI RAHARJA	1.412.748	107	41.792.421	0,759	0,125	0,007	0,246	0,002
PT BPD JAWA TENGAH	1.587.341	108	43.379.762	0,766	0,130	0,007	0,255	0,002
PT BPD JAWA TIMUR	1.628.467	109	45.008.229	0,773	0,135	0,007	0,265	0,002
PT. BANK RABOBANK DUTA	1.681.219	110	46.689.448	0,780	0,140	0,007	0,275	0,002
PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk	1.968.124	111	48.657.572	0,787	0,146	0,007	0,286	0,002
PT. BANK ARTA GRAHA	2.615.627	112	51.273.199	0,794	0,154	0,007	0,299	0,002
PT. BANK RESONA PERDANIA	2.633.185	113	53.906.384	0,801	0,161	0,007	0,315	0,002
PT. BANK UOB BUANA	2.702.168	114	56.608.552	0,809	0,170	0,007	0,331	0,002
PT. BANK CIC	2.977.565	115	59.586.117	0,816	0,178	0,007	0,348	0,002
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk	3.718.579	116	63.304.696	0,823	0,190	0,007	0,368	0,003

PT BANK MIZUHO INDONESIA	3.801.109	117	67.105.805	0,830	0,201	0,007	0,391	0,003
PT. BANK LIPPO, Tbk	4.006.274	118	71.112.079	0,837	0,213	0,007	0,414	0,003
PT. BANK SUITOMO MITSUI INDONESIA	4.204.088	119	75.316.167	0,844	0,226	0,007	0,439	0,003
PT. BANK OCBC NISP, Tbk	4.355.093	120	79.671.260	0,851	0,239	0,007	0,464	0,003
PT. UFJ INDONESIA	4.459.693	121	84.130.953	0,858	0,252	0,007	0,491	0,003
STANDARD CHARTERED BANK	4.705.901	122	88.836.854	0,865	0,266	0,007	0,518	0,004
PT. BANK BUKOPIN	5.093.577	123	93.930.431	0,872	0,281	0,007	0,547	0,004
ABN AMRO NV	5.109.484	124	99.039.915	0,879	0,297	0,007	0,578	0,004
DEUTSCHE BANK AG	5.240.481	125	104.280.396	0,887	0,312	0,007	0,609	0,004
PT. BANK MEGA, Tbk	5.318.094	126	109.598.490	0,894	0,328	0,007	0,641	0,005
PT. BANK EKSPOR INDONESIA	5.909.310	127	115.507.800	0,901	0,346	0,007	0,674	0,005
PT. BANK UNIVERSAL, Tbk	6.545.681	128	122.053.481	0,908	0,366	0,007	0,712	0,005
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI, Ltd	6.602.057	129	128.655.538	0,915	0,385	0,007	0,751	0,005
PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	8.411.916	130	137.067.454	0,922	0,411	0,007	0,796	0,006
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	8.441.411	131	145.508.865	0,929	0,436	0,007	0,846	0,006
PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	8.727.877	132	154.236.742	0,936	0,462	0,007	0,898	0,006
PT. BANK NIAGA	8.780.514	133	163.017.256	0,943	0,488	0,007	0,950	0,007
PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	8.808.951	134	171.826.207	0,950	0,515	0,007	1,003	0,007
PT. BANK BALI, Tbk	9.922.582	135	181.748.789	0,957	0,544	0,007	1,059	0,008
PT. BANK DANAMON INDONESIA	10.484.535	136	192.233.324	0,965	0,576	0,007	1,120	0,008
CITIBANK	12.061.382	137	204.294.706	0,972	0,612	0,007	1,188	0,008
PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	14.752.324	138	219.047.030	0,979	0,656	0,007	1,268	0,009
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	32.357.625	139	251.404.655	0,986	0,753	0,007	1,409	0,010
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	35.265.277	140	286.669.932	0,993	0,859	0,007	1,612	0,011
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	47.199.515	141	333.869.447	1,000	1,000	0,007	1,859	0,013
TOTAL KREDIT INDUSTRI	333.869.447					1,000	30,832	0,219

<b>Koefisien Gini</b>	<b>0,781</b>
-----------------------	--------------

KOEFSISIEN GINI KREDIT TAHUN 2013								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK	34.461	1	34.461	0,009	0,000	0,009	0,000	0,000
PT. BANK SAHABAT PURBA DANARTA	183.245	2	217.706	0,018	0,000	0,009	0,000	0,000
PT. BANK ROYAL INDONESIA	357.187	3	574.893	0,028	0,000	0,009	0,000	0,000
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL	375.866	4	950.759	0,037	0,000	0,009	0,000	0,000
PT. BANK ARTOS INDONESIA	431.396	5	1.382.155	0,046	0,000	0,009	0,001	0,000
PT BANK DINAR INDONESIA	491.549	6	1.873.704	0,055	0,001	0,009	0,001	0,000
PT. BANK METRO EXPRESS	529.941	7	2.403.645	0,064	0,001	0,009	0,001	0,000
PT BANK FAMA INTERNASIONAL	608.956	8	3.012.601	0,073	0,001	0,009	0,002	0,000
PT. BANK MITRANIAGA	613.966	9	3.626.567	0,083	0,001	0,009	0,002	0,000
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK	639.456	10	4.266.023	0,092	0,001	0,009	0,003	0,000
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA	681.647	11	4.947.670	0,101	0,002	0,009	0,003	0,000
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI	733.990	12	5.681.660	0,110	0,002	0,009	0,003	0,000
PT BANK INA PERDANA	1.052.066	13	6.733.726	0,119	0,002	0,009	0,004	0,000
PT. BANK ANTAR DAERAH	1.059.105	14	7.792.831	0,128	0,002	0,009	0,005	0,000
PT. BANK ANDARA	1.140.485	15	8.933.316	0,138	0,003	0,009	0,005	0,000
PT BPD SULAWESI TENGAH	1.169.712	16	10.103.028	0,147	0,003	0,009	0,006	0,000
PT BANK HARDA INTERNASIONAL	1.213.824	17	11.316.852	0,156	0,004	0,009	0,007	0,000
PT. BANK NATIONALNOBU	1.240.058	18	12.556.910	0,165	0,004	0,009	0,008	0,000
PT. BANK GANESHA	1.270.226	19	13.827.136	0,174	0,004	0,009	0,008	0,000
BANK OF AMERIKA	1.436.792	20	15.263.928	0,183	0,005	0,009	0,009	0,000
PT. BANK YUDHA BAKTI	1.517.507	21	16.781.435	0,193	0,005	0,009	0,010	0,000
PT PRIMA MASTER BANK	1.589.705	22	18.371.140	0,202	0,006	0,009	0,011	0,000
PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA	1.731.636	23	20.102.776	0,211	0,006	0,009	0,012	0,000
PT BANK AGRIS	1.759.468	24	21.862.244	0,220	0,007	0,009	0,013	0,000
PT BANK MAYORA	1.933.711	25	23.795.955	0,229	0,008	0,009	0,015	0,000
PT. BANK SBI INDONESIA	1.938.108	26	25.734.063	0,239	0,008	0,009	0,016	0,000
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA	2.001.276	27	27.735.339	0,248	0,009	0,009	0,017	0,000
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI	2.112.512	28	29.847.851	0,257	0,009	0,009	0,018	0,000

BPD SULAWESI TENGGARA	2.122.148	29	31.969.999	0,266	0,010	0,009	0,020	0,000
PT BPD BENGKULU	2.402.867	30	34.372.866	0,275	0,011	0,009	0,021	0,000
PT BANK KALIMANTAN TENGAH	2.473.277	31	36.846.143	0,284	0,012	0,009	0,023	0,000
PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk	2.569.319	32	39.415.462	0,294	0,013	0,009	0,024	0,000
PT BPD MALUKU	2.763.084	33	42.178.546	0,303	0,013	0,009	0,026	0,000
PT. BANK BUMI ARTA	2.827.422	34	45.005.968	0,312	0,014	0,009	0,028	0,000
PT BPD LAMPUNG	2.913.015	35	47.918.983	0,321	0,015	0,009	0,030	0,000
PT. BANK MASPION INDONESIA	2.952.212	36	50.871.195	0,330	0,016	0,009	0,031	0,000
PT BPD JAMBI	2.955.328	37	53.826.523	0,339	0,017	0,009	0,033	0,000
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT	3.160.318	38	56.986.841	0,349	0,018	0,009	0,035	0,000
PT BANK JASA JAKARTA	3.484.462	39	60.471.303	0,358	0,019	0,009	0,037	0,000
PT BANK KEB INDONESIA	3.492.453	40	63.963.756	0,367	0,020	0,009	0,040	0,000
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV	3.575.724	41	67.539.480	0,376	0,021	0,009	0,042	0,000
PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk	3.698.593	42	71.238.073	0,385	0,023	0,009	0,044	0,000
PT BANK CAPITAL INDONESIA	3.743.319	43	74.981.392	0,394	0,024	0,009	0,046	0,000
BPD YOGYAKARTA	3.873.876	44	78.855.268	0,404	0,025	0,009	0,049	0,000
PT. BANK INDEX SELINDO	3.981.541	45	82.836.809	0,413	0,026	0,009	0,051	0,000
BPD NUSA TENGGARA TIMUR	4.880.662	46	87.717.471	0,422	0,028	0,009	0,054	0,000
PT. BANK WOORI INDONESIA	4.921.542	47	92.639.013	0,431	0,029	0,009	0,057	0,001
PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL	5.483.877	48	98.122.890	0,440	0,031	0,009	0,061	0,001
PT. BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk	5.516.240	49	103.639.130	0,450	0,033	0,009	0,064	0,001
PT BPD SULAWESI UTARA	5.677.152	50	109.316.282	0,459	0,035	0,009	0,068	0,001
PT BPD KALIMANTAN SELATAN	5.833.594	51	115.149.876	0,468	0,037	0,009	0,071	0,001
PT. BANK MESTIKA DHARMA	5.989.260	52	121.139.136	0,477	0,038	0,009	0,075	0,001
BPD SULAWESI SELATAN	6.191.725	53	127.330.861	0,486	0,040	0,009	0,079	0,001
PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk	6.201.453	54	133.532.314	0,495	0,042	0,009	0,083	0,001
PT BANK HANA	6.336.083	55	139.868.397	0,505	0,044	0,009	0,087	0,001
PT. CHINATRUST INDONESIA	6.392.822	56	146.261.219	0,514	0,046	0,009	0,091	0,001
PT BPD KALIMANTAN BARAT	6.518.119	57	152.779.338	0,523	0,049	0,009	0,095	0,001
PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk	6.788.775	58	159.568.113	0,532	0,051	0,009	0,099	0,001

JP MORGAN CHASE BANK	6.845.424	59	166.413.537	0,541	0,053	0,009	0,104	0,001
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk	7.066.300	60	173.479.837	0,550	0,055	0,009	0,108	0,001
DEUTSCHE BANK AG	7.768.260	61	181.248.097	0,560	0,058	0,009	0,113	0,001
PT. QNB KESAWAN, Tbk	8.208.542	62	189.456.639	0,569	0,060	0,009	0,118	0,001
BANK OF CHINA LIMITED	8.465.624	63	197.922.263	0,578	0,063	0,009	0,123	0,001
PT BPD ACEH	8.937.044	64	206.859.307	0,587	0,066	0,009	0,129	0,001
PT. BANK RESONA PERDANIA	9.771.552	65	216.630.859	0,596	0,069	0,009	0,135	0,001
PT. BANK SINARMAS, Tbk	9.968.385	66	226.599.244	0,606	0,072	0,009	0,141	0,001
PT BPD BALI	10.131.234	67	236.730.478	0,615	0,075	0,009	0,147	0,001
PT BPD SUMSEL DAN BANGKA BELITUNG	10.372.955	68	247.103.433	0,624	0,079	0,009	0,154	0,001
PT. RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA	10.417.877	69	257.521.310	0,633	0,082	0,009	0,160	0,001
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL	10.448.675	70	267.969.985	0,642	0,085	0,009	0,167	0,002
PT. BANK MUTIARA	11.131.807	71	279.101.792	0,651	0,089	0,009	0,174	0,002
PT BPD SUMATERA BARAT	11.155.045	72	290.256.837	0,661	0,092	0,009	0,181	0,002
PT BPD RIAU KEPRI	11.332.566	73	301.589.403	0,670	0,096	0,009	0,188	0,002
PT BPD PAPUA	11.378.388	74	312.967.791	0,679	0,099	0,009	0,195	0,002
THE BANGKOK BANK COMP., Ltd	11.894.111	75	324.861.902	0,688	0,103	0,009	0,203	0,002
PT. BANK COMMONWEALTH	13.482.112	76	338.344.014	0,697	0,108	0,009	0,211	0,002
PT BPD SUMATERA UTARA	15.347.592	77	353.691.606	0,706	0,112	0,009	0,220	0,002
PT. BANK ARTA GRAHA INTERNASIONAL	15.439.248	78	369.130.854	0,716	0,117	0,009	0,230	0,002
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk	17.683.639	79	386.814.493	0,725	0,123	0,009	0,240	0,002
PT BANK DKI	18.019.742	80	404.834.235	0,734	0,129	0,009	0,252	0,002
BPD KALIMANTAN TIMUR	18.536.170	81	423.370.405	0,743	0,135	0,009	0,263	0,002
PT. BANK EKONOMI RAHARJA	19.403.874	82	442.774.279	0,752	0,141	0,009	0,275	0,003
PT BPD JAWA TENGAH	21.266.727	83	464.041.006	0,761	0,147	0,009	0,288	0,003
PT. BANK ICBC INDONESIA	21.484.441	84	485.525.447	0,771	0,154	0,009	0,302	0,003
PT BPD JAWA TIMUR	21.765.264	85	507.290.711	0,780	0,161	0,009	0,315	0,003
PT ANZ INDONESIA	21.870.364	86	529.161.075	0,789	0,168	0,009	0,329	0,003
PT. BANK MEGA, Tbk	30.172.864	87	559.333.939	0,798	0,178	0,009	0,346	0,003
PT BANK MIZUHO INDONESIA	30.803.616	88	590.137.555	0,807	0,188	0,009	0,365	0,003

STANDARD CHARTERED BANK	32.662.415	89	622.799.970	0,817	0,198	0,009	0,385	0,004
PT. BANK SUITOMO MITSUI INDONESIA	34.347.925	90	657.147.895	0,826	0,209	0,009	0,407	0,004
PT BANK DBS INDONESIA	36.614.234	91	693.762.129	0,835	0,220	0,009	0,429	0,004
CITIBANK	38.194.825	92	731.956.954	0,844	0,233	0,009	0,453	0,004
PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk	44.751.099	93	776.708.053	0,853	0,247	0,009	0,479	0,004
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk	45.109.607	94	821.817.660	0,862	0,261	0,009	0,508	0,005
PT. BANK BUKOPIN	45.129.229	95	866.946.889	0,872	0,275	0,009	0,537	0,005
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	51.022.800	96	917.969.689	0,881	0,292	0,009	0,567	0,005
PT. BANK UOB BUANA	52.216.092	97	970.185.781	0,890	0,308	0,009	0,600	0,006
PT. BANK OCBC NISP, Tbk	62.357.720	98	1.032.543.501	0,899	0,328	0,009	0,636	0,006
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI, Ltd	73.312.184	99	1.105.855.685	0,908	0,351	0,009	0,679	0,006
PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk	92.202.514	100	1.198.058.199	0,917	0,381	0,009	0,732	0,007
PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk	92.386.308	101	1.290.444.507	0,927	0,410	0,009	0,791	0,007
PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk	103.045.656	102	1.393.490.163	0,936	0,443	0,009	0,853	0,008
PT. BANK DANAMON INDONESIA	103.895.851	103	1.497.386.014	0,945	0,476	0,009	0,919	0,008
PT. BANK PERMATA, Tbk	106.980.019	104	1.604.366.033	0,954	0,510	0,009	0,986	0,009
PT. BANK CIMB NIAGA	143.641.157	105	1.748.007.190	0,963	0,555	0,009	1,065	0,010
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	239.363.451	106	1.987.370.641	0,972	0,631	0,009	1,187	0,011
PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	312.380.146	107	2.299.750.787	0,982	0,731	0,009	1,362	0,012
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	416.978.030	108	2.716.728.817	0,991	0,863	0,009	1,594	0,015
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	430.621.874	109	3.147.350.691	1,000	1,000	0,009	1,863	0,017
<b>TOTAL KREDIT INDUSTRI</b>	<b>3.147.350.691</b>					<b>1,000</b>	<b>24,951</b>	<b>0,229</b>
							<b>Koefisien Gini</b>	<b>0,771</b>

<b>Keterangan:</b>			
Kolom A : Nama Bank	Kolom D : Jumlah Kumulatif Pangsa Kredit	Kolom G : $(X_k - X_{k-1})$	
Kolom B : Pangsa Kredit	Kolom E : Proporsi Kumulatif Bank (X)	Kolom H : $(Y_k + Y_{k-1})$	
Kolom C : Jumlah Kumulatif Bank	Kolom F : Proporsi Kumulatif Pangsa Kredit (Y)	Kolom I : $(X_k - X_{k-1}) (Y_k + Y_{k-1})$	

**Lampiran C. 25 Core Principles on Effective Banking Supervision**

Prinsip	Keterangan
<b>Kelembagaan</b>	
1.	Sistem pengawasan bank yang efektif memerlukan penetapan tanggung jawab dan tujuan yang jelas bagi setiap lembaga yang terkait dengan tugas-tugas pengawasan bank. Masing-masing lembaga harus memiliki independensi operasional dan sumber daya yang cukup. Kondisi tersebut memerlukan kerangka hukum yang memadai termasuk ketentuan perizinan dan pengawasannya, kewenangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dari prinsip-prinsip perbankan yang aman dan sehat, serta perlindungan hukum bagi para pengawas bank. Selain itu, diperlukan pula adanya konsensus untuk tukar-menukar informasi antar lembaga otoritas pengawas dan perlindungan kerahasiaan data yang diperlukan
<b>Perizinan</b>	
2.	Kegiatan yang diperbolehkan bagi lembaga yang diberi izin operasi dan diawasi sebagai bank harus didefinisikan secara jelas dan penggunaan kata “bank” dalam nama lembaga harus diawasi
3.	Otoritas perizinan harus memiliki kewenangan untuk menetapkan kriteria dan menolak segala proposal pendirian bank yang tidak memenuhi standar. Proses perizinan sekurang-kurangnya mencakup penilaian terhadap struktur kepemilikan organisasi bank, komisaris dan direksi, rencana operasi dan pengendalian intern, serta proyeksi laporan keuangan termasuk permodalannya. Khusus untuk usulan pendirian oleh bank asing, maka harus terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari <i>home/parent country supervisory authority</i>
4.	Otoritas pengawas harus memiliki kewenangan untuk mereview dan menolak berbagai proposal mengenai pemindahan kepemilikan secara signifikan ( <i>controlling interest</i> ).
5.	Otoritas pengawas harus memiliki kewenangan menetapkan kriteria untuk mengkaji ulang akuisisi atau investasi mayoritas oleh bank, dan dapat memastikan bahwa afiliasi/struktur perusahaan tidak membawa bank pada risiko yang berlebihan atau mengganggu efektivitas pengawasan.
<b>Persyaratan dan Ketentuan Kehati-hatian</b>	
6.	Otoritas pengawas harus menetapkan kebutuhan penyediaan modal minimum untuk semua bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang sekurang-kurangnya mencerminkan risiko yang diambil dan kemampuan bank untuk menyerap kerugian. Khusus bagi bank yang beroperasi secara internasional, persyaratan tersebut sekurang-kurangnya adalah sebagaimana telah ditetapkan oleh <i>Basel Capital Accord</i> .
7.	Sistem pengawasan bank telah mencakup penilaian terhadap kebijakan, praktik-praktik dan prosedur perkreditan dan penanaman, termasuk manajemen portofolio aset bank.
8.	Otoritas pengawas harus dapat memastikan bahwa bank telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan, praktik-praktik dan prosedur dalam melakukan penilaian terhadap kualitas aset dan kecukupan cadangan.

Prinsip	Keterangan
9.	Otoritas pengawas harus dapat memastikan bahwa bank telah memiliki sistem informasi manajemen untuk mengidentifikasi konsentrasi risiko dalam portofolio bank. Otoritas harus menetapkan batasan maksimum eksposur risiko terhadap nasabah individual dan grup baik terkait maupun tidak terkait.
10.	Dalam rangka menghindari penyalahgunaan kredit kepada pihak yang terkait, otoritas pengawas harus menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi pihak terkait, dan bank telah melakukan pemantauan secara efektif termasuk upaya-upaya lainnya dalam mengatasi risiko.
11.	Otoritas pengawas harus dapat memastikan bahwa bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dalam kegiatan perbankan internasional, termasuk kecukupan cadangan untuk mengantisipasi risiko.
12.	Otoritas pengawas harus dapat memastikan bahwa telah memiliki sistem yang dapat menghitung secara akurat, memantau dan mengendalikan <i>market risk</i> secara memadai, dan jika perlu, otoritas harus memiliki kewenangan untuk menetapkan special limit/capital charge tertentu atas <i>market risk exposure</i> .
13.	Otoritas pengawas bank harus dapat memastikan bahwa bank telah memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif, termasuk kompetensi manajemen, untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan berbagai risiko potensial, dan jika perlu, bank harus menyediakan modal untuk menopang risiko tersebut.
14.	Otoritas harus menetapkan bahwa bank telah memiliki pengendalian intern yang memadai, sebanding dengan jenis dan ukuran bisnis bank, antara lain mencakup delegasi kewenangan dan tanggung jawab, pemisahan tugas dan fungsi, rekonsiliasi, pengamanan aset, dan audit internal/eksternal yang independen, serta fungsi penegakan kepatuhan.
15.	Otoritas pengawas harus menetapkan bahwa bank telah memiliki kebijakan, praktik-praktik dan prosedur yang memadai, termasuk <i>strict know-your-customer rules</i> untuk meningkatkan standar etika dan profesionalisme dalam sektor keuangan dan mencegah terjadinya kriminalitas.
<b>Metode Pengawasan Bank</b>	
16.	Sistem pengawasan bank yang efektif sekurang-kurangnya mencakup atau merupakan kombinasi dari <i>on-site examination</i> dan <i>off-site supervision</i> .
17.	Pengawas bank harus melakukan kontrak secara teratur dengan manajemen bank dan memiliki pemahaman baik terhadap kegiatan bank yang diawasi.
18.	Kegiatan pengawas bank sekurang-kurangnya perlu mencakup tahap-tahap pengumpulan data, pengkajian dan analisis terhadap laporan-laporan bank ( <i>prudential</i> ), baik secara individual, maupun konsolidasi.

<b>Prinsip</b>	<b>Keterangan</b>
19.	Pengawas bank harus melakukan kegiatan pembuktian secara independen terhadap kebenaran informasi pengawas, baik melalui on-site examination, maupun menggunakan jasa auditor eksternal.
20.	Salah satu aspek yang mendasar dari pengawasan adalah kemampuan pengawasan bank untuk mengawasi grup perbankan secara konsolidasi.
<b>Persyaratan Informasi</b>	
21.	Pengawas bank harus dapat memastikan bahwa bank telah memiliki catatan akuntansi yang memadai berdasarkan kebijakan dan prinsip-prinsip yang berlaku dan diterapkan secara konsisten, sehingga dapat menyajikan/ memublikasikan secara berkala laporan keuangan dan hasil usaha bank secara berkala dengan wajar dan benar.
<b>Kewenangan Formal Lembaga Pengawas</b>	
22.	Otoritas pengawas harus memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut pengawasan apabila dijumpai adanya bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan kehati-hatian (misalnya ketentuan Capital Adequacy Ratio/CAR), pelanggaran ketentuan yang berlaku, atau adanya hal-hal lain yang dapat mengancam kepentingan nasabah. Dalam pengertian ekstrem, prinsip ini harus meliputi kewenangan otoritas pengawas untuk mencabut atau memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha bank.
<b>Cross-Border Banking</b>	
23.	Pengawas bank harus melakukan pemantauan dan pengawasan bank secara konsolidasi dan global serta penerapan ketentuan kehati-hatian secara memadai terhadap seluruh aspek kegiatan dari unit-unit usaha bank yang beroperasi di luar negeri (kantor cabang, <i>agency</i> , bank campuran, dan atau <i>subsidiaries</i> ).
24.	Dalam melakukan pengawasan secara konsolidasi, pengawas bank perlu melakukan kontak dan tukar-menukar informasi bank yang diawasi secara teratur dengan otoritas pengawas negara lain, terutama <i>host country supervisory authority</i> .
25.	Otoritas pengawas harus mensyaratkan bahwa terhadap kegiatan operasional kantor cabang bank asing diperlakukan sama dengan bank lokal, dan otoritas pengawas harus memiliki kewenangan untuk tukar menukar informasi yang diperlukan oleh pengawas negara asal bank asing.

Sumber: Warjiyo (2004:149-153)